



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP)
TAHUN 2005-2025
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Diperbanyak Oleh :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 26 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 - 2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 26 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD RI 1945, Pemerintah Kabupaten yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan amanat UUD RI 1945 tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun visi, misi dan arah pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai jaminan agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2005-
2025**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah kepala pemerintah daerah di Kabupaten
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan

BAB II

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 2

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai pengejawantahan dari aspirasi dari seluruh komponen masyarakat

Indragiri Hilir yang diakomodasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang.

Pasal 3

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang akan dipedomani selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya, guna mewujudkan keterpaduan pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di berbagai bidang.

Pasal 4

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Rencana Pembangunan Daerah : Prinsip, Mekanisme dan Keterkaitan
- Bab III. Identifikasi Arah Kebijakan Nasional Yang Berdampak Kepada Daerah
- Bab IV. Kondisi, Proyeksi dan Masalah-masalah Pembangunan Daerah
- Bab V. Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
- Bab VI. Kaidah Pelaksanaan
- Bab VII. Penutup

Pasal 5

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang bersisi tentang Naskah RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 6

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dipedomani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan menjabarkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan operasional setiap tahunnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pendekatan partisipatif.

BAB III

Ketentuan Peralihan

Pasal 7

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 ini akan ditinjau kembali setelah ditetapkannya RPJP Propinsi Riau atau sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 8

- (1) RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- (2) RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan kemampuan perekonomian daerah

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 14 Agustus 2008

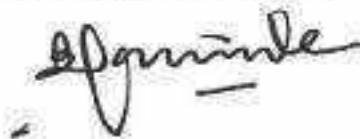
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR



H. M. RAMLI

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 15 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



H. E. HASYIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010079050

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Landasan Hukum	6
1.5. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain	7
1.6. Sistematika Penyusunan	8
BAB 2. KONDISI, ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH	10
2.1. Kondisi Umum Daerah Dan Analisis	10
2.1.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup	10
2.1.2. Demografi	16
2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	21
2.1.4. Sosial Budaya	55
2.1.5. Sarana dan Prasarana	66
2.1.6. Politik dan Pemerintah	74
2.1.7. Kewilayahan	81
2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah	85
2.2.1. Geomorfologis dan Lingkungan Hidup	85
2.2.2. Demografi	87
2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90
2.2.4. Sosial Budaya	103
2.2.5. Sarana dan Prasarana	108
2.2.6. Politik dan Pemerintah	111
2.2.7. Kewilayahan	114
BAB 3. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	117
3.1. Kemiskinan	117
3.2. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	119
3.3. Pembangunan Infrastruktur	125
3.4. Sosial Budaya dan Politik	128
3.5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	129
3.6. Masalah Penataan Manajemen Pemerintahan Daerah	131
3.7. Masalah Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	134
3.8. Pembangunan Kewilayahan	137
BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH	141
4.1. Visi	141
4.2. Misi	142

BAB 5.	ARAH KEBIJAKAN	145
5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang	145
5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah	148
5.2.1.	Arah Kebijakan RPJM I (2005-2010)	148
5.2.2.	Arah Kebijakan RPJM II (2010-2015)	156
5.2.3.	Arah Kebijakan RPJM III (2015-2020)	164
5.2.4.	Arah Kebijakan RPJM IV (2020-2025)	172
BAB 6.	KAIDAH PELAKSANAAN	180
BAB 7.	PENUTUP	182

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk, Penyebaran, Kepadatan, Jumlah Rumah Tangga, Dan Ukuran Keluarga Tahun 2004.	17
Tabel 2.2	Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (orang).	18
Tabel 2.3	Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (orang).	20
Tabel 2.4	PDRB Nominal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 Menurut Sektor (Milyar Rupiah).	25
Tabel 2.5	Distribusi PDRB ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2000 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 Menurut Sektor (%).	26
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (%).	29
Tabel 2.7	Perkembangan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004.	36
Tabel 2.8	Luas Area Tangkap dan Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004.	51
Tabel 2.9	Jumlah Siswa dan Guru SD, SLTP, dan SLTA Tahun 2000-2004 (orang).	59
Tabel 2.10	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2000-2004.	69
Tabel 2.11	Banyaknya Pengguna Air Minum PDAM Tirta Indragiri Tembilahan 2004.	72
Tabel 2.12	Kecamatan, Jumlah Desa, Luas dan Penyebarannya Tahun 2004.	83
Tabel 2.13	Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja dan Orang Yang Bekerja Tahun 2005-2025 (orang).	88
Tabel 2.14	Proyeksi PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025.	91

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah mencatat, meskipun dalam kurun waktu 1969-1997, Bangsa Indonesia telah berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan yang meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Akan tetapi realisasinya menunjukkan hasil yang timpang dari sisi keadilan yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Proses pembangunan pada waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Hal yang disebutkan dengan ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial inilah yang menyebabkan ketimpangan hasil pembangunan dari sisi keadilan.

Selama lima tahun terakhir, pembangunan telah difokuskan pada upaya mengatasi krisis multidimensi yang terjadi yang akhirnya berhasil menormalkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya untuk memikirkan kembali peranan pembangunan jangka panjang. Pemikiran ini diperkuat dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi tersebut sebagai pedoman

dalam merumuskan arah dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistim perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, disusun rencana pembangunan jangka panjang untuk masa 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peran Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah dibentuk dan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat mengiringi perubahan dalam tatanan birokrasi ke arah sistim manajemen pemerintah daerah yang lebih transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Kewenangan ini harus disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan termasuk di dalamnya adalah kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan negara yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menegaskan bahwa tanggung jawab penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam penyusunannya harus menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat yang diwujudkan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Jangka Panjang dengan mempertimbangkan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya daerah di luar lima urusan yang terdiri atas kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta kewenangan akan masalah keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Untuk itu, RPJP Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disusun dan dikonsultasikan ke seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Musrenbang-JP pada tahun 2005, harus disesuaikan dalam hal substansi dan jangka waktunya dengan RPJP Nasional. Maksud dari RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dan setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang

dimilikinya berdasarkan *platform* RPJP Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, sinergi dengan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 atau selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Bagi Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir RPJP digunakan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara partisipatif melalui rangkaian forum musyawarah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diarahkan di samping untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional, juga untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Kabupaten Indragiri Hilir dalam dimensi waktu 20 tahun ke depan.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat.

Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan yang baik, arif, bijaksana dan bertanggung jawab dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, semoga pada tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir akan berada pada kondisi di mana masyarakatnya boleh memiliki aksesibilitas yang kuat sehingga dapat menikmati kehidupan yang sejahtera.

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Berdasarkan pertimbangan ini maka RPJP Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM.
- b. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan ke depan.

1.4. Landasan Hukum

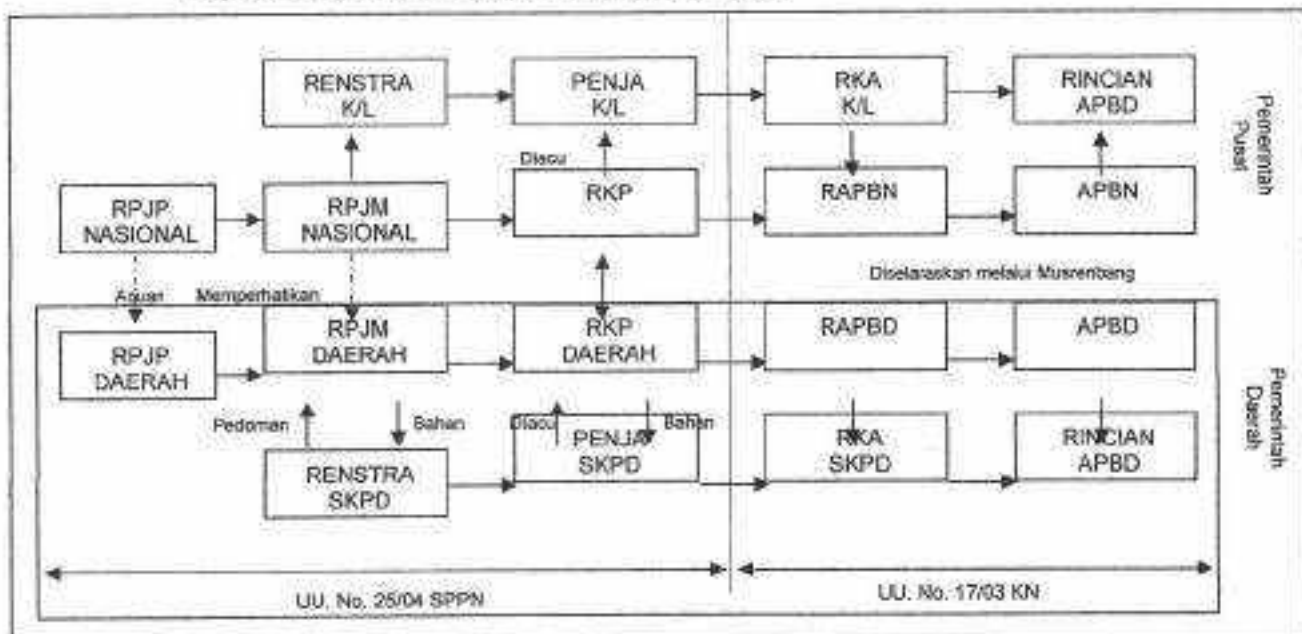
Landasan yang berlaku dalam penyusunan RPJP Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pancasila sebagai landasan idil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia masa depan.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5. Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Dalam sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir terklasifikasi sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 Tahun. Secara garis besar hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir dengan produk perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran

1.6. Sistematika Penyusunan

Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pengertian
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Hubungan Dengan Dokumen Perencanaan Lain
- 1.6 Sistematika Penyusunan

BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Daerah Dan Analisis
 - 2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 - 2.1.4. Sosial Budaya
 - 2.1.5. Sarana dan Prasarana
 - 2.1.6. Politik dan Pemerintahan
 - 2.1.7. Kewilayahan
- 2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah
 - 2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam
 - 2.2.4. Sosial Budaya
 - 2.2.5. Sarana dan Prasarana
 - 2.2.6. Politik dan Pemerintahan
 - 2.2.7. Kewilayahan

BAB III. ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

- 3.1. Kemiskinan
- 3.2. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- 3.3. Pembangunan Infrastruktur
- 3.4. Sosial Budaya dan Politik
- 3.5. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3.6. Masalah Penataan Manajemen Pemerintahan Daerah
- 3.7. Masalah Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- 3.8. Pembangunan Kewilayahan

BAB IV. VISI DAN MISI

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang
- 5.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah
 - 5.2.1. Arah Kebijakan RPJM I (2005-2010)
 - 5.2.2. Arah Kebijakan RPJM II (2010-2015)
 - 5.2.3. Arah Kebijakan RPJM III (2015-2020)
 - 5.2.4. Arah Kebijakan RPJM IV (2020-2025)

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII. PENUTUP

BAB 2

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah dan Analisis

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas wilayah daratan dan perairan yang berada pada posisi $0^{\circ} 36'$ Lintang Utara - $1^{\circ} 7'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 37'$ - $104^{\circ} 10'$ Bujur timur yakni di sekitar Selat Berhala. Posisi Kabupaten Indragiri Hilir sangat strategis karena berada di pantai timur Pulau Sumatera dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Batam dan dapat diakses melalui perairan ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan ke luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai "*Pintu Gerbang Riau Bagian Selatan*" untuk berbagai aktivitas pembangunan.

Wilayah Kabupaten ini terdiri atas daratan dan perairan yang berada pada posisi $0^{\circ} 36'$ Lintang Utara - $1^{\circ} 7'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 37'$ - $104^{\circ} 10'$ Bujur timur. Wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan di sebelah Utara. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Secara fisiologis, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah daratan rendah dengan endapan sungai, kawasan rawa-rawa bergambut, kawasan hutan payau serta pulau besar dan pulau-pulau kecil. Sebagian lainnya merupakan kawasan dataran berbukit dengan ketinggian 6 hingga 35 meter di atas permukaan laut. Beberapa pulau yang telah dihuni maupun yang belum berpenghuni di Kabupaten ini antara lain Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakung, dan beberapa pulau kecil lainnya.

Kabupaten Indragiri hilir memiliki luas wilayah sekitar 18.812,97 Km² yang terbagi atas daratan 11.605,97 Km² (92,54%) dengan luas, hutan mangrove 135, 90 Km², perairan laut 6.318,mm Km² dengan luas perairan umum mencapai 888,97 Km² dan panjang garis pantai hingga 339,50 Km².

Topografi Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daratan dan perairan dengan iklim tropis basah, dengan curah hujan relatif kecil oleh karena jumlah harinya yang relatif sedikit, dimana curah terbanyak terjadi sekitar bulan Oktober yang mencapai 252,20 mm. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga Maret setiap tahunnya sedangkan musim kemarau terjadi selama tiga bulan.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak sungai yang tersebar hampir di seluruh Kecamatan. Sungai Indragiri merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Kabupaten ini yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) dan Sungai Gangsal yang bermuara ke Selat Berhala. Sumberdaya alam yang dimiliki mineral dan bahan galian di daerah ini relatif sedikit, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama untuk tanaman yang dapat tumbuh subur di lahan gambut, seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya.

Keadaan fisik Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, bahkan sampai dengan 80% daerahnya terdiri atas gambut tipis atau bukan gambut. Kawasan ini relatif lebih subur dibanding dengan tanah gambut sekitarnya. Daerah ini tidak memiliki kekayaan tambang yang penting kecuali gambut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau tetap dipertahankan sebagai habitat berupa hutan rawa. Kawasan pesisir dapat digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara terbatas, berupa pertanian lahan kering di atas tanah gambut. Kawasan berbukit dapat dikembangkan sebagai daerah pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (karet, kopi, coklat dan cengkeh) perikanan darat dan peternakan.

Curah hujan relatif kecil oleh karena jumlah harinya yang relatif sedikit, dimana curah terbanyak terjadi sekitar bulan Oktober yang mencapai 252,20 mm. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober hingga Maret setiap tahunnya sedangkan musin kemarau terjadi selama tiga bulan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih, pengairan untuk keperluan usaha tani dan sebagainya yang mengakibatkan perembesan air laut ke daratan menjadi air tanah baik yang berasal dari maupun sumur dalam (bor) payau serta merembes hingga ke areal pertanian.

Sementara itu arus angin yang bertiup sepanjang tahun 2003 berasal dari utara dan selatan. Oleh karena posisi Kabupaten Indragiri Hilir menghadap utara, sehingga pada saat musin utara terjadi gelombang yang cukup tinggi yang mengakibatkan air pasang menjadi cukup tinggi dan membawa air laut berkadar garam sampai jauh ke hulu sungai/parit, sehingga berpengaruh terhadap kesuburan tanah bagi tanaman perkebunan kelapa, padi palawija dan lainnya.

Secara fisografis sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah dataran rendah yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah

hutan payau dan terdiri atas pulau-pulau kecil dan besar. Sebagian kecil lainnya wilayah dataran tinggi berbukit dengan ketinggian 6 – 35 dpl. Sebagian daerah pasang surut, maka terdapat sungai yang cukup banyak jumlahnya, baik sungai besar maupun kecil (anak sungai). Sungai terbesar hamir di seluruh kecamatan. Sungai yang besar adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) dan Sungai Gangsal yang bermuara ke Selat Berhala. Disamping sungai, teluk dan terusan, juga terdapat parit untuk mengendalikan air pada saat pasang atau surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi dengan sebutan "*Negeri Seribu Parit*". Selain itu karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Pulau Sumatera, maka kabupaten ini juga dikategorikan sebagai daerah pantai dengan panjang garis pantai sekitar 339,5 Km² dan luas perairan laut mencapai 6.318 Km², sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup besar.

Dibanding dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan potensi sumberdaya alam yang relatif sedikit, terutama dalam bidang sumberdaya mineral dan bahan-bahan galian, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur di lahan gambut, seperti kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya demikian pula untuk tanaman pangan berupa padi dimana Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan salah satu lumbung beras Provinsi Riau.

Sekitar 95% dari luas wilayah daratannya adalah merupakan lahan organik yang berupa lapisan gambut yang telah terbentuk ratusan tahun yang lalu, dari dari luasan tersebut sekitar 80% adalah merupakan gambut yang ketebalan lebih dari 100 cm, dimana pada lahan gambut mempunyai ketebalan lebih dari 150 cm adalah tergolong lahan yang kurang produktif untuk pertanian. Selain itu, hampir seluruh wilayah kecamatan berada pada dataran rendah yang tingginya kurang dari 50 meter dpl, kecuali Kecamatan

Keritang dan Kecamatan Kemuning yang memiliki topografi berombak hingga berbukit.

Upaya untuk mengembangkan lahan dengan kendala yang cukup tinggi tersebut terus diupayakan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta, melalui sistem "Trio Tata Air" yang meliputi saluran, tanggul dan klep air. Namun ternyata hal tersebut membawa hasil yang cukup signifikan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang dengan tingkat pertumbuhan yang relatif baik melalui pengembangan perkebunan kelapa. Adanya teknologi Tri Tata Air tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan arus pasang dan surutnya air laut (elevasi) yang menggenangi lahan gambut. Sekalipun teknologi Trio Tata air tersebut telah cukup lama dikembangkan, namun potensi lahan yang telah dikembangkan untuk pertanian baru mencapai sekitar 25,58% dari luas wilayahnya. Luas tanaman perkebunan, dengan potensialnya 722.816 hektar, sedangkan yang telah dikembangkan mencapai 565.599 hektar, kelapa sawit 577.727 hektar dan karet 5.331 hektar, selebihnya adalah tanaman pertanian lainnya seperti pinang, haramai, sagu dan padi. Sebagai salah satu lumbung padi yang ada di Provinsi Riau, maka produktivitas pertanian padi telah mencapai sebesar 4,14 ton/ha/tahun. Sekalipun demikian untuk pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir ke depan masih sangat diperlukan investasi yang cukup besar terutama dalam bidang Trio Tata Air agar potensi yang ada dapat dieksplorasi lebih optimal lagi. Adapun luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir masih sekitar 23,86 % dari luas wilayah (Indragiri Hilir Dalam angka, 2003).

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perairan, maka potensi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu menghasilkan ikan sebanyak 36.406 ton per tahun dari laut, sebanyak 2.600 ton pertahun dari perairan umum, dan dari hasil budidaya tambak yang luasnya sekitar 13.000 hektar dengan potensi produksi 333 ton pertahun. Daerah ini mempunyai luas hutan

Dilihat dan keadaan fisiknya – topografi, jenis dan sebagainya – Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi 3 tipe wilayah, yaitu :

1. Daerah dataran rendah, bahkan sampai dengan 80% daerahnya terdiri atas gambut tipis atau bukan gambut. Wilayah dengan karakteristik semacam ini meliputi Kecamatan Reteh, Enok, Kuala Indragiri, Tembilahan dan Tanah Merah. Tanah mineral yang ada di daerah ini biasanya sifat masam yang merupakan hasil endapan sungai Indragiri. Tanah ini relatif lebih subur dibanding dengan tanah gambut sekitarnya. Daerah ini tidak memiliki kekayaan tambang yang penting kecuali gambut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau tetap dipertahankan sebagai habitat berupa hutan rawa.
2. Daerah dataran rendah yang terletak di pesisir dan seluruh wilayahnya terdiri atas tanah gambut, sekitar 95% diantaranya merupakan gambut tebal. Tipe ini terdapat di Kecamatan Gaung Anak Serka, Tempuling, Mandah, Kateman dan Batang Tuaka. Wilayah dengan tipe ini mempunyai potensi yang lebih rendah dari pada wilayah dengan tipe pertama. Tanah-tanah di wilayah ini dapat digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara terbatas, berupa pertanian lahan kering di atas tanah gambut.
3. Daerah yang datar, berombak hingga berbukit, sebagian terdiri atas lahan organik yang berupa gambut, sebagian kecilnya tanah mineral (*podsolik*). Di Indragiri Hilir, wilayah dengan tipe ini hanya meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Keritang dan kecamatan Kemuning. Dibandingkan dengan tipe wilayah lainnya, wilayah tipe ini lebih potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (karet, kopi, coklat dan cengkeh) perikanan darat dan peternakan. Di wilayah ini ditemukan kekayaan alam berupa emas dan granit.

2.1.2. DEMOGRAFI

Tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 624.450 orang yang menyebar di 17 kecamatan dengan kepadatan rata-rata 54 orang per Km². kecamatan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan memiliki jumlah penduduk terbanyak 60.819 orang atau mencapai 9,74% dari total penduduk dengan kepadatan 308 orang per Km². kecamatan Reteh juga memiliki jumlah penduduk yang besar mencapai 57.322 orang atau sekitar 9,18% dengan kepadatan penduduk 104 orang per Km², diikuti Kecamatan Keritang (9,00%) dengan kepadatan 103 orang per Km².

Selain Kecamatan Tembilahan, kecamatan lain yang juga memiliki penduduk padat adalah Tembilahan Hulu mencapai 190 orang per Km² dengan proporsi sekitar 5,50% dari jumlah penduduk. Kecamatan Teluk Belengkong memiliki jumlah penduduk paling sedikit, hanya 14. 048 orang atau sekitar 2.25% dengan kepadatan 28 orang per Km². kecamatan Batang Tuaka merupakan daerah yang paling jarang penduduknya hanya 22 orang per Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 23.374 orang atau sekitar 3,74%.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 136.565 dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Tembilahan (13.206 rumah tangga), Reteh (12.471 rumah tangga) dan Keritang (12.157 rumah tangga). Sebaran paling sedikit adalah di Kecamatan Kemuning (3.298 rumah tangga), Teluk Belengkong (3.678 rumah tangga), dan Gaung Anak serka (4.659 rumah tangga).

Rata-rata ukuran keluarga (*family size*) rumah tangga di Indragiri Hilir adalah 5 orang. artinya di dalam sebuah rumah tangga rata-rata terdiri dari tiga orang anak. Beberapa kecamatan yang memiliki ukuran keluarga sebesar 4 adalah tempuling, Kemuning, Pulau Burumg, Pelangiran dan Teluk Belengkong, sedangkan kecamatan lainnya rata-rata memiliki ukuran keluarga sebanyak 5 orang.

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2000 tercatat sebanyak 555.666 orang yang terdiri dari tenaga kerja sebanyak 430.400 orang atau yang berumur 10 tahun keatas dan penduduk berumur 10 tahun kebawah 125.266 orang. Jumlah tenaga kerja 430.400 orang dibagi lagi atas jumlah angkatan kerja 218,000 orang dan bukan angkatan kerja 212.400 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Penyebaran, Kepadatan, Jumlah Rumah Tangga, dan Ukuran Keluarga Tahun 2004.

No.	Kecamatan	Penduduk (Orang)	Sebaran (%)	Kepadatan (Orang/Km ² .)	Rumah Tangga	Ukuran Keluarga
1.	Keritang	56,196	9.00	103	12,157	5
2.	Releh	57,322	9.18	104	12,471	5
3.	Enok	34,676	5.55	39	7,555	5
4.	Tanah Merah	33,221	5.32	46	7,281	5
5.	Kuala Indragiri	32,829	5.26	49	7,055	5
6.	Tembilahan	60,819	9.74	308	13,206	5
7.	Tempuling	53,117	8.51	50	12,126	4
8.	Batang Tuaka	23,374	3.74	22	4,999	5
9.	Gaung Anak Serka	23,271	3.73	38	4,659	5
10.	Gaung	40,290	6.45	39	8,279	5
11.	Mandah	44,445	7.12	30	9,171	5
12.	Kateman	43,952	7.04	78	9,521	5
13.	Kemuning	14,191	2.27	27	3,298	4
14.	Tembilahan Hulu	34,322	5.50	190	7,220	5
15.	Pulau Burung	28,817	4.61	55	7,133	4
16.	Pelangiran	29,560	4.73	56	6,756	4
17.	Teluk Belengkong	14,048	2.25	28	3,678	4
		624,450	100.00	54	136,565	5

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2005.

Jumlah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) atau juga disebut tenaga kerja tahun 2004 mencapai 528.313 orang tumbuh rata-rata per tahun sekitar 5,69% selama periode 2000-2004, rasio jumlah tenaga terhadap jumlah penduduk total mencapai 84,60% pada tahun 2004. tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 yang masuk ke dalam angkatan kerja mencapai 267.187 orang atau sekitar 50,57% dari jumlah tenaga kerja, di mana pada tahun 2001 rasionya paling rendah hanya 42,44%. Selama tahun 2000-2004 pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Indragiri Hilir mencapai rata-rata 5,64%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sekitar 97,79% telah bekerja dan sekitar 2,21% sedang mencari pekerjaan atau tidak sedang bekerja. Jumlah bukan angkatan kerja tahun 2000 sebanyak 212.400 orang, meningkat rata-rata 5,74% menjadi sebanyak 261.126 orang. Yang termasuk ke dalam golongan tenaga kerja tapi bukan angkatan kerja adalah mereka yang telah berusia lebih dari 10 tahun tetapi tidak bekerja karena mengurus rumah tangga (ibu rumah tangga), sedang bersekolah (*enrollment*) dan karena kekurangmampuan, seperti orang jompo, cacat dan ayng tidak menjalankan aktivitas pekerjaan.

Tabel 2.2 Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (Orang)

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	Pert. (%)
Angkatan Kerja	218.000	238.390	241.334	253.931	267.187	5,64
Rasio Angkatan Kerja (%)	50,65	42,44	50,61	50,59	50,57	
Bekerja	213.200	233.140	236.012	248.326	261.286	5,64
Rasio Bekerja (%)	97,80	97,80	97,79	97,79	97,79	
Mencari Pekerjaan	4.800	5.250	5.322	5.605	5.901	5,73
Rasio Pencari Kerja (%)	2,20	2,20	2,21	2,21	2,21	
Bukan Angkatan Kerja	212.400	323.276	235.500	247.982	261.126	5,74
Rasio Bukan Angkatan Kerja (%)	49,35	57,56	49,39	49,41	49,43	
Tenaga Kerja	430.400	561.665	476.834	501.913	528.313	5,69
Jumlah Penduduk	555.666	563.178	615.615	647.996	624.450	3,09

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, berbagai tahun terbitan

Penduduk Indragiri Hilir masih dominan menggantungkan hidup di sektor pertanian sebagai pekerjaan utamanya. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tahun 2004 mencapai 202.194 orang atau sekitar 74,47% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 6,87% selama periode 2000-2004 lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan total. Sektor lainnya yang kontribusinya di atas 10% di dalam penyediaan kesempatan kerja adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebanyak 30.017 orang dengan pertumbuhan rata-rata 6,80% masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan total.

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa keuangan dan persewaan tumbuh rata-rata sekitar 8,13%, tertinggi laju pertumbuhannya, dengan kontribusi sekitar 0,10% kedua terkecil setelah sektor listrik dan air bersih (0,09%). Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan di dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 0,18% dan selama periode 2000-2004 memiliki laju pertumbuhan paling lambat, rata-rata hanya sekitar 5,95% per tahun.

Sektor industri pengolahan yang diharapkan menjadi pendorong utama ekonomi, ternyata hanya memberikan sumbangan sekitar 3,40% di dalam penyerapan tenaga kerja dan laju pertumbuhannya masih dibawah rata-rata pertumbuhan total, hanya 6,73%. Sinergi sektor pertanian dan industri, seperti agroindustri, belum mampu mendorong kesempatan kerja yang baru. Hal ini dikarenakan beberapa industri baru lebih lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) sehingga kurang elastis di dalam kesempatan kerja.

Tabel 2.3 Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (Orang)

N o	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Pert (%)	Sebaran (%)
1.	Pertanian	158.600	177.340	179.529	190.839	202.194	6,87	74,47
2.	Pertambangan	400	440	445	469	495	5,94	0,18
3.	Industri	7.280	8.140	8.240	8.767	9.240	6,73	3,40
4.	Listrik	200	220	225	239	250	6,25	0,09
5.	Bangunan	1.800	2.020	2.050	2.188	2.327	7,32	0,86
6.	Perdagangan	23.600	29.390	26.710	28.417	30.017	6,80	11,06
7.	Perhubungan	8.000	8.940	9.050	9.626	10.163	6,76	3,74
8.	Keuangan	200	230	235	255	265	8,13	0,10
9.	Jasa	13.120	11.670	14.850	15.799	16.568	6,57	6,10
	Jumlah	213.200	238.390	241.334	256.599	271.519	6,84	100,00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam angka, berbagai tahun terbitan

Sektor bangunan dan konstruksi hanya memberikan kontribusi kesempatan kerja di tahun 200 sekitar 0,86% dengan jumlah tenaga kerja hanya sebanyak 2.327 orang. Namun pertumbuhannya selama tahun 2000-2004 relatif tinggi mencapai 7,32% lebih tinggi dibanding pertumbuhan total. Sektor perhubungan dan komunikasi selama periode yang sama tumbuh lambat dengan rata-rata per tahun sekitar 6,76% lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan total, namun kontribusinya relatif besar mencapai 3,74%. Kondisi yang sama juga terjadi di sektor jasa sosial dan pemerintahan yang tumbuh relatif lambat, dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja total mencapai 6,10%.

2.1.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

1. Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Pendapatan Regional Riau, 2006:2). PDRB atas dasar tahun berlaku dapat digunakan sebagai alat untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melaksanakan analisis tentang pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dari perkembangan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir selama rentang waktu tahun 2000-2004 terlihat adanya mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik PDRB yang diukur menurut harga berlaku maupun yang diukur dengan harga konstan. PDRB Kabupaten Indragiri Hilir atas

berlaku pada tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.358,05 milyar dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 3.723,62 milyar.

Sedangkan jika diukur berdasarkan harga konstan tahun 1993 terlihat besarnya PDRB Indragiri Hilir tahun 2000 adalah Rp. 2.3508,05 milyar, dan pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 2.804,54 milyar. Hal ini disebabkan pada perhitungan atas dasar harga konstan telah dihilangkan faktor inflasi.

Besaran PDRB dan pendapatan perkapita yang dicapai Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dalam rentang waktu tahun 2000-2004 PDRB perkapita memperlihatkan peningkatan yang cukup berarti dari Rp. 4.243.646,36 dalam tahun 2000 menjadi sebesar Rp. 4.491.216,27 pada akhir tahun 2004.

Pendapatan perkapita di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rentang waktu yang sama juga memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan dari Rp. 3.492.100 menjadi sebesar Rp. 4.498.270 pada akhir tahun 2004. hal ini memberikan indikasi bahwa ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir terus bergerak secara positif dalam pembentukan pundi-pundi penerimaan PDRB.

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan sektor usaha tahun 2003 dan tahun 2004 mengalami penurunan yang cukup berarti dibanding dengan tahun 2002. hal ini memberikan indikasi bahwa ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir terus bergerak secara positif dan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa yang berakumulasi terhadap pembentukan pundi-pundi penerimaan PDRB.

Tahun 2002 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,94%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi Riau

(7,91%. Namun pada tahun 2003 mengalami penurunan, yakni hanya mencapai besaran 6,67%, lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi propinsi Riau (8,30%). Tahun 2004 kembali mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni mencapai 7,64%, namun masih tetap berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi propinsi Riau (8,95%). Gambaran ini memberikan petunjuk bahwa pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir dalam rentang waktu tersebut sangat fluktuatif. Salah satu penyebab utama turunnya pertumbuhan ekonomi di Indragiri Hilir ini adalah, ditenggarai akibat pertumbuhan menurun yang terjadi pada sektor bangunan.

2. Perkembangan PDRB

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan menganalisis struktur dan perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) selama rentang waktu tertentu. Mencermati perkembangan PDRB dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, perekonomian Indragiri Hilir secara sektoral diperkirakan akan tumbuh dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Hal ini didukung oleh faktor-faktor ekonomi maupun non ekonomi yang menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih optimistik.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumberdaya yang terbatas adanya sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang.

a. PDRB Nominal Menurut Sektor Tahun 2000-2004

PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 2.358,05 milyar secara keseluruhan sektor pertanian memberikan kontribusi yang terbesar

48,10% tahun 2000 (Rp. 1.134,25 milyar), dan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2004 yakni 51,77% (Rp. 1.897,94 milyar).

Kontribusi sektor berikutnya yang mempunyai peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama lima tahun, sektor ini terus tumbuh dari Rp. 343,69 milyar pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp. 590,27 milyar di akhir tahun 2004, atau dengan rata-rata pertumbuhan 23,61% per tahunnya. Kontribusi sektor jasa merupakan sektor ekonomi ketiga terbesar dengan kontribusi sebesar 10,74%. Namun pada akhir tahun posisi terbesar ketiga berada di sektor industri dengan capaian kontribusinya sebesar 10,15%. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir bergerak dengan berkembangnya sektor industri, terutama industri pengolahan mulai dari industri hulu sampai industri hilir sehingga potensi-potensi yang selama ini terabaikan, mulai dimanfaatkan sebagai salah satu aspek ekonomi. Di sisi lain, kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2004 menjadi kabupaten yang mengarah pada pertanian yang didukung oleh sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran serta jasa dan sektor lainnya. Namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai sektor industri maju sendiri tanpa mengangkat sektor lain. Atau majunya sektor industri tidak berpengaruh terhadap sektor-sektor lain sehingga menghalangi mobilitas tenaga kerja antar sektor, tidak menambah kesempatan kerja, terjadinya perbedaan yang tajam tingkat produktivitas tenaga kerja di setiap sektor, dan akhirnya bermuara pada ketimpangan distribusi pendapatan menurut golongan masyarakat.

**Tabel 2.4 PDRB Nominal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004
Menurut Sektor (Milyar Rupiah)**

No	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004
1.	Pertanian	1.134,25	1.367,13	1.552,34	1.667,50	1.897,94
	a. Tanaman Pangan	290,12	325,29	362,84	380,02	415,79
	b. Perkebunan	475,76	586,87	666,51	722,19	829,99
	c. Peternakan	25,60	31,53	35,64	36,93	41,73
	d. Kehutanan	253,17	313,27	356,54	384,23	441,55
	e. Perikanan	89,60	110,17	130,81	144,13	168,88
2.	Pertambangan	24,27	30,45	35,38	38,13	44,33
	a. Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Penggalian	24,27	30,45	35,38	38,13	44,33
3.	Industri	239,28	259,64	296,51	317,07	348,28
	a. Besar/ sedang	219,13	235,61	269,34	288,91	316,80
	b. Kecil/ rumah tangga	20,15	24,03	27,17	28,16	31,48
4.	Utiliti	3,41	4,35	4,93	5,41	6,32
	a. Listrik	2,90	3,54	4,04	4,46	5,15
	b. Air minum	0,51	0,81	0,89	0,95	1,17
5.	Konstruksi	66,60	108,16	124,65	136,59	153,49
6.	Perdagangan	343,69	417,50	483,04	515,59	590,27
	a. Perdagangan	326,30	389,49	461,31	491,60	563,56
	b. Hotel	5,97	6,57	7,52	8,25	9,19
	c. Restoran	11,42	12,44	14,21	15,74	17,52
7.	Transportasi	71,50	87,98	101,17	110,41	124,29
	a. Angkutan Darat	50,33	31,14	35,66	37,88	41,78
	b. Angkutan Laut	14,31	48,40	55,65	61,69	69,65
	c. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Jasa Penumpang	3,13	3,75	4,18	4,70	5,83
	e. Komunikasi	3,73	4,69	5,68	6,14	7,03
8.	Kuangan	221,89	197,66	120,32	148,30	165,69
9.	Jasa	253,16	276,18	319,93	349,41	393,01
	PDRB Inhil	2.358,05	2.749,05	3.038,27	3.288,41	3.723,62

Sumber: Olahan Data BPS, 2005

Tabel 2.5. Distribusi PDRB ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2000 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 Menurut Sektor (%)

No	Sektor	Berlaku		Konstan	
		2000	2004	2000	2004
1.	Pertanian	48,10	50,97	48,10	51,77
	a. Tanaman Pangan	12,30	11,17	12,30	12,31
	b. Perkebunan	20,18	22,29	20,18	22,45
	c. Peternakan	1,09	1,12	1,09	1,15
	d. Kehutanan	10,74	11,86	10,74	11,82
	e. Perikanan	3,80	4,54	3,80	4,04
2.	Pertambangan	1,03	1,19	1,03	1,16
	a. Pertambangan	-	-	-	-
	b. Penggalian	1,03	1,19	1,03	1,16
3.	Industri	10,15	9,35	10,15	10,15
	a. Besar/sedang	9,29	8,51	9,29	9,20
	b. Kecil/rumah tangga	0,85	0,85	0,85	0,95
4.	Utiliti	0,14	0,17	0,14	0,15
	a. Listrik	0,12	0,14	0,12	0,13
	b. Air minum	0,02	0,03	0,02	0,02
5.	Konstruksi	2,82	4,12	2,82	3,88
6.	Perdagangan	14,58	15,85	14,58	15,15
	a. Perdagangan	13,84	15,13	13,84	14,41
	b. Hotel	0,25	0,25	0,25	0,27
	c. Restoran	0,48	0,47	0,48	0,47
7.	Transportasi	3,03	3,34	3,03	3,21
	a. Angkutan Darat	2,13	1,12	2,13	1,06
	b. Angkutan Laut	0,16	1,87	0,61	1,81
	c. Angkutan Udara	-	-	-	-
	d. Jasa Penumpang	0,13	0,16	0,13	0,15
	e. Komunikasi	0,16	0,19	0,16	0,18
8.	Keuangan	9,41	4,45	9,41	4,82
9.	Jasa	10,74	10,55	10,74	9,70
PDRB Inhil		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Olahan Data BPS, 2005

Jika dibandingkan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2000-2004, kelihatan bahwa sektor pertanian naik dari 48,10% menjadi 50,97%, peranan sektor perdagangan naik dengan pertumbuhan yang rendah yaitu dari 14,58% menjadi 15,85% sedangkan peranan sektor industri menurun dari 10,15% menjadi 9,35%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa sektor industri antara tahun 2000-2004 perlu dorongan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah khususnya sektor agro industri yang banyak memberi nilai tambah dari sektor pertanian dengan tidak mengabaikan peranan sektor perdagangan dan jasa.

b. PDRB Riil Menurut Sektor Tahun 2000-2004

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dimaksud untuk menghilangkan pengaruh inflasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya pertumbuhan output secara riil dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi antara tahun 2000-2004.

Pada tahun 2000 atas dasar harga konstan tahun 1993 sebesar Rp. 2.358,05 milyar dengan perincian berdasarkan sektor adalah sektor pertanian Rp. 1.134,25 milyar, sektor perdagangan Rp. 343,69 milyar dan sektor jasa Rp. 253,16 milyar. Dan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa perekonomian Indragiri Hilir terdapat tiga sektor kunci yaitu sektor pertanian, Perdagangan dan Industri.

Pada tahun 2004 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (riil) mencapai Rp. 2.805,54 milyar yang terdiri dari pertanian Rp. 1.451,98 milyar, industri Rp. 284,76 milyar, sektor perdagangan Rp. 425,84 milyar dan sumbangan-sumbangan sektor lainnya sebanyak Rp. 642,96 milyar. Perbedaan di tahun 2000 adalah, telah terjadinya pergeseran sektor kunci (*leading sector*) yakni sektor industri mengalami perubahan menjadi

sektor kunci tiga besar. Dengan perkataan lain bahwa, pada tahun 2004 ini, sektor kunci berada pada pertanian, sektor perdagangan dan sektor industri. Dengan berkembangnya tiga sektor kunci ditambah dengan peningkatan sektor-sektor lainnya, maka dalam kurun waktu lima tahun ke depan diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas serta bertambahnya peluang bagi penanam modal baik PMA maupun PMDN.

c. Sebaran PDRB

Persentase distribusi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pada hakekatnya merupakan bentuk struktur perekonomian antara tahun 2000-2004, karena menggambarkan peranan atau sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB, disamping itu juga menjelaskan pertumbuhan sektor dan perekonomian dalam kurun waktu tersebut.

d. Pertumbuhan Menurut Sektor

Berdasarkan data BPS Kabupaten Indragiri Hilir, PDRB Indragiri Hilir atas dasar harga konstan tahun 1993, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2000 adalah 4,44% kemudian pada tahun 2002 mengalami penurunan yang cukup berarti menjadi 2,83% atau turun sebesar 1,74%. Tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 5,22% atau naik sebesar 2,39%, selanjutnya tahun 2004 ekonomi Indragiri Hilir kembali mengalami penurunan sebesar 0,06% atau hanya tumbuh sebesar 5,16%.

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2004 (%)

No	Sektor	2000	2002	2003	2004
1.	Pertanian	6,37	6,75	6,28	5,77
2.	Pertambangan	7,64	10,05	3,88	7,63
3.	Industri	4,45	5,67	3,61	4,46
4.	Utiliti	6,10	5,25	4,50	8,00
5.	Konstruksi	13,09	6,82	6,04	3,14
6.	Perdagangan	5,50	6,81	3,28	5,50
7.	Transportasi	5,90	7,02	5,48	3,81
8.	Kuangan	- 11,67	- 39,86	6,89	6,17
9.	Jasa	1,82	5,58	3,43	2,60
Total PDRB		4,44	2,83	5,22	5,16

Sumber : BPS Kab. Inhil Data Olahan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2000-2004 hanya mencapai sebesar 3,04% dan selama yang paling cepat pada tahun 2003-2004 yang mencapai 5,43% per tahun. Pertumbuhan sebesar 5,43% dipandang cukup memadai sesuai dengan potensi dan kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir, apalagi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk antara tahun 2003-2008 sebesar 3,09% setahun. Dasar pertimbangan lainnya adalah berkaitan dengan pertambahan kesempatan kerja rata-rata 4,52%. Dengan demikian diharapkan akan dapat mengurangi tingkat pengangguran secara bertahap. Pertimbangan lainnya berkenaan dengan kemampuan pemerintah kabupaten untuk menarik investor ke daerah tersebut.

Jika diamati berdasarkan lapangan usaha (sektoral), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 berdasarkan harga konstan secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertanian tumbuh sebesar 5,77%
2. Pertambangan dan penggalan tumbuh sebesar 7,63%

3. Industri pengolahan tumbuh sebesar 4,46%
4. Listrik dan air bersih tumbuh sebesar 8,00%
5. Bangunan tumbuh sebesar 3,14%
6. Perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 5,50%
7. Pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 3,81%
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan dengan konstruksi sebesar 6,17%, dan
9. Jasa-jasa tumbuh sebesar 2,60%

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir antara tahun 2000-2004 rata-rata hanya sekitar 4,44%. Angka ini masih sangat rendah dibandingkan dengan pertumbuhan output riil Provinsi Riau yang mencapai 5% lebih. Hal ini karena kondisi dan potensi Kabupaten Indragiri Hilir, serta komposisi dan laju pertumbuhan penduduk belum diberdayakan sepenuhnya untuk menopang kemajuan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi antara tahun 2000-2004 hanya mencapai 3,10% sebagai akibat dari rendahnya pertumbuhan sektor keuangan dan bank yaitu - 9,40% (minus) dan perhubungan darat yang tumbuh - 9,09% pada periode yang sama.

e. Analisis Sektor Basis

Dilihat dari nilai LQ sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir selalu lebih mendominasi dibanding dengan sektor perekonomian lainnya. Luas areal perkebunan kelapa di daerah ini merupakan areal terluas di seluruh Provinsi Riau, dan menjadi komoditi andalan yakni kopra sejak dulu yang telah dibudidayakan oleh masyarakatnya secara turun temurun sebagai sumber penghidupan. Koefisien LQ untuk sub sektor tanaman bahan makanan (1,43), sub sektor perkebunan (1,51), dan sub sektor perikanan (1,85) atau dengan rata-rata sebesar 50,22%.

Sektor berikutnya yang mempunyai peran besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir adalah sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran), hotel dan restoran (1,42) menjadi sektor basis berikutnya di daerah ini dan sejalan dengan kontribusinya yang juga terbesar dalam struktur perekonomian daerah. Selama lima tahun perdagangan, hotel dan restoran terus tumbuh dari Rp. 343,69 milyar tahun 2000 mejadi Rp. 424,84 milyar diakhir tahun 2004.

Peluang sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk terus berkembang sangat besar dilihat dari segi letak geografisnya yang sangat strategis sebagai tempat transit, karena berada dibagian selatan Provinsi Riau dan bagian timur pesisir Sumatera serta berdekatan dengan beberapa daerah yang ekonominya mulai membaik maupun negara tetangga (Singapura dan Malaysia). Banyaknya pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi di Indragiri Hilir, pada gilirannya akan memberikan keuntungan tersendiri dalam usaha pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan prospektif pengembangan KUKM di daerah ini dan seiring dengan kondisi luas wilayah yang cukup, maka potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa aktifitas yang prospektif untuk dikembangkan adalah yang secara langsung berhubungan dengan sektor basis daerah. Sektor pertanian di daerah ini adalah sub sektor perkebunan, dan sektor basis berikutnya adalah sektor perdagangan.

Sektor bangunan dan konstruksi menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh cepat dan memiliki keunggulan di peringkat daerah dan berkembang secara mantap tanpa perlu suatu indikasi kebijakan khusus. Perkembangan daerah yang pesat akan mendorong permintaan akan perumahan bangunan, sehingga walaupun tanpa suatu kebijakan khusus, sektor tumbuh dengan sendirinya.

Sektor pertanian mengalami penambahan output lebih lambat dibandingkan dengan perubahan yang terjadi di peringkat Provinsi. Sektor pertanian tidak dapat terus menerus diandalkan sebagai penopang utama perekonomian, walaupun di peringkat kabupaten sektor ini masih sangat dominan. Perlu pengembangan sektor agroindustri guna mendukung produksi hasil pertanian yang dihasilkan daerah, sehingga sektor ini tidak statis. Hal yang sama juga dialami sektor jasa-jasa keuangan yang perubahannya lebih lambat dibandingkan Provinsi.

Sektor pertambangan, khususnya penggalian tumbuh lebih cepat dibanding dibandingkan di peringkat provinsi, dan perlu adanya perbaikan di dalam prasarana wilayah terutama untuk transportasi. Sektor industri serta listrik dan air bersih, perdagangan, transportasi dan jasa sosial juga mengalami pertumbuhan yang lambat dikarenakan beberapa faktor lokal yang kurang unggul, namun sektor ini mejadi salah satu sektor yang favorit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, terutama jika prasarana transportasi dan faktor pendukung lainnya semakin baik.

f. Ketimpangan dan Kemiskinan

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Kuncoro,2004:127)

Di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2003, bagian kecil dari penduduk (20%), atau mereka yang memperoleh pendapatan tinggi dengan rata-

rata per kapita per tahun mencapai Rp. 10.089,680,- secara keseluruhan mereka mendapatkan sekitar 39,76% dari total pendapatan. Sedangkan sekitar 40% penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menerima 17,48% dari total pendapatan dengan pendapatan per kapita adalah sebesar Rp. 2.216.720. dan penduduk berpenghasilan menengah memperoleh 42,76% dengan pendapatan per kapita Rp. 5.920.040,- dan 20%. Kalau dilihat dari sisi disparitas atau ketimpangan kemiskinan, keadaan ini masih digolongkan sebagai daerah dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk relatif rendah dengan angka Gini sebesar 0,398.

Selain melalui ketimpangan pendapatan antar penduduk, untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah melalui angka penduduk miskin. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau (2003) angka penduduk miskin di Provinsi Riau mencapai 40% dimana jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebab-sebab kemiskinan digolongkan menjadi dua, yaitu alamiah dan struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh kurang menguntungkannya sumberdaya yang dimiliki, baik manusia maupun alam. Kemiskinan struktural disebabkan oleh keberadaan institusi dan tatanan peraturan yang diterapkan di masyarakat. Kemiskinan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kedua golongan sebab kemiskinan tersebut, alamiah dan struktural.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 mencapai 199.497 orang atau mencapai 31,95% dengan jumlah keluarga mencapai 46.235 KK. Persentase penduduk miskin terbesar ada di Kecamatan Teluk Belengkong, yaitu mencapai 66,54% dan yang paling rendah di Kecamatan Tanah Merah, dimana penduduk miskinnya hanya sekitar 5,11%. Faktor pendidikan masih menjadi salah satu faktor utama

di dalam penyebab kemiskinan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir. Sekitar 65,90% kepala rumah tangga miskin hanya sampai berpendidikan sekolah dasar, bahkan 30,17% tidak bisa membaca tulis atau buta huruf. Sedangkan kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan SLTA sederajat hanya sekitar 0,11% serta berpendidikan SLTP sederajat sekitar 3,82%.

Jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Kecamatan Tempuling yaitu 19.060 orang atau sekitar 9,55% dari jumlah penduduk miskin di Indragiri Hilir. Di Kecamatan Mandah jumlah penduduk miskin 16.457 orang atau sekitar 8,25%, di kecamatan Tembilahan sebanyak 14.824 orang atau sekitar 7,43%. Penduduk miskin paling sedikit di Kecamatan Tanah Merah yaitu 1.696 orang atau sekitar 0,85%, di Kecamatan Kemuning sebanyak 7.587 orang (3,80%) dan di Kecamatan Gaung Anak Serka sebanyak 7.618 orang (3,82%)

Kecamatan Tanah Merah selain distribusi penduduk miskinnya paling sedikit, juga proporsi penduduk miskin di kecamatan ini paling kecil hanya 5,11% dari keseluruhan penduduk dan satu-satunya kecamatan yang proporsi penduduk miskinnya kurang dari 10%. Kecamatan lain dengan proporsi penduduk miskin sedikit adalah Keritang (23,97%) dan Tembilahan (24,37%). Kecamatan lain yang proporsi penduduk miskinnya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kabupaten adalah kecamatan Reteh (24,64), Enok (26,87), Keteman (29,01) dan Pulau Burung (30,55).

Di Kecamatan Blengkong dari seluruh penduduknya sekitar 66,54 % diklasifikasikan sebagai penduduk miskin dan merupakan yang paling besar proporsinya. Kecamatan lain yang tinggi proporsi penduduk miskin adalah Batang Tuaka (56,48) dan Kemuning (53,46). Sedangkan Kecamatan lainnya memiliki penduduk miskin di bawah 50%.

g. Investasi

Pembangunan daerah yang pesat memerlukan adanya investasi pihak swasta, tanpa adanya investasi, target pembangunan yang telah ditetapkan akan sulit untuk dicapai seperti yang diharapkan. Potensi daerah merupakan salah satu faktor pertimbangan masuknya investor, terutama investor asing. Namun juga pertimbangan lain juga tidak kalah penting di dalam menentukan keputusan investor untuk berinvestasi. Diantara ketersediaan infrastruktur, keamanan dan yang tak kalah pentingnya insentif dan kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh daerah sendiri.

Upaya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan promosi tentang sumberdaya yang dimilikinya dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi. Tahun 2000, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, nilai investasi yang dilakukan pihak swasta sebesar Rp. 3.041 Milyar lebih. Di tahun 2001, tidak terjadi perubahan yang berarti jumlah nilai investasi yang ada seperti terlihat pada Tabel 2.7.

Perkembangan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir relatif lambat, bila dibandingkan dengan perkembangan investasi rata-rata di wilayah Propinsi Riau. Tahun 2002 investasi di Indragiri Hilir hanya tumbuh sekitar 0,89% menjadi Rp.3.068 milyar. Tahun 2003 dan 2004 baru terjadi kenaikan cukup tinggi di dalam investasi, yaitu sekitar 8,57% dan 9,22%.

Tabel 2.7. Perkembangan Investasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000 – 2004

Tahun	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)
2000	3.041	-
2001	3.041	-
2002	3.068	0.89
2003	3.331	8.57
2004	3.638	9.22

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, 2005

h. Indrustri dan perdagangan

Indrustri adalah pilar utama dalam menggerakkan ekonomi rakyat, karena dengan perubahan bentuk bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam arti dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lokal atau antar daerah maupun domestik. Konsekuensi logis pemanfaatan sumber daya lahan untuk pengembangan berbagai komoditas memberikan peluang untuk pengembangan indrustri pengolahan/ pembuatan pakan ternak dan ikan dengan potensi bahan baku yang cukup tersedia, indrustri pengolahan makanan dari tepung beras dan ubi, serta pengolahan kecap serta makan dari sagu dan buah-buahan, pengolahan sabut kelapa menjadi bahan jadi dengan potensi yang dapat dimanfaatkan ± 15.091 ton, pengolahan batang kelapa menjadi bahan meubel dan perabot dengan potensi bahan baku ± 287.728 ton, indrustri pengolahan kelapa sawit dan hasil kehutanan dapat dibuat *moulding*, *chipwood*, *sawtimber*, sumpit dan bahan pensil serta indrustri pembuatan alat-alat (suku cadang) maritime.

Letak wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang strategis, menjadikan orientasi transportasi mampu menjangkau ke sejumlah kabupaten di provinsi tetangga dan dengan Negara tetangga. Kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya

merupakan lahan gambut yang terdapat sejumlah sungai, anak sungai, kanal dan parit, mempunyai peran yang sangat penting untuk menghubungkan dan membuka seluruh wilayah kecamatan dengan menggunakan sarana transportasi air.

Ditetapkan beberapa kawasan sebagai daerah industri, seperti Kawasan Industri Kuala Enok, Kawasan Industri Sei. Guntung, adanya daerah pengembangan baru baik untuk pertanian dalam skala besar, daerah perdagangan, dan daerah pemukiman baru lainnya, menciptakan peluang bisnis dan investasi di berbagai bidang terutama dibidang perdagangan, industri dan jasa khususnya jasa transportasi kapal barang dan fery serta peti kemas. Demikian pula untuk pengembangan jasa telekomunikasi serta investasi di bidang perhotelan, mengingat sampai saat ini hotel respresentatif yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat terbatas jumlah yang ada di Tembilahan maupun di beberapa ibukota kecamatan sehingga peluang ini cukup baik dan terbuka. Adapun fasilitas penunjang yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir baik yang dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta antara lain transportasi, dengan fasilitas pendukung;

- Panjang jalan $\pm$ 1.289 Km, jalan yang kondisinya mantap baru $\pm$ 438 Km dan sebagian lagi merupakan jalan tanah.
- Semua kecamatan sudah ada dermaga baik penumpang maupun barang.
- Sarana transportasi laut dan sungai sebagai urat nadi utama dalam sistim transportasi di Kabupaten Indragiri Hilir, baik jumlah maupun kapasitas sudah cukup memadai. Oleh karena melalui transportasi laut/sungai ini telah beberapa wilayah strategis di Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu mengakses ke Tanjung Jabung Provinsi Jambi, Tanjung Balai Karimun dan Batam Provinsi Kepulauan Riau, serta ke Negara Singapura dan Malaysia.

i. Koperasi dan UKM

Ekonomi dan kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim pada di pedesaan. Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan (Sarbani, 2004:27).

Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah lama, namun sering kali dilupakan orang bahkan banyak tidak memahami secara tepat apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan sistim ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak pada suatu Negara atau suatu daerah dan pada umumnya keadaannya tertinggal dibandingkan dengan perekonomian Negara atau daerah bersangkutan secara rata-rata. Pengertian lain disebutkan ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (people's economy is endogeneous economy), bukan aktifitas masyarakat (external economy).

Salah satu bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan adalah melalui pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peranan dan arti strategis dalam program pengembangan daerah. Gejolak ekonomi semasa krisis sampai sekarang membuktikan bahwa koperasi dan UKM mampu tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah sulitnya perekonomian bangkit mengejar angka pertumbuhan. Bilamana keberadaan koperasi dan UKM dapat tumbuh dengan baik akan dapat memperkuat ketahanan ekonomi.

Koperasi telah membuka jalan bagi terciptanya peluang kerja serta memberikan pelayanan ekonomi dan sosial bagi anggota, serta menjembatani antara

produsen dan konsumen melalui hubungan perdagangan. Usaha-usaha kecil dan mikro di kabupaten Indragiri Hilir perlu diperdayakan melalui koperasi, hal ini disebabkan sesuai dengan azas koperasi yaitu kebersamaan dan kerjasama melalui koperasi. Para pelaku usaha-usaha kecil dan mikro yang bergerak pada usaha-usaha produksi sebagai produsen kecil, secara bersama-sama dapat menjual produk-produk yang dihasilkan, disamping membeli sarana/input produksi secara bersama-sama pula. Dalam kebersamaan itu akan terjadi penguatan kemampuan bersaing, baik dalam hasil penawaran maupun permintaan.

Dengan kebersamaan itu pula, akan dapat diwujudkan economic of scale serta economic of scope yang menekankan besarnya komponen biaya seperti biaya transport atau biaya-biaya lainnya, sehingga dapat dicapai efisiensi teknis dan ekonomis dalam kegiatan usaha kecil yang akan dijalankan oleh para anggota koperasi. Secara bersama-sama, para anggota pengusaha kecil akan dapat menghimpun dan mengakumulasi potensi produksi mereka dalam jumlah yang besar, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan. Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun atau berkaitan dengan seni budaya. Dalam perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil memegang

peranan yang sangat penting terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil. Usaha kecil ini selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, juga sebagai upaya untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan.

Dengan demikian, pengembangan usaha kecil menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat golongan ekonomi lemah. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi golongan masyarakat tersebut untuk mendapatkan fasilitas modal dari lembaga ekonomi kerakyatan yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi. Hal ini berkaitan dengan pemerintah memberikan pengaruh dan bimbingan serta menciptakan iklim yang baik dan pertumbuhan dan pengembangan usaha-usaha masyarakat khususnya usaha kecil yang produktif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selring dengan pelaksanaan perdagangan bebas, dan semakin gencarnya arus globalisasi, penekanan peran industri dan perdagangan lebih diharapkan sebagai salah satu sumber bagi meningkatnya ekspor non migas dan sebagai industri pendukung yang membuat komponen-komponen dan spare part untuk usaha besar lewat keterkaitan produksi, misalnya dalam bentuk subcontracting. Dengan demikian, untuk melaksanakan peran baru ini, sektor industri dan perdagangan (IKM dan UKM) harus berbenah sedini mungkin untuk meningkatkan daya saing secara totalitas. Untuk itu, maka perlulah kiranya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir duduk semeja dengan berbagai stakeholder sebagai upaya mewujudkan eksistensi IKM dan UKM sebagai motor penggerak yang utama demi kokohnya struktur perekonomian daerah Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UKM dan dalam rangka untuk memacu laju produksi lokal dan lapangan kerja baru, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi dan UKM baik kelembagaan maupun terhadap usaha. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan: pelatihan teknis dan magang, bantuan pemodalan bimbingan teknis, temu usaha pemasaran, kerjasama dan kemitraan, peningkatan akses pasar bagi produk koperasi dan UKM.

Usaha-usaha kecil pada lima tahun terakhir (2000-2005) koperasi dan UKM di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perkembangan, hal ini bisa dilihat dari aspek organisasi (jumlah koperasi, anggota, koperasi aktif, koperasi tidak aktif, dan koperasi yang melaksanakan RAT) maupun permodalan (permodalan sendiri, modal luar, volume usaha, SHU jumlah manajer, jumlah karyawan).

Usaha kecil dan mikro di Kabupaten Indragiri Hilir perlu diberdayakan melalui koperasi, hal ini disebabkan sesuai dengan azas koperasi yaitu kebersamaan dan kerjasama melalui koperasi. Para pelaku usaha-usaha kecil dan mikro yang bergerak pada usaha-usaha produksi sebagai produsen kecil, secara bersama-sama dapat menjual produk-produk yang dihasilkan, disamping membeli sarana/input produksi secara bersama-sama pula. Dalam kebersamaan itu akan terjadi penguatan kemampuan bersaing, baik dalam hasil penawaran maupun permintaan.

Jumlah anggota koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan, ekonomi dalam suatu lembaga organisasi yakni koperasi. Dilihat dari perkembangan jumlah koperasi yang juga mengalami peningkatan yang berarti dari sebanyak 420 unit koperasi tahun 2000 meningkat menjadi 524 unit koperasi, namun jumlah tersebut tidak memberikan arti yang

signifikan terhadap kegiatan usaha koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan karena koperasi yang aktif hanya 38,17 persen (artinya : tidak aktif sebanyak 61,83 persen).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan UKM dan dalam rangka untuk memacu laju produksi lokal dan lapangan kerja baru, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi dan UKM baik kelembagaan maupun terhadap usaha. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan; pelatihan teknis dan magang, bantuan permodalan, bimbingan teknis, temu usaha pemasaran, kerjasama dan kemitraan, peningkatan akses pasar bagi produk koperasi dan UKM.

Kebijaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah senantiasa berusaha mewujudkan koperasi dan pengusaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam sistim perekonomian yang berbasis kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Melalui kegiatan meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, meningkatkan akses terhadap pasar dan perluasan pangsa pasar, meningkatkan akses terhadap modal dan memperkuat struktur modal, menciptakan kemitraan yang mantap, iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha koperasi dan pengusaha kecil menengah.

j. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan bagi perekonomian nasional dan juga daerah di dalam memberikan pemasukan devisa serta penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitarnya. Sektor ini perlu diperhatikan untuk dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat baik secara langsung, seperti pekerja pariwisata, maupun tidak secara langsung yang terjadi akibat adanya kegiatan kepariwisataan seperti pedagang, pemberi jasa dan lainnya.

Sebagai kawasan pasang surut, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi wisata alam yang luas, meliputi pantai yang panjang, sungai-sungai yang besar dan parit-parit yang melalui kawasan perkampungan penduduk. Wisata alam yang dapat dikembangkan seperti wisata bahari pantai solop yang bersih dan pasir putihnya yang terhampar luas dan indah, dengan latar belakang hutan mangrove. Wisata perahu dengan mengarungi sungai, selat dan parit-parit yang ada. Kawasan air terjun bukit berbunga, sebagai potensi alam merupakan air terjun yang tersusun tujuh tingkatan dengan ketinggian 30 meter. Wisata perkebunan melalui pendekatan kepada alam dengan terlihat langsung di kawasan perkebunan kelapa dan juga melihat langsung proses pengusahaan tanaman kelapa serta proses pembuatan minyak kelapa.

Potensi wisata alam yang dapat dikembangkan wisata bahari yang menyusuri sungai-sungai dan selat dengan kapal ataupun perahu motor sambil mengamati pemandangan eksotis di tepian pantai, dan juga pantai solop dengan pasir putihnya terhampar indah dilatarbelakangi oleh tanaman mangrove, potensi air terjun Bukit Berbunga yang merupakan air terjun alamiah bersusun tujuh dengan ketinggian 30 meter serta wisata perkebunan (agro-tourism) dengan mengamati dari dekat daur kehidupan pohon kelapa dan proses pembuatan minyak kelapa, sedangkan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan yaitu makam sejarah Syekh Abdurrahman Siddiq di desa Hidayat Kecamatan Kuala indragiri, K.H. Abdurrahman Yacob di desa Kembang Kecamatan Keritang serta potensi kesenian tradisional.

Dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan, sarana dan prasarana yang tersedia antara lain hotel sebanyak 36 buah. Di ibukota kabupaten, hotel yang representative sebanyak 4 (empat) buah, kelas melati 22 (dua puluh dua) buah, kelas sedang di Sei. Guntung ibukota kecamatan Keteman terdapat 4 buah hotel kelas melati, selebihnya berada di ibukota kecamatan Keritang, tanah Merah, Reteih, Gas dan Mandah.

Pengelolaan kawasan wisata yang baik akan memberikan dampak yang positif baik kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata, maupun kepada masyarakat secara umum. Wisata alam (ecotourism) menyediakan keindahan alam untuk dinikmati oleh wisatawan, baik domestik maupun manca Negara. Pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi wisata ala mini, sebagai salah satu sumberdaya yang dapat diberdayakan.

2. Sumberdaya Alam

a. Tanaman pangan dan hortikultura

Kondisi potensi sumberdaya daerah yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bidang tugas adalah:

- 1) kondisi potensi SDA cukup tersedia, yang perlu pemberdayaan, pengembangan peningkatan produktivitas lahan,
- 2) kondisi SDA petugas teknis penyuluhan pertanian perlu peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif sedang SDA petani cukup tersedia dengan usia berkisar 40-50 tahun, maka perlu pengkaderan pemuda pemudi tani, melalui pendidikan/pelatihan.
- 3) Kondisi sumberdaya buatan, dimana setiap tahun kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan prasarana pertanian jumlahnya

terbatas, sedangkan yang ada dilakukan pemeliharaan sebelum masa ekonomi habis.

Potensi yang telah dikembangkan dalam memberikan kontribusi daerah adalah perluasan areal tanam dengan pola intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi (penganekaragaman tanaman dengan kondisi padi, jagung, kedelai, buah-buahan, tanaman obat-obatan, tabulapot dan tabulakar).

Di kebanyakan Negara berkembang seperti Indonesia, bahan pangan dan hortikultura merupakan bagian terbesar dari komponen konsumsi penduduk, fluktuasi harga pangan yang sangat tinggi dapat mengganggu stabilitas kehidupan ekonomi yang tentu saja sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan lumbung padi bagi Provinsi Riau, beras memberikan peran hingga sekitar 45 persen dari total food-intake, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam konsumsi masyarakat. Maksudnya, secara nutrisi, ekonomi, sosial dan budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain tanaman padi, komoditi lain yang diusahakan oleh penduduk Indragiri Hilir adalah jagung mencapai 12.883 hektar dengan produksi mencapai 23.252,68 ton per tahun dengan produktivitas 18,05 kwintal per hektar per tahun. Komoditi lainnya yang juga banyak diusahakan oleh masyarakat adalah ubi kayu seluas 1.151 hektar dengan produksi 11.708,29 ton atau rata-rata perhektar mencapai 101,72 kwintal. Produksi ubi jalar tahun 2004 mencapai 4.261,07 ton dengan luas tanam 490 hektar atau produktivitasnya sebesar 86,96 kwintal per hektar. Luas tanaman talas atau keladi hanya 72 hektar dengan produktivitas perhektar sebesar 83,13 kwintal.

Kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati masyarakat juga banyak dibudidayakan, terutama kedelai mencapai 279 hektar yang menghasilkan 356,51 ton dengan produktivitas rata-rata 12,78 kwintal perhektar pertahun. Luas tanaman kacang tanah 115 hektar dengan produksi 118,12 ton atau produktivitasnya mencapai 10,27 kwintal per hektar. Selain itu ada juga tanaman kacang hijau dengan produksi 112,23 ton.

b. Kehutanan dan Perkebunan

Potensi sumberdaya hutan dan kebun yang terdapat di kabupaten Indragiri Hilir merupakan sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan hingga kini masih terbatas pada hasil hutan kayu, sedangkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan belum termanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar wilayah Indragiri Hilir daratan merupakan lahan potensial untuk pengembangan usaha perkebunan dan kehutanan, hal ini didukung oleh kondisi tanah dan agroklimat yang sesuai.

Pembangunan sub sektor kehutanan dan perkebunan, sebagai bagian dari pembangunan daerah di Indragiri Hilir, harus dapat memberikan mamfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri hilir, menambah devisa Negara dan mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hasil hutan yang selama ini banyak dimanfaatkan masih berupa bahan baku berupa log-log meranti dan ramin yang dibawa keluar dari Indragiri Hilir baik untuk tujuan ekspor maupun pasar dalam negeri. Potensi hutan lainnya berupa kayu bakau sangat banyak terdapat di Indragiri Hilir dipergunakan sendiri oleh

masyarakatnya sebagai pondasi bangunan. Jumlah produksi kayu bulat dan kayu olahan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut.

Didalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (PERDA nomor 10 tahun 1994) tercatat bahwa potensi sumberdaya kehutanan seluas 323.026 Ha sedangkan sisanya 837.571 Ha merupakan arahan pengembangan kawasan budidaya untuk perkebunan, transmigrasi, pertambangan, tanaman pangan dan areal penggunaan lainnya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arahan pengembangan kawasan kehutanan (APKH) = 37.456,03 Ha yang merupakan hutan produksi terbatas.
2. Arahan pengembangan kawasan kehutanan (APKH) = 189.093,87 Ha yang merupakan hutan produksi tetap.
3. Kawasan lindung gambut = 69.548,00 ha.
4. Kawasan nasional Bukit Tiga Puluh = 26.928,00 Ha.
5. Arahan pengembangan kawasan budidaya (APKB) = 837.571,00 Ha perkebunan, transmigrasi, pertambangan tanaman pangan dan areal penggunaan lain.

Berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), luas hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 252.860 Ha yang tersebar di 7 Kecamatan yang berada disepanjang pantai dan DAS, yakni Kecamatan Kuala Indragiri seluas 48.661,02 Ha, Mandah seluas 24.640,26 ha, Gaung Anak Serka seluas 15.719,45 Ha, Tanah Merah seluas 16.674,81 Ha, Reteh seluas 15.012,94 Ha, Kateman seluas 9.808,95 Ha, dan Kecamatan Ekok seluas 3.453,57 Ha.

Sementara secara topografi, sungai-sungai, anak-anak sungai dan soak-soak yang berperan penting dalam terjadinya proses regenerasi alami hutan bakau di kawasan ini, khususnya daerah Kecamatan Mandah. Alam yang strategis itu, berdampak positif terhadap pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Sedangkan

luas kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah di tata batas adalah 395.634,94 Ha.

Berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), luas hutan bakau (mangrove) di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 252.860 Ha yang tersebar di 7 Kecamatan yang berada disepanjang pantai dan DAS, yakni :

- Kecamatan Kuala Indragiri : 48.661,02 Ha
- Kecamatan Mandah : 24.640,26 Ha
- Kecamatan Gaung Anak Serka : 15.719,45 Ha
- Kecamatan Tanah merah : 16.674,81 Ha
- Kecamatan Reteh : 15.012,94 Ha
- Kecamatan Kateman : 9.808,95 Ha
- Kecamatan Enok : 3.453,57 Ha

Sementara secara topografi, daratan hutan bakau di kawasan ini tergolong datar yang secara geografis menurut "pakar mangrove" Prof. Ogino (Ehime University) memiliki geografis yang sangat bagus dibandingkan daerah lainnya di Kawasan Asia, karena memiliki banyak sungai-sungai, anak-anak sungai dan soak-soak yang berperan penting dalam terjadinya proses regenerasi alami hutan bakau di kawasan ini, khususnya daerah Kecamatan mandah. Alam yang strategis itu, berdampak positif terhadap pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Sedangkan luas kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah ditata batas adalah 395.634,94 Ha.

Pelaksanaan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh perusahaan swasta, koperasi maupun masyarakat (baik perorangan maupun kelompok). Luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 mencapai 379.750 Ha dan merupakan tanaman perkebunan yang paling besar

diusahakan oleh masyarakat, dengan jumlah petani mencapai 97.318 orang dan hasil produksi 362.443 ton atau 9,54 kwintal per hektar. Tanaman kelapa hibrida diusahakan oleh 20.102 orang petani dengan luas mencapai 67.232 hektar dan produksinya mencapai 116.522 ton.

Kedua jenis tanaman diatas banyak diusahakan masyarakat, namun tanaman kelapa hibrida mengalami pengurangan jumlah luas lahan yang ada dibandingkan tahun 2002 dengan penurunan sekitar 15,91 % dibandingkan dengan tahun 2000, sedangkan kelapa meningkat sekitar 4,84 % pada priode yang sama.

Produksi kelapa sawit meningkat dari 114.098 ton ditahun 2000 menjadi 487.797 ton tahun 2004 atau meningkat sekitar 327,52 % pada priode itu. Luas tanaman yang ada juga mengalami peningkatan dari 48.435 hektar menjadi 79.353 hektar atau meningkat sekitar 63,83 % pada priode tersebut. Kelapa sawit memiliki produktifitas tertinggi yang mencapai 61,46 kwintal per hektar per tahun yang diusahakan oleh 8.326 orang petani.

Sebaliknya tanaman karet terus mengalami penurunan sekitar 48,18% dari 5.311 hektar ditahun 2000 menjadi 2.752 hektar tahun 2004. produksi karet di Indragiri Hilir juga turun tajam dari 2.497 ton atau menurun sekitar 57,19%. Penurunan produksi ini selain disebabkan oleh berkurangnya luas tanaman juga diakibatkan oleh produktivitas yang sangat rendah hanya 3,88 kwintal per hektar per tahun. Pengurangan jumlah luas lahan karet, selain akibat rendahnya produksi, juga tidak terlepas dari konversi tanaman ke kelapa sawit.

Produksi pinang mengalami peningkatan dari 1.792 ton menjadi 4.932 ton atau meningkat sekitar 175% dengan luas lahan yang juga meningkat sekitar 161,64% dari 2.070 hektar menjadi 5.416 hektar. Luas tanaman kopi meningkat dari 3.067 hektar menjadi 4.015 hektar dengan peningkatan produksi dari 363 ton menjadi

979 ton atau meningkat sekitar 169,39%. Jenis tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kakao, yang mengalami peningkatan luas lahan sekitar 6,33% dari 1.368 hektar di tahun 2000 menjadi 1.454 hektar di tahun 2004. peningkatan drastis justru terjadi di dalam produksi kakao, dari 58 ton menjadi 214 ton per tahun atau naik 271,66 persen yang diakibatkan naiknya produktivitas akibat tanaman yang diusahakan beberapa tahun lalu mulai berproduksi.

Tanaman lain yang banyak diusahakan masyarakat adalah sagu dengan luas tanaman mencapai 6.164 hektar yang diusahakan oleh 2.376 orang petani, dengan hasil produksi 10.048 ton. Tanaman lainnya antara lain adalah mengkudu (500 Hektar), nilam (509 hektar), antan (107 hektar) dan lada (13 hektar).

c. Perikanan dan Kelautan

potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari :

- Sumber daya perikanan, adalah berupa yang berasal dari penangkapan di laut dan perairan umum yang tingkat pemanfaatannya telah mencapai lebih dari 96,91% dari potensi yang ada. Sedangkan untuk budidaya, potensi yang dikembangkan masih relatif sedikit.
- Estuaria, banyak kelimpahan jenis ikan yang terdapat di wilayah estuaria, sedangkan populasi per jenis ikan sedikit, hanya yang bisa beradaptasi yang terdapat berkembang hidup di wilayah estuaria.
- Hutan mangrove, luas hutan di Kabupaten Indragiri Hilir 115.821 Ha.
- Ekosistem pantai, ekosistem pantai di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan ekosistem pantai bedumpur.
- Ekosistem pulau-pulau kecil, terdapat 23 pulau-pulau kecil di Kabupaten Indragiri Hilir.

Table 2.8. Luas Area Tangkap dan Jumlah Hasil Tangkapan Ikan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004

No	Aspek sumberdaya	Sumber (Ton)	Potensi	Pemanfaatan (Ton)	Pemanfaatan (%)
1.	Sumberdaya penangkapan				
	- Perairan Laut	60.674	36.404	35.277,70	96,91
	- Perairan Umum	4.334	2.600	2.536,65	97,56
2.	Budidaya Perikanan				
	- Budidaya air tawar (Ha)		1.567	121,69	7,34
	- Kolam (unit)		1.500	21,00	0,60
	- Keramba (Ha)		17.000	4,00	0,02
	- Mina tani (Ha)		31.600	2.395,50	4,42
	- Budidaya air payau (tambak)		20.000		
	- Budidaya laut (kejapung)		-		
	- Budidaya pantai (kerang)		2.500		

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir, 2005

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di pantai timur Sumatera menyebabkan Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 kilometer dan luas perairan laut meliputi 6.318 kilometer persegi. Berdasarkan data tahun 2000, potensi bidang perikanan lainnya meliputi perairan umum 2.600 ton per tahun, serta budidaya tambak yang dikembangkan seluas 13.000 hektar dengan potensi produksi 333 ton per tahun. Sayangnya potensi perairan yang cukup besar ini belum dikembangkan secara optimal.

Sumberdaya nelayan/pembudidayaan ikan, tersedianya sumberdaya nelayan dan pembudidayaan ikan yang terdiri dari:

- Nelayan perairan laut 2.746 RTP
- Nelayan perairan umum 4.282 RTP
- Pembudidaya ikan dalam kolam 644 RTP
- Pembudidaya ikan/udang dalam tambak 485 rtp
- Pembudidaya ikan dalam keramba 21 RTP

Pemanfaatan dan pengembangan potensi untuk memacu laju produksi dan penciptaan lapangan kerja baru :

- pengembangan kegiatan budidaya perikanan (khususnya tambak dan mina padi) dalam rangka peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja.
- Pengembangan dan peningkatan pengolahan hasil perikanan.
- Pengembangan pengolahan/pabrik pakan ikan.

Pemanfaatan dan pengembangan potensi dalam menyumbang kontribusi kepada daerah :

- Pengembangan pola TIR pada usaha budidaya air payau (tambak)
- Mengarahkan usaha penangkapan ikan pada perairan lepas pantai dengan peningkatan armada perikanan.
- Penerbitan izin usaha perikanan.
- Meningkatkan dan menumbuh kembangkan skala usaha budidaya perikanan.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat beberapa issue strategis sebagai landasan dalam penyusunan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- Degradasi kawasan mangrove.
- Menurunnya produktivitas nelayan dalam operasi penangkapan ikan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian sumberdaya ikan.
- Kurangnya diversifikasi usaha masyarakat pesisir.
- Belum optimalnya PAD dari usaha kelautan dan perikanan.

d. Peternakan

Perkembangan sektor peternakan secara umum dapat dikatakan baik. Namun ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun 2000 ke tahun 2004, seperti ternak babi yang menurun drastis 22,50% dari 220 ekor di tahun 2000 menjadi hanya sekitar 10% nya saja. Jumlah ternak kambing juga menurun sekitar 9,17% dari 28.275 ekor di tahun 2000 menjadi 17.900 ekor tahun 2004. Penurunan jumlah ternak kambing ini diakibatkan oleh semakin banyaknya permintaan ternak oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir untuk keperluan bahan pangan harian maupun untuk hari-hari tertentu, misalnya Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri dan lainnya. Perkembangan jumlah ternak dan unggas di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut.

Pasokan daging untuk kebutuhan masyarakat masih didukung oleh produksi ternak dari daerah sekitar kabupaten dan juga dari daging impor. Daging sapi sebagai sumber protein masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh para peternak yang ada di daerah ini karena jumlah ternak yang ada tidak mencukupi. Selain itu telah terjadi penurunan sekitar 9,09% dari 9.432 ekor di tahun 2000 menjadi 6.001 ekor di tahun 2004.

Selain babi, kambing dan sapi, ternak unggas masyarakat seperti ayam bukan ras juga sedikit mengalami penurunan jumlah. Di tahun 2000 jumlah ayam buras yang dipelihara masyarakat Indragiri Hilir mencapai 623.853 ekor dan turun sekitar 1,69% di tahun 2004 menjadi 581.679 ekor. Sebaliknya peternakan ayam ras tumbuh relatif cepat pada periode 2000-2004 dari hanya 11.130 ekor menjadi 25.757 ekor di tahun 2004. peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan protein hewani. Peternakan-peternakan skala kecil banyak dikelola oleh masyarakat juga mengalami peningkatan sekitar 18,10% dari 35.847 ekor menjadi 61.798 ekor di tahun 2004. ternak domba juga mengalami sedikit peningkatan dari 459 ekor menjadi 464 ekor atau tumbuh rata-rata sekitar 0,27 per tahunnya.

e. Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki cadangan batubara sebesar 79 juta ton. Bahan galian/mineral yang ada dan sebagian sudah dimanfaatkan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bahan galian C, yaitu pasir timbun (pasir urug), pasir cor (pasir bangunan), pasir kuarsa, batu granit, batu krikil, tanah liat dan tanah gambut. Umumnya bahan galian C tersebut hanya ada di beberapa daerah seperti Keritang, Reteh, Kuindra, Tempuling, Tembilahan, Enok, Keteman dan mandah dan penambangannya bersifat individu. Cara menambang seperti ini sulit dimonitor oleh pemerintah kabupaten, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan semakin memperbanyak jumlah lahan kritis yang ada.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah gambut yang mempunyai luas areal $\pm$ 928.477,6 hektar, dimana sebagian telah dimanfaatkan untuk pengembangan lahan perkebunan dan tanah gambut juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber

energi dan media tumbuh. Di desa Pekan Tua Kecamatan Tempuling terdapat pusat riset gambut tropika (PURIGATRO) dengan luas areal 10 hektar.

Bahan galian lain yang mempunyai potensi yang cukup besar adalah tanah gambut. Selain bisa digunakan sebagai pupuk, gambut juga berpotensi digunakan sebagai alternatif sumber energi dan komoditas ekspor. Sayangnya pada saat ini tanah tersebut masih belum ekonomis untuk dikembangkan.

2.1.4. Sosial Budaya

1. Pendidikan

Ruang lingkup pendidikan tidak hanya dipandang dari segi mutu, tetapi dilihat juga dari jangkauan pendidikan yang diprogram agar semua lapisan dapat mengikutsertakan anak-anak usia sekolah. Dengan kata lain, program pendidikan yang dilakukan sebaiknya dapat menjangkau semua anak usia sekolah agar dapat mengikuti program wajib belajar sembilan tahun sehingga semua anak dapat mengenyam pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Presentase terbesar pendidikan kepala rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004 adalah sampai dengan tamat Sekolah Dasar (65,90%). Bahkan sekitar 30,17% lainnya masih butu hurup. Hal ini menunjukkan masih rendah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten ini. Kepala rumah tangga dengan pendidikan SLTP hanya sekitar 3,82%, sedangkan yang mampu menamatkan pendidikannya hingga SLTA dan yang lebih tinggi hanya sekitar 0,11%.

Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya masih relatif rendah, hal ini dapat terlihat dari komposisi tingkat pendidikan masyarakat sekitar 85% berpendidikan tingkat Sekolah Dasar ke bawah, sementara yang memiliki pendidikan SMP, SMA/SMK dan perguruan Tinggi belum memadai bila dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan pembangunan yang terserap serta peluang kerja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Angka partisipasi kasar (APK) bagi murid-murid SD dan MI adalah 100,76%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah 89,91%. Angka partisipasi ini tergolong tinggi karena angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak usia 7-12 tahun di Indragiri Hilir telah mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Dan segi perbedaan jender, yaitu laki-laki dan perempuan, angka partisipasi kasar (APK) kedua jenis ini terdapat perbedaan sedikit, yaitu 113,32% untuk murid laki-laki dan 89,94 % untuk murid perempuan. Angka ini memiliki arti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki.

Kualifikasi guru SD dirinci sebagai berikut; 46 orang (1,53%) berpendidikan SMA non keguruan, 2.024 orang (67,11%) berpendidikan SMK kejuruan, 6 orang (0,20%) berpendidikan D1, 867 orang (28,75%) berpendidikan D2, 18 orang (0,60%) pendidikan D3, dan 55 orang (1,82%) berpendidikan S1. jika dikategorikan atas kelayakan mereka menjadi guru, dapat pula ditentukan bahwa 1,53% tidak layak, 67,31% semilayak dan 31,17% layak, sedangkan untuk guru MI dikategorikan sebagai berikut; tidak layak 89,61%, semilayak 4,42%, dan layak 5,95% (Kandepdiknas Indragiri Hilir, 2000).

Pada jenjang SMP dan MTs, angka partisipasi kasar (APK) adalah 71,19%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah 65,52%. Angka-angka partisipasi ini tergolong sedang karena keadaan ini menunjukkan bahwa hampir separuh anak-

anak usia 13-15 tahun belum mengikuti pendidikan di SMP dan atau MTs. Dari segi perbedaan jender, APK untuk siswa laki-laki adalah 71,87% dan untuk siswa perempuan adalah 70,56%. Dengan demikian, kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan perempuan di Indragiri Hilir dapat dikatakan sama.

Rasio guru dan murid adalah 1 : 26, sedangkan rasio kelas dan murid adalah 1:32. kedua rasio ini masih dapat dikatakan ideal karena satu orang guru menangani 26 siswa, dan satu kelas menampung 32 murid. Tingkat kelayakan guru di SMP dan MTs dapat dikategorikan sebagai berikut; tidak layak 27,23%, semi layak 20,19%, dan layak 2,58%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat kelayakan guru SD dan MI.

Pada jenjang SMA, angka partisipasi kasar adalah 27,82%, sedangkan angka partisipasi murni adalah 25,29%. Kedua angka partisipasi ini tergolong rendah. Hal ini mungkin disebabkan anak-anak usia 16-18 tahun tidak dapat melanjutkan studinya karena harus membantu orang tua mencari nafkah.

Guru-guru yang mengajar di SMA memiliki tingkat kelayakan sebagai berikut; tidak layak 17,24%, semilayak 22,175, dan layak 60,59%. Di MA, tingkat kelayakan guru adalah tidak layak 29,69%, semilayak 32,03% dan layak 38,28%. Di SMK, guru yang tidak layak 27,78% semilayak 72,22% dan layak 0%.

Perubahan-perubahan terus diupayakan agar mutu pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat lebih baik hal ini terlihat dari peningkatan jumlah guru, gedung sekolah maupun jumlah murid baik negeri maupun swasta menunjukkan peningkatan. Data tahun 2003 menunjukkan jenjang pendidikan yang ada di

Kabupaten Indragiri Hilir seperti pendidikan pra sekolah negeri 1 dan swasta 11 dan perguruan tinggi swasta yang ada berjumlah 3 buah. Dan jumlah murid terus meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pra sekolah Negeri 38 dan swasta 1.403, SD Negeri 78,352 dan swasta 487, SMP Negeri 12,143 dan swasta 2,189, SMK Negeri 7,139 dan swasta 660 dan PTS dengan jumlah mahasiswa 1.200 orang.

Dan data di atas nampak mencerminkan tingkat pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir perlu pembinaan yang lebih serius. Sedangkan pada tahun 2002 terdapat peningkatan yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan peserta didik rata-rata lulus untuk SD pengikut 10,199 lulus 10,199, SLTP lulus pengikut 3,667 lulus 3,667, SMA pengikut 1,649 lulus 1,64 dan SMK pengikut 342 lulus 342 rata-rata semua lulus. Sedangkan pada tahun 2003 mengalami permasalahan hal ini ditandai adanya peserta didik yang gagal mengikuti UAN ini terlihat dari peserta tingkat SD pengikut 10.444 siswa lulus 10,338 siswa dan tidak lulus 106 siswa, SLTP pengikut 3,572 siswa lulus 3,515 siswa dan tidak lulus 57 siswa dan SMA pengikut 1,868 siswa lulus 1,853 siswa dan tidak lulus 14 siswa. Gejala ini apabila tidak mendapatkan perhatian dan pemerintah daerah akan lebih memperburuk tingkat pendidikan maupun sumberdaya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

Table 2.9. Jumlah Siswa dan Guru SD, SLTP dan SLTA tahun 2000-2004 (orang)

Uraian	2000	2001	2002	2003	2004
Murid SD sederajat	78.416	76.698	81.100	81.451	82.931
Siswa SLTP sederajat	13.150	15.356	17.325	19.660	23.716
Siswa SLTA sederajat	9.677	10.044	10.211	10.998	11.956
Guru SD sederajat	3.016	3.188	3.379	3.541	3.686
Guru SLTP sederajat	398	466	529	603	739
Guru SLTA sederajat	381	405	405	468	512

Sumber : Dinas Pendidikan, Kantor Statistik, dan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir, berbagai tahun terbitan.

2. Kesehatan

a. Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Berbagai tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan, dilakukan analisis terhadap indikator yang dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai terhadap kegiatan pelayanan upaya kesehatan, pengendalian sistem informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung sistem manajemen kesehatan. Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal diselenggarakan berbagai upaya kesehatan melalui pendekatan pemeliharaan, meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan. Untuk itu telah digariskan bahwa salah satu kebijaksanaan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup dan usia harapan hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mengurangi angka kesakitan maupun tahu akan pentingnya harapan hidup.

Data menunjukan pola penyakit penyebab menular secara spesifik terjadi lonjakan pada tahun 2004, pada beberapa jenis penyakit menular antara lain penyakit malaria penderita klinis berjumlah 1.860 orang yang terkena dengan katagori positif 79 orang, TB paru dengan penderita klinis 48 orang yang terkena dengan katagori positif 22 orang maupun demam berdarah dengan penderita klinis berjumlah 14 orang yang terkena dengan katagori positif 108 orang.

Sedangkan untuk jumlah persalinan bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan tercatat sebanyak 9.721 orang, hal ini berarti baru 55,47% dari perkiraan yang seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan, hal ini masih kurang bila dilihat dari target nasional sebesar 80%. Untuk jumlah kelahiran berdasarkan data tahun 2004 sebanyak 11.386 dengan jumlah lahir mati sebanyak 111 orang dan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 40 orang, dan untuk ibu hamil sebanyak 16.729 orang dengan kematian ibu hamil sebanyak 3 orang, kematian ibu bersalin 17 orang serta kematian ibu nifas sebanyak 2 orang.

Cakupan pertolongan bersalin diseluruh kecamatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus sedapat mungkin diupayakan dengan maksimal agar keberadaan anak dan ibu dapat diselamatkan. Usaha pelayanan kesehatan yang selama ini dilakukan belum dapat dikatakan semaksimal mungkin, karena masih tingginya jumlah lahir mati, sisi lain yang perlu terus diperhatikan adalah status gizi bayi, balita maupun ibu hamil yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan

dengan baik hal ini disebabkan kurangnya dana yang tersedia maupun kesehatan lingkungan masyarakat yang perlu terus dipelihara status sehatnya.

b. Kelembagaan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal diselenggarakan berbagai upaya pendekatan pemeliharaan, meningkatkan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan yang dilaksanakan menyeluruh terpadu maupun berkesinambungan.

Oleh sebab itu maka diperlukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana, tenaga medis, kebidanan, perawat, maupun fasilitas penunjang/armada kesehatan guna memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dan menyentuh sampai ke desa-desa serta terjangkau oleh masyarakat. Keberadaan rumah Sakit Umum Daerah Tipe C benar-benar menggambarkan keberadaan yang sangat diperlukan Sekolah Perawat kesehatan, Akademi Perawat/Bidan, serta puskesmas keliling darat (ambulance) dan air maupun mesin pembasmi penyakit malaria minimal di tiap kecamatan mempunyai 1 unit.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan terdiri dari 1 unit rumah sakit umum daerah, 8 unit puskesmas perawatan, 15 unit puskesmas non rawat inap, 108 unit puskesmas pembantu (PUSTU), dan 2 unit klinik bersalin/klinik swasta. Ratio PUSTU/Puskesmas adalah 6,67%, dan puskesmas dengan penduduk 35,7 per 1.000 penduduk.

Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat membantu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Adapun usaha kesehatan yang bersumber dari masyarakat seperti pos-yandu, dana sehat, Polindes, Toga, Kelompok UKK dan poskestren maupun kader kesehatan yang tersebar di setiap desa/kelurahan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dengan jumlah berdasarkan kualifikasi pendidikan dan unit kerja adalah Dokter ahli 5 orang, Dokter umum 36 orang, Dokter gigi 5 orang Apoteker 2 orang, sarjana Kesehatan 4 orang, Paramedis perawatan 127 orang, para medis pembantu 23 orang dan tenaga non medis 91 orang dan Akper/Akbid sejenisnya 43 orang. Untuk lingkungan fisik berupa sanitasi perumahan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 123.041 rumah sedangkan yang memenuhi syarat kesehatan 52.697 rumah (42,8%).

Agar permasalahan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir tidak bertambah, maka perlu segera mungkin membenahi sistim manajemen pelayanan kesehatan masyarakat, untuk itu perlu adanya klasifikasi spesifik terhadap penyelesaian masalah kesehatan masyarakat.

3. Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagaimana mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta penyediaan mekanisme penanganan masalah kesejahteraan sosial yang mantap dan pembinaan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Sebagai sasaran yang akan dicapai perlu adanya peningkatan potensi dan kesejahteraan sosial masyarakat mutu pelayanan dan penyediaan perlindungan dan peningkatan

kesejahteraan penduduk rentan, seperti anak jalanan dan terlantar, penduduk yang terpaksa berpindah, penduduk lanjut usia, dan masyarakat terasing.

Terjadinya perubahan prioritas sasaran pembangunan adalah semata-mata untuk lebih menekankan azas pemerataan. Hal ini didasari oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk akibat dari kebijakan yang ada. Peningkatan kesejahteraan sosial maupun pemberangkatan maupun pemulangan dengan baik dan benar.

Dengan demikian tantangan kehidupan keagamaan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana menjamin dan menciptakan suasana iklim yang kondusif untuk pelaksanaan ajaran agama bagi setiap penganutnya serta bagaimana menjaga kelestarian kerukunan hidup sesama pemeluk agama dan antar umat beragama sehingga penganut masing-masing agama akan merasa aman dalam menjalankan peribadatan.

5. Pemuda dan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan pemuda diselenggarakan sebagai upaya pembentukan sumberdaya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan yang memiliki mental, tekad, orang, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.

Kepeloporan dan keprintisan pemuda sebagai pelopor penggerak pembangunan yang didorong dengan menempatkan sarjana sebagai pelopor dan penggerak pembangunan pedesaan (SP3), dan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST).

Pembinaan pemuda sebagai kader dan motivator pembangunan yang berasal dari kalangan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna, Pramuka, dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Mahasiswa, Organisasi Profesi, dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Kaderisasi pemuda dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara telah diwujudkan dengan semakin meningkatnya kesadaran, dan berkembangnya sikap kritis dari kalangan pemuda dalam kehidupan politik. Keterampilan pemuda ditingkatkan melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja serta melalui sistem magang pada berbagai perusahaan, dan pengembangan kewiraswastaan di kalangan pemuda dan golongan ekonomi lemah. Melalui pembinaan tersebut telah berhasil dikembangkan keterampilan kerja, kreativitas, keahlian dan orang kewirausahaan sehingga mampu meraih peluang dan berperan secara produktif dalam pembangunan.

Sisi lain dari keberhasilan yang telah dimiliki oleh pemuda tentunya perlu dikembangkan wacana-wacana baru sehingga pemuda akan lebih memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan. Selain itu juga perlu dikembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda sehingga mereka dapat berbuat/melakukan kegiatan yang sifatnya baik untuk dirinya maupun masyarakat. Maraknya permasalahan yang selama ini banyak dilakukan oleh pemuda tentunya tidak luput dan perhatian pemerintah daerah, dimana tempat-tempat kegiatan seperti olah raga, Pramuka, sanggar/wadah untuk berorganisasi maupun Balai Kegiatan telah berubah fungsi ataupun hilang. Kurangnya perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap pusat kegiatan tersebut menyebabkan pemuda berpindah ke arah yang mestinya tidak dilakukan seperti penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, zat aditif dan yang pada akhirnya melakukan tindakan kriminalitas. Jika kita kaji kesalahan tidak sepenuhnya di jatuhkan kepada pemuda, dimana tempat-tempat dulunya sering diisi dengan kegiatan olahraga, seni/tari,

dan tempat yang sifatnya memacu sportifitas dan kreatifitas sulit dijumpai baik di kabupaten, kecamatan maupun desa-desa.

Pembangunan olahraga ikut berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Melalui olahraga yang dijadikan sebagai kebiasaan dan pola hidup akan terbentuk manusia dengan jasmani atau raga yang sehat dan bugar sehingga akan meningkatkan produktivitas di seluruh pelosok Kabupaten Indragiri Hilir. Pengembangan sumberdaya manusia melalui olah-raga diharapkan mampu menciptakan manusia produktif, memiliki semangat dan daya juang serta daya saing yang tinggi.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkain aktifitas jasmani, bermain dan berolahraga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat pula menghasilkan prestasi Akademik yang tinggi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai salah satu kebutuhan hidup dan bagi kesehatan semakin tinggi. Yang tercermin dalam kegiatan olahraga massal.

Dalam rangka olahraga prestasi di arena regional dan nasional, atlit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai turnamen cabang olahraga maupun dalam beberapa pekan olahraga Daerah (PORDA), pekan olahraga wilayah (PORWIL) dan pekan olahraga nasional (PON) telah menunjukan prestasi yang cukup mengembirakan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peranan kabupaten sebagai pusat pemerintah, pusat pendidikan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

2.1.5. Sarana dan Prasarana

Pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai administrasi daerah, pengurusan asset-aset daerah seperti memperbaiki jalan, memelihara gedung pemerintah dan sebagainya dan membiayai fasilitas sosial untuk keperluan masyarakat. Sedangkan pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal yang akan digunakan oleh masyarakat seperti jalan-jalan, sarana komunikasi, pelabuhan dan sebagainya.

Pengaruh nyata dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah dikarenakan akan memperbesar jumlah prasarana yang tersedia dan sebagai akibat daerah akan menjadi lebih menarik sebagai tempat untuk mengadakan penanaman modal. Sarana umum yang penting artinya bagi pengembangan industri seperti penyediaan tenaga air dan listrik, jaringan pengangkutan dan fasilitas pelabuhan akan menjadi bertambah baik keadaannya.

Pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas menyebabkan perusahaan industri dengan mudah memperoleh air dan listrik yang diperlukannya, memperoleh dan mengangkut bahan mentahnya dan menjual hasil produksinya ke berbagai pasar di dalam maupun luar daerah. Dengan demikian keberadaan sarana dan prasarana yang baik akan membantu mempertinggi efisiensi kegiatan pembangunan.

1. Transportasi dan Telekomunikasi

Infrastruktur fisik daerah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tergolong masih sangat rendah, khususnya untuk angkutan darat dan air (sungai/laut) listrik,

telekomunikasi, pelabuhan air, bersih dan sanitasi. Kendala ini juga yang menyebabkan potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat dikembangkan secara optimal.

Sebagai wilayah yang terkenal dengan seribu parit dan pembangunan infrastruktur belum merata pada seluruh wilayah di daerah ini, menyebabkan beberapa wilayah di daerah ini masih terisolir. Mengingat bahwa kondisi lahan di Kabupaten Indragiri Hilir hampir seluruhnya merupakan lahan gambut yang cukup dalam dan bersifat labil, jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Di sisi lain pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur, padahal pembangunan berbagai infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu solusi sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, dimana saat ini menduduki peringkat pertama dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.

Prasarana transportasi utama yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya adalah jalan. Tahun 2000 sekitar 72,87% jalan yang ada hanya berupa jalan tanah, dan di tahun 2004 telah berkurang menjadi sekitar 38,94%. Pengerasan permukaan jalan yang dilakukan selama periode tersebut telah meningkatkan jalan dengan permukaan kerikil menjadi 29,67%, dari total panjang jalan yang di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 1.243,57 Km meningkat sekitar 5,35% dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya 1.024,48 km. jalan dengan jenis permukaan aspal mengalami peningkatan sekitar 14,35% dari 247,97 Km menjadi 390,33 Km.

Kondisi jalan dengan keadaan rusak berat sepanjang 520 Km atau sekitar 41,82% dari total panjang jalan. Kondisi jalan yang baik meningkat sekitar 16,435 dari

hanya 175 Km menjadi 290 Km. panjang jalan yang rusak juga menurun dari 621,48 Km di tahun 2004 menjadi hanya 258,57 Km tahun 2004.

Realisasi pembangunan sarana perhubungan jalan di daerah seribu parit ini sampai dengan tahun 2003 mencapai 1.696,07 Km, yang terdiri dari jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten. Dimana panjang jalan Negara yang berupa aspal sepanjang 90 Km, kerikil 18,50, Km dan tanah sepanjang 30 km. panjang jalan provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir yang berupa aspal mencapai 157 Km, kerikil 86 Km, tanah 39 km dan tidak dirinci 32 Km, sedangkan untuk jalan kabupaten yang beraspal sepanjang 390,33 Km, kerikil 368,94, dan tanah sepanjang 484,30 km.

Sebagaimana kita ketahui bersama kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya adalah daerah gambut dan berawa yang dilintasi oleh beberapa sungai besar dan kecil, sehingga dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan menghubungkan antar wilayah, keberadaan jembatan memegang peranan yang sangat penting. Sampai dengan tahun 2003 telah dibangun sebanyak 72 buah jembatan besi dengan panjang seluruhnya sekitar 4.742 m, 303 buah jembatan beton dengan panjang 6.015 m, 46 buah jembatan semi permanen 5.437 m. dengan telah dibangunnya jembatan dan jumlahnya terus meningkat, hal ini akan semakin memperpendek dan mempercepat jarak tempuh serta akan membuka kantong-kantong daerah yang produktif sehingga akan mengefisienkan waktu dan biaya. *Multiplier effect* lain adalah semakin mudahnya biaya transportasi dan meningkatnya daya saing produk daerah.

Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini jika dibandingkan dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu sudah menunjukkan kemajuan, dimana

hampir semua daerah di daerah ini telah memiliki sarana dan prasarana perhubungan, walaupun kondisi dan jumlah masih terbatas. Sebagai kabupaten yang berada di wilayah pesisir Sumatera keberadaan sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut merupakan alat angkut yang dominan digunakan masyarakat daerah ini. Pada saat ini pelabuhan utama yang digunakan untuk bongkar muat barang dan jasa baik antar pulau maupun ekspor adalah pelabuhan Tembilahan. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Kuala Enok dan Sei. Guntung sebagai daerah industri, maka telah dibangun pelabuhan samudera di Kuala Enok yang sampai saat sekarang masih belum fungsional oleh karena infrastruktur penunjang belum memadai.

Tabel 2.10. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2000-2004

Jenis Permukaan	Panjang (Km)		Distribusi (%)		Pertumbuhan (%)
	2000	2004	2000	2004	
Baik	175,00	290,00	17,08	23,32	16,43
Sedang	228,00	275,00	22,26	22,11	5,15
Rusak	621,48	258,57	60,66	12,75	-18,62
Rusak berat	-	520,00	-	41,48	
Jumlah	1.024,48	1.243,57	100,00	100,00	5,35

Sumber : Olahan Data BPS, 2005

Sarana transportasi darat yang paling banyak di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sepeda motor yang mencapai jumlah 12.288 unit meningkat 11,63% dibandingkan tahun 2000. Perkembangan paling pesat adalah jumlah truk yang meningkat sekitar 17,11% dari 19 unit di tahun 2000 menjadi 32 unit 2004. Jumlah mobil penumpang, pick up dan mini bus juga mengalami peningkatan dua hingga lima persen pada periode tersebut.

Dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir hal tersebut akan mendorong tumbuhnya pusat – pusat kegiatan

ekonomi dan daerah pertumbuhan baru di daerah ini yang dapat membuka peluang kerja dan peluang berusaha bagi masyarakatnya, terutama dengan dibangunnya Pelabuhan Samudera akan semakin mempermudah arus lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Indragiri Hilir. Posisinya yang berada pada bagian selatan dan merupakan pintu gerbang Provinsi Riau tentunya hal ini akan semakin mendorong daerah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Riau Bagian Selatan.

Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perkembangan yang cukup berarti, di samping telepon kabel, juga telah berkembang sistem komunikasi nirkabel yang mampu menjangkau seluruh kecamatan. Untuk di beberapa daerah yang mengalami perkembangan pesat dan sekitarnya seperti Tembilahan, Sei. Guntung, Kuala Enok, Sei. Salak dan sekitarnya telah pula berkembang sistem telekomunikasi seluler yang diselenggarakan sejumlah perusahaan provider jasa seluler ini. Sedangkan khusus untuk pelayanan internet baru mampu di Tembilahan.

2. Pemukiman, Air Bersih, dan Tenaga Listrik

Pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk sarana dan prasarannya, harus dapat mendorong kegiatan pembangunan yang lain dengan memperhatikan prinsip swadaya dan gotong royong yang juga dapat mendorong pembangunan di sektor lain.

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping kebutuhan dasar yang lain, seperti sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus menjangkau masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, dengan senantiasa memperhatikan tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan

lingkungan sosial lainnya. Disamping itu pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk sarana dan prasarana, harus dapat mendorong kegiatan pembangunan yang lain dengan memperhatikan prinsip swadaya dan gotong royong yang juga dapat mendorong pembangunan di sektor lain.

Dan aspek pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat dan aman, belum sepenuhnya didukung oleh pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih.

Sumber energi listrik diperkotaan, dilakukan melalui penambahan jaringan serta mesin pembangkit, dan pengembangan listrik pedesaan. Unit pembangkit yang tersedia sebanyak 41 buah dengan daya terpasang mencapai 13.080 KW. Keberadaan unit-unit tersebut mencakup kota Tembilahan, Teluk Pinang, Sei Guntung, Sapat, Mandah, Sei. Piring, Igal, Concong Luar, Tanjung Lajau, Perigi Raja, Kuala Lahang, Simpang Gaung, Bekawan, Seberang Tembilahan, Pulau Burung, Bagan Jaya, Belanta Raya, Rotan Semelur dan Lahang Baru, dengan kemampuan produksi seluruhnya mencapai 37.150.442 KW.

Kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir yang berupa sungai dan parit-parit menyulitkan masyarakat untuk memperoleh air bersih untuk keperluan rumah tangga. Air sebagai sumber kehidupan sangat diperlukan masyarakat, dengan berbagai sumber. Masyarakat sekitar memanfaatkan air sungai sebagai sumber air, dan bagi mereka yang berada di daerah lainnya dapat menggunakan sumur, keperluan air untuk masyarakat perkotaan seperti Tembilahan sebagian dipenuhi kebutuhannya oleh perusahaan air minum yang ada.

Aspek pengembangan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat dan aman, belum sepenuhnya didukung oleh pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih. Kemampuan pelayanan air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir melalui PDAM Tirta Indragiri Hilir baru dapat dipenuhi 60,95 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Untuk daerah perkotaan masih juga kekurangan terutama kota Tembilahan, Sungai Sei. Guntung, Kuala Enok dan kota-kota lainnya. Sedangkan kebutuhan air bersih untuk pelabuhan sama sekali belum dapat dipenuhi oleh PDAM. Melihat kondisi seperti ini maka peluang untuk menanamkan modal atau kerjasama terbuka luas.

Ditahun 2004 volume air bersih yang salurkan oleh PDAM Tirta Indragiri mencapai 898.925 m³ dengan pengguna terbesar adalah rumah tempat tinggal yaitu mencapai 89,84%. Jumlah terbesar perusahaan air ini juga rumah tangga yang mencapai 6.097 pengguna atau sekitar 90,26%. Penggunaan air kedua terbanyak adalah untuk keperluan niaga yang mencapai 86.230 m³ dengan jumlah pengguna sebanyak 637 pelanggan atau sekitar 9,43% dengan nilai mencapai Rp. 546,6 juta.

Tabel 2.11 Banyaknya Pengguna Air Minum PDAM Tirta Indragiri Tembilahan 2004

No	Kelompok Pengguna	Pelanggan (Sambungan)	Volume (m ³)	Rata-rata (m ³ /pelanggan)	Nilai (Rp.000)
1	Rumah tempat tinggal	6.097	807.600	132,46	1.405.200
2	Sosial	14	4.520	322,86	5.550
3	Niaga	637	86.230	135,37	546.609
4	Industri	4	260	65,00	38.490
5	Khusus	3	315	105,00	698
Jumlah		6.755	898.925	133,08	1.996.547

Sumber : Indragiri Hilir dalam Angka 2004.

Pelanggan sektor industri hanya sebanyak 4 unit usaha dengan penggunaan sebanyak 260 m³ dengan nilai Rp. 38,5 juta. Pelanggan air bersih dari kelompok sosial, seperti sekolah dan rumah ibadah berjumlah 14 dengan total penggunaan sebesar 4.520 m³. Pelanggan khusus sebanyak 3 unit dengan penggunaan hanya 315 m³.

Sumber energi listrik di perkotaan, dilakukan melalui penambahan jaringan serta mesin pembangkit, dan pengembangan listrik pedesaan. Unit pembangkit yang tersedia sebanyak 41 buah dengan daya terpasang mencapai 13.080 KW. Keberadaan unit-unit tersebut mencakup kota Tembilahan, Teluk Pinang, Sei Sei, Guntung, Sapat, Mandah, Sei. Piring, Igal, Concong Luar, Tanjung Lajau, Perigi Raja, Kuala Lahang, Simpang Gaung, Bekawan, Seberang Tembilahan, Pulau Burung, Bagan Jaya, Belantaraya, Rotan Semelur dan Lahang Baru, dengan kemampuan produksi seluruhnya mencapai 37.150.442 KW.

Kondisi alam Kabupaten Indragiri Hilir yang berupa sungai dan parit-parit menyulitkan masyarakat untuk memperoleh air bersih untuk keperluan rumah tangga. Air sebagai sumber kehidupan sangat diperlukan masyarakat, dengan berbagai sumber. Masyarakat disekitar sungai memanfaatkan air sungai sebagai sumber air, dan bagi mereka yang berada didaerah lainnya dapat menggunakan sumur. Keperluan air untuk masyarakat perkotaan seperti Tembilahan sebagian dipenuhi kebutuhannya oleh perusahaan air minum yang ada.

Aspek pengembangan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, bersih, sehat dan aman, belum sepenuhnya didukung oleh pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih. Kemampuan pelayanan air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir melalui PDAM Tirta Indragiri baru dapat dipenuhi 60,95 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Untuk daerah perkotaan masih juga kekurangan terutama kota Tembilahan, Sungai Sei. Guntung, Kuala Enok dan kota-kota lainnya. Sedangkan kebutuhan Air bersih untuk pelabuhan sama sekali

belum dapat dipenuhi oleh PDAM. Melihat kondisi seperti ini maka peluang untuk menanam modal atau kerjasama terbuka luas.

Pelanggan sektor industri hanya sebanyak 4 unit usaha dengan penggunaan sebanyak 260 m³ dengan nilai Rp. 38,5 juta. Pelanggan air bersih dari kelompok sosial, seperti sekolah dan rumah ibadah berjumlah 14 dengan total penggunaan sebesar 4.520 m³. Pelanggan khusus sebanyak 3 unit dengan penggunaan hanya 315 m³.

2.1.6. Politik dan Pemerintahan

1. Politik dan Demokrasi

Dinamika kehidupan politik nasional pasca reformasi, telah mengalami banyak kemajuan, perubahan dan memberikan harapan yang semakin menjanjikan akan terwujudnya kehidupan yang semakin demokratis sesuai dengan nilai-nilai falsafah ideologi bangsa "Pancasila" dan tetap berada di atas landasan konstitusi Undang-Undang dasar 1945 serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari aspek politik, perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa transisi demokrasi menuju arah konsolidasi demokrasi. Salah satu kebijakan strategis adalah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang berimplikasi kepada pemekaran provinsi, kabupaten dan kota memberikan ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat guna mempercepat pembangunan daerah.

Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini, partisipasi masyarakat diberi ruang yang cukup dalam praktek

penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Namun demikian, dinamika pembentukan, perubahan dan jalannya sistem politik sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan masa Orde Baru belum mampu membangun fondasi yang kokoh bagi berkembangnya demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kurun waktu sampai dengan Era Orde Baru tersebut, kehidupan sosial politik didominasi oleh kekuatan eksekutif yang bersifat sentralistik didukung oleh kekuatan militer. Birokrat tidak netral dan menjadi pendukung utama kekuasaan penguasa. Sistem kepartaian didominasi oleh partai tertentu, tidak terjadinya hak politik rakyat, budaya paternalistik yang sempit, penyelenggaraan Pemilu belum dilakukan dengan jujur dan bersih, serta kurangnya kebebasan dan media massa pada umumnya. Dari aspek pemberdayaan perempuan dan anak serta pemuda telah pula menunjukkan peningkatan ditandai dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak serta partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di kalangan masyarakat.

Dengan berkembangnya kehidupan politik yang sangat dinamis tersebut, telah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir melalui pertumbuhan dan perkembangan yang subur sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik (partai), sehingga dengan kondisi tersebut telah mengantarkan pada penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil dan transparan sebanyak 2 kali (1977 dan 2002) yang diikuti oleh multi partai dengan menghasilkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari berbagai partai yang memperoleh jumlah suara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Proses demokratisasi tidak hanya terjadi dalam tubuh lembaga legislatif, tetapi juga dialami oleh lembaga eksekutif melalui proses pemilihan kepala daerah yang tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi, tetapi lebih didasarkan pada aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis. Dan pencalonan kepala daerah tidak lagi

didominasi oleh kalangan pegawai negeri sipil dan TNI/Polri, tetapi dapat dilakukan oleh berbagai kalangan yang tidak terbatas. Hal tersebut terlihat dari 2 kali hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yang dimenangkan oleh pengusaha/politisi.

2. Informasi, Komunikasi dan Media Massa

Berdasarkan pertimbangan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara kesatuan dengan otonomi daerah, dimana masing-masing daerah berkesempatan untuk melakukan upaya sendiri dalam mengelola potensinya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Prinsip utama sebagai acuan dalam membangun *e-government* baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota diantaranya adalah prinsip koordinasi, keterpaduan dan kesesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan *e-government* di Kabupaten Indragiri Hilir harus dapat mengkoordinasikan seluruh informasi yang ada dimasing-masing Dinas/Kecamatan. Implikasinya terhadap pembangunan sistem teknologi informasi diantaranya adalah dibutuhkannya suatu sistem *data base*, *software* dan sisitim jaringan komunikasi terpadu yang memenuhi standar kompatibilitas dan konektifitas.

Untuk itu diperlukan keterpaduan dalam sistem pengumpulan, pengorganisasian, pemutakhiran dan sistem lalu lintas data. Data-data penting dari Kecamatan dan Dinas, Instansi, Badan yang meliputi data geografi, data demografi dan administrasi pemerintahan, data moneter dan keuangan, data sumber daya alam, data politik, data sosial ekonomi, data infrastruktur dan pelayanan umum, data geografi. Semua data ini dapat setiap saat digunakan oleh pihak tertentu untuk mengambil suatu kebijakan seperti kebijakan investasi, pemasaran, pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan lain-lain.

Diharapkan dengan adanya sumberdata yang lebih akurat akan lebih memudahkan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk melakukan

perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan dengan informasi potensi daerah secara luas diharapkan adanya peluang bagi pengusaha/investor untuk menanamkan modal di daerah.

Adapun jenis pelayanan dan kondisi mutu pelayanan dalam bidang informasi yang telah dikembangkan adalah berupa :

- a. Memberikan data/informasi kepada jajaran pemerintah, swasta, masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah melalui sarana teknologi informasi.
- b. Memberikan pelayanan dalam peminjaman buku bagi Umum dan Pelajar serta adanya pelayanan Perpustakaan Keliling ke Kecamatan.
- c. Dan mengacu kepada pedoman standar pelayanan prima.

Peran media massa dalam pembangunan daerah tidak dapat diabaikan oleh karena perannya sebagai sosial kontrol, jalur komunikasi dan informasi antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya maupun sesama kelompok masyarakat, serta untuk lebih memperkenalkan daerah dengan dunia luar. Oleh karena itu pembinaan terhadap media massa dan pengembangan kerjasama yang sinergis sangat diperlukan untuk menumbuh-kembangkan opini publik yang positif dan konstruktif guna dapat mendorong semakin dinamisnya pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah

Salah satu agenda penting dalam pembangunan pemerintahan adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, penegakan supremasi hukum dan peningkatan peluang partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berbagai langkah kebijakan

terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem pengawasan serta pemeriksaan yang efektif sangat diperlukan.

Otonomi daerah, sebagai salah satu dari sejumlah kebijakan strategis pemerintah untuk menjawab berbagai tuntutan reformasi, telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan dari pola pemerintahan bersifat sentralistik menjadi pola terdesentralisasi. Melalui kebijakan ini, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diharapkan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini sangat dibutuhkan tidak saja untuk menghadapi berbagai tuntutan perkembangan di era yang semakin kompetitif ini, tetapi juga untuk mengentaskan sisa-sisa permasalahan yang terjadi pada waktu-waktu lalu yang hingga kini masih terus diupayakan penanggulangannya. Berbagai permasalahan warisan masa-masa sebelumnya berkembang dan meningkat derajat kompleksitasnya disebabkan telah terjadi perubahan-perubahan besar terutama yang terkait dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.

Aparatur pemerintah daerah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sampai tahun 2005 berjumlah 6.257 orang baik yang merupakan tenaga administratif maupun tenaga fungsional. Untuk aparatur yang merupakan tenaga fungsional adalah yang terdiri atas tenaga guru sebanyak 3.630 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 361 orang. Sedangkan untuk tenaga administrasi yang menduduki posisi pada eselon mulai dari eselon I hingga eselon II maupun yang non eselon lainnya yang seluruhnya mencapai sekitar 2.266 orang. Keberadaan aparatur pemerintah tersebut mulai dari tingkat Kabupaten hingga kelurahan/desa.

Upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi aparatur adalah untuk menciptakan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional yang dilakukan melalui :

- a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah (SDARI) sesuai dengan standar kualitas minimal untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan handal.
- b. Mengembangkan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara keseluruhan.
- c. Pengembangan perangkat lunak untuk mewujudkan tersedianya informasi data kepegawaian yang akurat dan berkesinambungan.
- d. Mengembangkan motivasi kepada pegawai yang cukup tinggi untuk mengoptimalkan pengembangan pegawai.
- e. Mengelola dana pendukung kegiatan secara efektif dan efisien serta berdaya guna.
- f. Mengembangkan kaderisasi, mutasi, penempatan aparatur sesuai dengan analisis kebutuhan setiap instansi pemerintah, standar baku dan prestasi kerja.

Dari sisi kelembagaan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir, relatif lengkap dengan peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelembagaan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga eksekutif, DPRD yang terdiri atas fraksi-fraksi dan komisi-komisi sebagai lembaga legislatif, lembaga peradilan dan penegakan hukum (Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian) dan lembaga pertahanan negara yang terdiri dari kodim (TNI-AD) dan Pangkalan Angkatan Laut (TNI-AL). Khusus untuk perangkat Pemerintah Daerah keberadaannya mulai dari tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan, sedangkan untuk kepolisian keberadaannya adalah mulai dari tingkat Resort di tingkat Kabupaten, Sektor di tingkat Kecamatan dan Pos Polisi pada sejumlah tempat yang strategis untuk melaksanakan tugas-tugas Kamtibmas. Untuk TNI-AD (Kodim) keberadaannya adalah hanya pada tingkat Rayon (Koramil) untuk wilayah Kecamatan. Demikian pula untuk TNI-AL yang keberadaannya hanya berada pada tingkat Pos TNI-AL pada posisi yang strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan.

4. Ketertiban, Keamanan dan Supremasi Hukum

Memasuki peralihan abad ke 21, merupakan peluang bagi Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengambil langkah-langkah penting dan mendasar dalam rangka tercapainya tujuan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Hal ini merupakan implikasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, tentunya berdampak positif pada kewenangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Begitu pula halnya bagi Kabupaten Indragiri Hilir, dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat, maka secara legalitas Kabupaten Indragiri Hilir dapat menentukan rencana strategis dan melakukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya. Ini berarti pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, responsive, akomodatif dan produktif.

Implementasi otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sejak tahun 2000 yang lalu telah mendorong kemampuan pemerintah kabupaten dalam menyerap aspirasi masyarakat yang juga telah berkembang dengan sangat dinamisnya dan telah mampu diapresiasi oleh pemerintah bersama *stakeholders* dalam bentuk kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang hukum khususnya stabilitas keamanan dan penegakan supremasi hukum, politik, demokratisasi dan pemilihan umum.

Seperti dirasakan pada awal bergulirnya reformasi dan sempat dengan sangat banyak permasalahan yang harus kita hadapi dan atasi, salah satunya adalah persoalan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Karena masalah tersebut merupakan hak sekaligus sebagai kewajiban setiap individu ataupun masyarakat secara bersama-sama menciptakan rasa aman bagi dirinya maupun orang lain.

Hal ini adalah sangat penting mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat, karena harus kita akui disamping masih terbatasnya personil aparat keamanan dan penegak hukum di lapangan baik dari Kepolisian maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam masyarakat, juga karena faktor heterogenitasnya masyarakat, posisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu pintu gerbang Riau di bagian Selatan, kondisi geografis yang spesifik, masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mentaati hukum, terutama yang berhubungan langsung dengan lingkungan yang berdampak kepada ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, misalnya masih berkembangnya persoalan-persoalan yang dikenal dengan istilah PEKAT (Penyakit Masyarakat) dan masalah pelanggaran hukum lainnya. Persoalan hukum dimaksud tidak saja merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak pada persoalan hak asasi manusia (HAM).

2.1.7. Kewilayahan

Indragiri Hilir memiliki lahan yang luas (daratan dan di pulau-pulau di wilayah lautan/perairan), lahan-lahan tersebut sangat potensial dikembangkan untuk kawasan budidaya. Apalagi kekuatan kawasan pesisir dan lautan yang cukup luas, yang menyimpan sejumlah besar potensi yang dapat dijadikan untuk pengembangan perekonomian wilayah, perikanan laut, budidaya tambak. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki potensi sumberdaya wisata yang cukup kaya dan beragam pada kawasan-kawasan yang ada di Indragiri Hilir.

Di sisi lain, konfigurasi geografis wilayah lautan yang terdiri dari gugus-gugus pulau yang cukup banyak, juga berpengaruh pada mahalanya biaya pengembangan sistem transportasi wilayah, apalagi diperparah oleh bentukan struktur tanah gambut yang cukup tebal, sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur. Demikian pula kesulitan tersebut berimplikasi pada kawasan budidaya pertanian. Kesulitan memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih di sepanjang kawasan Pantai Timur.

Dari peluang investor swasta, juga banyak berminat untuk berinvestasi, sehingga minat ini harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga kekurangan - kekurangan dalam pelayanan para investor perlu dibenahi semaksimal mungkin. Dan yang perlu dimanfaatkan adalah perkembangan perekonomian Riau, Batam, IKT-GT untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Kebijakan Nasional untuk pengembangan potensi Sumber Daya Kelautan, sebenarnya dapat diambil sebagai peluang yang cukup menguntungkan bagi kabupaten ini, karena struktur wilayah ini cukup menjanjikan di sektor ini, karena wilayah kabupaten Indragiri Hilir memiliki laut seluas 6.318.315 Km² (RTRW Kabupaten Indragiri Hilir 2002).

Ada beberapa hal yang masih mengganjal bagi perkembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu adanya kesenjangan perkembangan antar kawasan, sektor dan golongan sosial penduduk. Kesenjangan antara pusat wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan daerah belakang (*hinterland*), antara kawasan tumbuh cepat (Tembilahan, Sungai Guntung dan Kuala Enok) dengan Kawasan tumbuh lambat, antara perkotaan dengan pedesaan, antara sektor ekonomi modern/padat modal dengan sektor tradisional, dan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Sebagai akibat masih relatif terbatas dan belum meratanya prasarana dan sarana dasar wilayah. Hal ini merupakan salah satu cerminan dari adanya kesenjangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah.

Dengan mengacu pada kasus di atas maka dalam kondisi saat ini masih terbatasnya pusat-pusat pertumbuhan yang mampu berinteraksi baik secara internal maupun eksternal (dalam dan luar negeri), sehingga terjadi kesenjangan pengembangan Wilayah antara satu dengan lainnya. Apabila masih adanya konflik pemanfaatan ruang di sebagian besar wilayah, sebagai akibat adanya tumpang tindih kepentingan dari berbagai sektor dan individu.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 11.605.97 Km yang terdiri dari 17 kecamatan, dengan 190 desa/kelurahan. Kecamatan Mandah dengan ibukota Kecamatan Khairiah Mandah merupakan kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu 1.479,24 Km atau mencapai 12,75% dari luas Kabupaten dengan 10 desa/kelurahan, Kecamatan yang juga memiliki Wilayah relatif luas adalah Tempuling (9,10%) dan Batang Tuaka (9,05%)

Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki luas wilayah yang paling kecil, hanya 180,62 km atau sekitar 1,56% dengan 4 desa/kelurahan. Diikuti Kecamatan Tembilahan sebagai Ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 197,37 km (1,70%) dengan 6 desa/kelurahan. Kecamatan Teluk Belengkong juga memiliki luas wilayah yang relatif kecil, hanya 499 km atau 4,30%.

Tabel 2.12. Kecamatan, Jumlah Desa, Luas dan Penyebarannya Tahun 2004

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Sebaran (%)
1	Keritang	Kotabaru	13	543.45	4.68
2	Reteh	Pulau Kijang	16	553.74	4.77
3	Enok	Enok	12	880.86	7.59
4	Tanah Merah	Kuala Enok	10	721.56	6.22
5	Kuala Indragiri	Sapat	14	671.92	5.79
6	Tembilahan	Tembilahan	6	197.37	1.70
7	Tempuling	Sungai Salak	15	1,055.68	9.10
8	Batang Tuaka	Sungai Piring	11	1,050.25	9.05
9	Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	8	612.75	5.28
10	Gaung	Kuala Lahang	11	1,021.74	8.80
11	Mandah	Khairiah Mandah	10	1,479.24	12.75
12	Kateman	Sungai Guntung	8	561.09	4.83

13	Kemuning	Selensen	11	525.48	4.53
14	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	4	180.62	1.56
15	Pulau Burung	Pulau Burung	15	520.00	4.48
16	Pelangiran	Pelangiran	13	531.22	4.58
17	Teluk Belengkong	Sakaraton	13	499.00	4.30
Jumlah			190	11,605.97	100.00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2005

Peruntukan lahan terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai lahan kering tahun 2004 mencapai 1.107.885 hektar atau sekitar 50%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2000 mengalami peningkatan sekitar 2,99%. Selama tahun 2000 – 2004, luas lahan untuk perkebunan meningkat sekitar 7,38% dari 447.006 hektar menjadi 480.017 hektar atau mencapai 21,66% dari luas pemanfaatan lahan.

Luas hutan negara mengalami pengurangan dari 292.356 hektar menjadi 264.085 hektar pada periode 2000-2004. Perubahan terbesar terjadi pada luas padang rumput yang ada dari 250 hektar di tahun 2000 menjadi 2.550 hektar tahun 2004 atau meningkat sekitar 92 kali. Luas tegalan atau kebun mencapai 4,19% dari luas keseluruhan atau 92.742 hektar meningkat sekitar 25,85% dibandingkan tahun 2004 yang hanya 73.694 hektar.

Arahan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Indragiri Hilir ditujukan dalam upaya mengembangkan seluruh bagian wilayah. Pada bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jambi dikembangkan fungsi kawasan hutan produksi, pertambangan, perkebunan, hutan produksi terbatas dan hutan lindung.

Pada kawasan ibukota Kabupaten dan sekitarnya pengembangan struktur ruang diarahkan untuk pengembangan kawasan aglomerasi perkotaan yang potensial menjadi kawasan tumbuh cepat. Pengembangan kawasan aglomerasi perkotaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam konteks pemanfaatan ruang, pengembangan agropolitan Indragiri Hilir diharapkan mampu menjadi kawasan penggerak perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir yang akan membawa konsekuensi terhadap peningkatan intensitas pemanfaatan ruang.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki posisi yang cukup strategis yang dapat dilihat dan letaknya di pantai timur Sumatera dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi seperti Kota Batam dan Kabupaten Karimun, maupun karena Kabupaten ini memiliki akses ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri dengan kondisi bentang alamnya yang berupa estuaria raksasa. Gambaran bentang alam yang seperti inilah yang menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai "Pintu Gerbang Riau Bagian Selatan" dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Hujan yang turun antara bulan Oktober sampai Maret setiap tahunnya sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tak turun selama tiga bulan lamanya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih pengairan dan sebagainya. Kedepan perlu pemikiran agar masalah air bersih ini diprioritaskan karena kebutuhan air bersih sudah merupakan kebutuhan primer.

Perlu pemikiran agar air asin laut tidak mempengaruhi lahan pertanian karena terdesaknya air tawar ke hulu sungai pada musim kemarau. Angin yang bertiup sepanjang tahun 2003 adalah angin Utara dan angin Selatan. Pada waktu angin utara bertiup terjadi musim gelombang yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan

air pasang yang cukup tinggi dan membawa air laut berkadar garam sampai jauh ke hulu sungai/pant, sehingga berpengaruh terhadap kesuburan tanah bagi tanaman perkebunan kelapa, padi palawija dan lainnya.

Berhubung sungai besar yaitu Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) dan Sungai Gangsal yang bermuara ke Selat Berhala, maka perlu kerjasama antar wilayah pengembangan, agar kelestarian badan sungai dapat dipertahankan bersama karena sungai ini melalui beberapa Provinsi dan Kabupaten yang berbeda, sehingga dengan kebersamaan ini dapat dijaga keseimbangan keberadaan sungai dari hulu sampai hilir nantinya.

Kabupaten ini juga dikategorikan sebagai daerah pantai yang panjang garis pantai di Kabupaten ini adalah 339,5 Km, dengan luas perairan laut meliputi 6.318 Km². Maka kondisi ini mempunyai potensi yang luas di bidang perikanan yaitu mencapai 36.404 ton pertahun, untuk perlu memberdayakan petani nelayan agar dapat memanfaatkan keberadaan potensi ini dengan maksimal mungkin disamping tetap menjaga kelestarian lingkungan pantai tetap terjaga. Jika hal tersebut di atas dapat diwujudkan maka Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi Kabupaten penghasil ikan yang cukup diperhitungkan di wilayah Sumatera khususnya.

Hal ini perlu dikembangkan karena Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten termiskin dalam hal sumber daya alam, terutama dalam sumber-sumber mineral dan bahan-bahan galian, maka penggalan dan pengembangan sektor perikanan ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti halnya dalam bentuk pertambakan ikan, dan pertambakan udang yang selalu menjadi incaran investor yang datang ke Kabupaten ini.

Produktivitas pertanian ternyata tidak terlalu rendah, yaitu sebesar 4,14 ton/ha/tahun, maka melihat kondisi ini diperlukan investasi yang besar dalam bidang irigasi agar potensi yang besar ini dapat digali seoptimal mungkin, ke

depan kita memanfaatkan potensi yang ada sehingga kekuatan potensi ini dapat digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kontribusi dalam sektor pertanian dapat ditingkatkan bahkan dapat menjadi sektor primadona disamping sektor perkebunan penghasil kopra yang telah eksis selama ini.

Sangat diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan hutan mangrove karena sifat dan permukaan tanah yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Potensi yang dapat dikembangkan pada masa mendatang adalah kawasan hutan sebagai kawasan lindung untuk menjaga kestabilan permukaan air, perlindungan dan pelestarian terhadap plasma nutfah dan berbagai jenis tanaman yang spesifik terdapat di daerah tropis bertahan gambut, yang berfungsi sebagai penyerap gas karbon.

2.2.2. Demografi

Jika angka tahun 2000 – 2005 digunakan untuk menentukan jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja maka untuk tahun 2005 jumlah penduduk adalah 633.817 orang, jumlah tenaga kerja 438.073 orang dan angkatan kerja 278.751 orang. Tahun 2025 jumlah penduduk akan mencapai 853.659 orang dengan angkatan kerja mencapai 376.177 orang dan yang sedang bekerja sebanyak 333.75 orang.

Berdasarkan perhitungan maka diproyeksikan kesempatan kerja tahun 2005 sebesar 247.357 dengan proporsi 80,02% bekerja disektor pertanian, 7,80% di sektor sekunder dan disektor tersier mencapai 12,18%. Di tahun 2025 peranan sektor pertanian di dalam menyerap tenaga kerja masih dominan mencapai 60,28%, sektor sekunder sekitar 15,18% dan sektor tersier mencapai 24,3%.

Menyangkut dengan elastisitas kesempatan kerja dapat diukur dengan cara membandingkan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan sektor. Perubahan kesempatan kerja tahun 2005 – 2025 adalah 35% dan

perubahan output sekitar 77% maka elastisitas kesempatan kerja (*output elasticity of employment*) sebesar 0,45 yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.13. Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja dan Orang Yang Bekerja Tahun 2005-2025 (orang).

Uraian	2005	2010	2015	2025	2025
Penduduk (orang)	633.817	682.801	735.570	792.418	853.659
Penduduk usia $\geq$ 15 tahun (orang)	438.073	475.426	515.965	559.960	607.707
Angkatan kerja (orang)	278.751	300.442	323.820	349.018	376.177
Bekerja (orang)	247.357	266.558	287.249	309.547	333.575
Sektor pertanian (%)	80,02	76,97	73,26	67,88	60,28
Sektor sekunder (%)	7,80	9,07	10,68	12,69	15,18
Sektor tersier (%)	12,18	13,96	16,06	19,43	24,53

Sumber : Angka Proyeksi data BPS, 2005

Dengan jumlah penduduk yang besar merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja, namun dengan penyebaran dan kualitas yang rendah tentu menimbulkan permasalahan. Agar permasalahan yang menyangkut penduduk dan ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terselesaikan dengan baik maka ke depan pembangunan penduduk dan ketenagakerjaan harus memperhatikan

1. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan manusia untuk menimbulkan percaya diri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang menyeluruh di semua sektor dan daerah yang

ditujukan untuk perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja peningkatan mutu, kemampuan serta perlindungan kesempatan kerja.

2. Pembangunan sektoral dan daerah selalu diusahakan terciptanya perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas. Oleh karena itu perlu adanya langkah yang terpadu untuk membina dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu perlu ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu dan menyeluruh pada skala daerah.
3. Pembinaan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha harus ditingkatkan dan diarahkan pada terciptanya kerjasama yang serasi dan seimbang, dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan dan saling mengerti kewajiban dan hak masing-masing.
4. Kebijakan ketenagakerjaan khususnya penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja diusahakan dengan memperhatikan kesinambungan yang lebih mantap antara sektor pertanian dengan sektor lainnya khususnya sektor industri. Untuk itu perlu penyempurnaan sistem informasi tenaga kerja yang mencakup penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Sejalan dengan itu akan disempurnakan mekanisme yang tepat bagi penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja di berbagai sektor dan daerah serta pemanfaatan pasar tenaga kerja diluar negeri dengan mempertimbangkan harkat dan martabat serta nama baik bangsa Indonesia dan perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Perhatian khusus perlu diberikan kepada angkatan kerja muda usia dan diusahakan sejak dini dari rumah tangga.
5. Kegiatan perusahaan pada hakekatnya merupakan upaya bersama antara pengusaha dan tenaga kerja serta diarahkan untuk pertumbuhan perusahaan maupun untuk kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan perlu memberikan imbalan yang layak sesuai dengan sumbangan jasa yang diberikan serta pertimbangan kemanusiaan. Selain itu perusahaan wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan peningkatan dan kemajuan perusahaan. Sejalan dengan itu akan ditingkatkan peran serikat pekerja. Serikat pekerja yang mewakili tenaga kerja bersama-

sama pengusaha memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengusahakan agar tenaga kerja memiliki kesadaran dalam turut bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Pemerintah mengusahakan terciptanya suasana hubungan serasi antara pengusaha dan pekerja, yang lebih mendorong terciptanya kelancaran, efisiensi, produktivitas, atas kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja.

6. Upaya perlindungan tenaga kerja diupayakan melalui perbaikan upah dan gaji serta jaminan sosial lainnya, syarat-syarat kerja lingkungan kerja dan hubungan kerja dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh bagi tenaga kerja usia muda. Khusus terhadap tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian khusus dan perlindungan sesuai dengan sifat dan kodrat serta martabatnya.
7. Kebijakan pengupahan dan penggajian disamping memperhatikan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu terus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah rendah agar dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum.

2.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

1. Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto

Pencapaian pembangunan ekonomi selama 20 tahun diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat. Tahun 2005 diperkirakan PDRB perkapita riil masyarakat telah mencapai Rp. 4,6 juta dan di akhir Pembangunan Jangka Panjang ini sudah mencapai Rp. 8,2 juta. Jika kita perhitungkan pergerakan indeks harga yang berlaku di dalam perekonomian, tahun 2025 diperkirakan PDRB perkapita masyarakat mencapai Rp. 47,94 juta.

**Tabel 2.14. Proyeksi PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2005 – 2025**

Uraian	2005	2010	2015	2025	2025
PDRB nominal (milyar rupiah)	4.139,22	7.339,65	13.014,63	23.077,47	40.920,85
PDRB riil (milyar rupiah)	2.919,02	3.627,14	4.507,04	5.600,40	6.958,99
Penduduk (orang)	833.817	682.801	735.570	792.418	853.659
PDRB Perkapita nominal (rupiah)	6.530.630,68	10.749.326,92	17.693.258,54	29.122.852,59	47.935.827,93
PDRB Perkapita riil (rupiah)	4.605.466,59	5.312.152,51	6.127.281,58	7.067.481,48	8.151.954,59

Sumber : Proyeksi Data BPS, 2005

Menyangkut peranan masing-masing sektor terhadap PDRB antara tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

- Sektor pertanian sebagai sektor kunci peranannya akan mulai menurun dari 51,77% di tahun 2004 menjadi hanya sekitar 45,25% di tahun 2025, karena peranan sektor pertanian akan semakin kecil di dalam perekonomian seiring meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.
- Sektor kunci kedua adalah sektor industri peranannya naik dari 10,15% menjadi 16,5%, karena pertumbuhannya yang relatif baik dengan permintaan masyarakat akan hasil industri semakin besar terutama industri hasil-hasil pertanian dan industri barang modal. Untuk meningkatkan sektor industri,

perlu kebijakan yang menjurus kepada perluasan lapangan industri dan juga merubah pola penguasaan bahan baku yang umumnya adalah hasil sektor pertanian.

- Sektor perdagangan diharapkan peranannya akan meningkat dari 15,15% tahun 2004, menjadi sekitar 17,25 tahun 2025 oleh karena pertumbuhan yang dicapai adalah sebesar 5,45%. Peningkatan sektor perdagangan berkaitan dengan pertambahan atau peningkatan nilai tambah petani. Dusahakan agar petani tidak langsung menjual produk yang belum diolah ke pasar tetapi hendaklah diolah terlebih dahulu, dan cara menjualnya secara kolektif atau melalui lembaga koperasi sehingga terhindar dari tengkulak.

Direncanakan pertumbuhan output sebesar 9,4%, jauh diatas pertumbuhan penduduk yang rata-rata per tahun mencapai 3,09%, dan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 5,20% dan pertambahan kesempatan kerja 4,76%. Kelihatannya dengan pertumbuhan ekonomi 5,16%, hasil-hasil yang akan dicapai cukup berpengaruh positif dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Industri dan Perdagangan

Pembangunan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha. Untuk itu akan dikembangkan penyebaran informasi pasar dan upaya penyederhanaan tata niaga termasuk sistem perizinan serta penyempurnaan lembaga-lembaga pemasaran dan perdagangan, sehingga lalu lintas perdagangan menjadi lebih lancar serta dapat mendorong persaingan yang sehat.

Perdagangan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya akan diatur distribusinya sehingga lebih menjamin ketersediaan secara merata dan dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu perlu

pengadaan dan penyaluran bahan-bahan tersebut akan lebih disempurnakan dan lebih terpadu dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang produksi, perkreditan, jasa perhubungan sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil.

Permasalahan secara keseluruhan perdagangan terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan adalah kecilnya nilai tambah yang didapat oleh usaha dagang kecil kalau dibandingkan dengan usaha perdagangan yang berskala besar. Untuk itu perlu pengaturan hubungan pedagang grosir dengan pengecer sehingga saling menguntungkan.

Pembangunan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen dan sekaligus menjamin kepentingan konsumen, meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. Untuk itu akan dikembangkan penyebaran informasi pasar dan upaya penyederhanaan tata niaga termasuk sistem perizinan serta penyempurnaan lembaga-lembaga pemasaran dan perdagangan, sehingga lalu lintas perdagangan menjadi lebih lancar serta dapat mendorong persaingan yang sehat.

Perdagangan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya akan diatur distribusinya sehingga lebih menjamin ketersediaan secara merata dan dengan tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu pola pengadaan dan penyaluran bahan-bahan tersebut akan lebih disempurnakan dan lebih terpadu dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang produksi, perkreditan, jasa perhubungan sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah terpencil.

Dalam melaksanakan pembangunan industri agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi kokoh, diusahakan agar terdapat keterkaitan yang erat antar sektor industri dengan sektor-sektor lainnya khususnya sektor pertanian. Demikian juga keterkaitan antara dalam sektor industri sendiri yaitu keterkaitan antara industri hulu dan hilir dan antara industri kecil, menengah dan kecil.

Pembangunan industri yang menunjang pertanian, seperti industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi konsumsi dalam negeri serta industri yang menghasilkan peralatan dan sarana produksi pertanian, perlu lebih diprioritaskan termasuk industri yang mengelola sumberdaya alam lainnya.

Pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta informal dan tradisional ditingkatkan dan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, melestarikan dan mengembangkan hasil karya budaya, meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin. Untuk itu perlu ditingkatkan bimbingan teknis dan pengusaha termasuk memasyarakatkan berbagai hasil penelitian. Peningkatan mutu produksi peningkatan produktivitas dan perluasan pemasaran hasil produksi didalam negeri dan luar negeri.

Pengembangan wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri yang didasarkan kepada potensi yang dimiliki, akan segera dibangun dengan lebih mengutamakan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan keterkaitan pengembangan industri antar daerah dalam rangka memperkuat kesatuan ekonomi daerah.

Kemampuan dan peranan swasta dan koperasi dalam kegiatan industri terus dikembangkan dengan pembangunan sarana dan prasarana dan menciptakan iklim yang menunjang serta kegiatan usaha pendidikan dan pelatihan termasuk keterampilan dan kemampuan pengelolaan khususnya untuk pengusaha kecil dan koperasi.

Dalam pembangunan industri selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian dan mencegah pencemaran serta pemborosan penggunaan sumberdaya alam.

Untuk itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.

Dalam rangka meningkatkan daya saing perlu dimantapkan penggunaan standar industri Indonesia (SII) untuk produksi dalam negeri. Dengan demikian mutu dan keandalan produksi dalam negeri akan lebih terjamin sehingga daya saingnya akan meningkat pula. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi sesuai dengan perkembangan dunia dalam rangka mewujudkan sistem tata niaga dan distribusi nasional di daerah yang efisien dan efektif, melalui kebijakan perdagangan yang terpadu dan saling mendukung dengan kebijakan di sektor lainnya.

Pembangunan industri dan perdagangan dalam jangka panjang adalah :

- 1) Pembangunan industri sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan lebih kokoh, yaitu dengan struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses industrialisasi yang berorientasi kepada tersedianya bahan baku di daerah lebih diutamakan dan dimantapkan guna mendukung industri sebagai penggerak utama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan industri harus membuat industri lebih efisien dan peranannya didalam perekonomian daerah semakin meningkat baik dari segi nilai tambah maupun dari segi kesempatan kerja.
- 2) Pembangunan industri juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*), menyediakan barang-barang yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, serta mampu bersaing baik didalam negeri maupun diluar negeri, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu menggunakan sumberdaya manusia, sumberdaya energi, devisa, dan teknologi tepat guna seefisien mungkin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

c. Koperasi dan UKM

1. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, dan pertumbuhannya berakar di masyarakat. Untuk itu akan diusahakan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, pendidikan dan pembinaan pengelolaan koperasi.
2. Gerakan memasyarakatkan koperasi ditempuh melalui pendidikan koperasi baik disekolah maupun diluar sekolah secara profesional. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan usaha kecil dan menengah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan koperasi khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan diatas pengembangan koperasi dilakukan dengan mempermudah kesempatan memperoleh kredit dengan syarat lunak, bantuan tenaga manajer, latihan keterampilan, pemagangan dan pendidikan keahlian.
3. Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar diberbagai sektor perlu lebih ditingkatkan. Untuk itu perlu dibina kerjasama antara koperasi dengan usaha negara, daerah dan swasta. Selanjutnya dalam menata tatanan kehidupan ekonomi yang lebih adil, koperasi perlu diberi kesempatan yang lebih luas dengan menetapkan lapangan usahanya secara pasti dan menjamin tempat usahanya yang permanen, serta dapat turut serta memiliki sebagian usaha-usaha swasta, daerah dan negara.
4. Pengembangan dunia usaha di daerah yang terdiri dari badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil menengah akan diusahakan semakin mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Untuk itu kemampuan dunia usaha seperti koperasi, usaha kecil dan menengah, usaha tradisional, sektor informal dan usaha milik daerah akan terus ditingkatkan agar dapat tumbuh menjadi lebih tangguh dan mandiri.

5. Kerjasama yang lebih adil antara koperasi, usaha milik daerah, usaha milik negara, usaha kecil menengah, usaha tradisional dan sektor informal perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan menguntungkan, untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut. Dalam rangka pengembangan dunia usaha daerah harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli dan monopsoni baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat.
6. Upaya penyederhanaan berbagai peraturan daerah yang menyangkut dunia usaha termasuk perizinan serta untuk menjamin kepastian usaha dan kepastian tempat usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil akan terus disempurnakan.
7. Pengusaha golongan ekonomi lemah dan usaha tradisional akan terus dibina untuk terus meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewiraswastaan, antara lain melalui pendidikan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, dengan mengikutsertakan usaha besar, usaha milik daerah dan nasional. Sejalan dengan itu perlu disediakan berbagai kemudahan dan bantuan seperti kredit permodalan, tempat berusaha, bimbingan teknologi tepat guna, informasi pasar dan lain-lain.
8. Langkah-langkah untuk membina dan melindungi usaha tradisional agar dapat meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran, terutama usaha rumah tangga yang berakar pada kebudayaan daerah yang ternyata masih lemah namun mampu mempunyai potensi untuk membuka kesempatan kerja dan menambah tenaga kerja di masa datang perlu ditingkatkan agar dapat lebih efisien dan meningkatk pemasarannya dengan mengikuti perkembangan pasar tanpa meninggalkan ciri-ciri khas tradisionalnya.

d. Pariwisata

Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata dewasa ini mengindikasikan, bahwa pariwisata telah menjadi sektor ekonomi utama. Permintaan disektor ini terus

meningkat, rekreasi dan pariwisata telah menjadi kebutuhan yang posisinya semakin penting dalam pola pengeluaran masyarakat modern. Namun kendala yang masih harus dihadapi dalam pengembangan industri pariwisata adalah masih tumpang tindih dan kurangnya koordinasi dalam hal pengembangan dan pembinaan terhadap sektor pariwisata. Selain itu, masih kurangnya sumberdaya manusia pariwisata yang profesional, sehingga kurangnya pemahaman terhadap pariwisata. Kendala lain, adalah tidak adanya jaminan keamanan yang mengakibatkan adanya keraguan investor untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan.

Pengembangan industri pariwisata dengan sasaran wisatawan nusantara maupun manca negara akan memacu lajunya pertumbuhan ekonomi daerah, karena kegiatan kepariwisataan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai sektor dan dapat menggiatkan berbagai lapangan kerja, serta mempercepat peredaran uang di suatu wilayah. Tujuan utama pengembangan industri pariwisata adalah untuk menggaet penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan yang berkunjung. Agar devisa sektor pariwisata lebih banyak diterima, perlu diusahakan agar wisatawan merasa nyaman dan lebih lama tinggal. Kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan menentukan dalam pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap, dan pada akhirnya menunjang pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, pariwisata merupakan sektor yang kompleks karena bersifat multi aspek. Dalam pengembangan pariwisata sangat tergantung pada tiga aspek penting, yaitu : (1) aspek aksesibilitas, yaitu usaha yang berkaitan dengan kemudahan pencapaian wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata, seperti transportasi dan komunikasi dan informasi; (2) Daya tarik dan fasilitas wisata, yaitu obyek wisata alam, budaya, MICE dan minat khusus sedangkan fasilitas wisata adalah usaha perhotelan, jasa boga, perjalanan wisata, penjualan aksesoris/cenderamata, penukaran valuta asing dan lainnya; (3) Sumberdaya Manusia, yaitu tenaga kerja sebagai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata.

Pada masa akan datang, setidaknya akan ada dua faktor pendorong majunya kepariwisataan, yang ditandai dengan meningkatnya secara drastis kebutuhan akan jasa transportasi, akomodasi, restoran, termasuk usaha yang terkait seperti biro perjalanan, penukaran valuta asing, informasi pariwisata, objek dan daya tarik wisata, dan lainnya, yaitu : *Pertama*, naiknya pendapatan perkapita sebagai akibat langsung berhasilnya pembangunan ekonomi, telah dan akan meningkatkan mobilitas penduduk yang didasarkan oleh berbagai motivasi. *Kedua*, perkembangan politik dunia yang makin mendambakan perdamaian dan mengarah pada kerjasama harmonis internasional. Kondisi ekonomi dunia yang semakin membaik dalam suasana persahabatan yang semakin akrab, sangat memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan kepariwisataan secara global. Dalam hal ini, mobilitas wisatawan semakin meluas, diimbangi dengan berkembangnya tuntutan dan permintaan akan jasa kepariwisataan.

2. Sumberdaya Alam

1. Penelitian, penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam serta pembinaan lingkungan hidup perlu diusahakan dengan menggunakan cara yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak yang merusak lingkungan hidup serta mempertahankan mutu dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan demikian pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
2. Rehabilitasi sumberdaya alam dilakukan dengan pendekatan terpadu daerah aliran sungai dan wilayah. Oleh karena itu harus ditingkatkan dan disempurnakan upaya rehabilitasi hutan, tanah kritis, konservasi tanah, rehabilitasi sungai, rawa, hutan bakau, karang laut, serta pengendalian fungsi daerah aliran sungai. Sejalan dengan itu untuk mencegah meluasnya kerusakan hutan dan bertambahnya luas lahan kritis, diusahakan agar penyempurnaan peraturan pengelolaan hutan dan pengendalian ladang berpindah-pindah.

3. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang beraneka ragam segera dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan antara tata guna tanah, tata guna air dan sumberdaya lainnya dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis. Untuk itu tata ruang dikelola berdasarkan suatu pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Sejalan dengan itu tata guna tanah perlu disempurnakan dan ditujukan kepada kelestarian produktivitas dan mutu guna tanah serta pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburan tanah. Selanjutnya kebijakan tata guna air yang cukup, bersih dan berkesinambungan, pencegahan banjir, kekeringan, perlu dikaji ulang dan disempurnakan lagi.
4. Hutan sebagai penentu ekosistem sekaligus sumber alam yang berguna dan dapat diperbaharui, harus ditingkatkan pengelolaannya serta terpadu untuk menjaga keberadaan dan kelestariannya. Untuk itu inventarisasi dan penatagunaan hutan perlu disempurnakan untuk memantapkan status kawasan hutan dengan berbagai fungsinya. Selanjutnya konservasi hutan termasuk flora dan faunanya perlu dilanjutkan untuk perlindungan ekosistem, pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan serta pendidikan.
5. Pembangunan pertanian mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang bertujuan pada perkembangan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus dapat meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, untuk harus ada peningkatan produksi dengan kualitas yang semakin baik dan berkesinambungan sehingga dapat menunjang pembangunan industri dan meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu dilanjutkan usaha-usaha penganeekaragaman diversifikasi, intensifikasi serta rehabilitasi secara terpadu dan merata sesuai dengan kondisi tanah, air, iklim dan tetap memelihara kelestarian dan lingkungan hidup serta memperhatikan pula kemampuan pengusaha dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat guna.
6. Peningkatan produksi pangan dan hortikultura, perlu terus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Disamping itu juga ditujukan untuk

memperbaiki gizi antara lain melalui penganekaragaman jenis makan serta peningkatan penyediaan protein nabati dan hewani dengan berpedoman kepada pola konsumsi dan norma kehidupan masyarakat setempat. Upaya peningkatan produksi tersebut melalui peningkatan penganekaragaman pasca panen, kebijaksanaan harga yang layak, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan peningkatan usaha tani termasuk pemanfaatan lahan kering, pekarangan daerah rawa dan lahan pasang surut.

7. Peningkatan produksi perkebunan sebagai bahan baku industri dan ekspor non migas, dilakukan dengan upaya rehabilitasi, peremajaan, penganekaragaman komoditi serta pemanfaatan daerah gambut dan rawa, penyuluhan, pengembangan informasi pasar serta pemanfaatan teknologi tepat guna.
8. Peningkatan produksi perikanan, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui usaha budidaya perairan di daerah pantai, untuk itu perlu dikembangkan dan penggunaan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana dan memperbaiki kemampuan tentang informasi pasar. Peranan swasta masih diperlukan sepanjang dapat meningkatkan pemberdayaan nelayan-nelayan tempatan.
9. Pembangunan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor melalui usaha pengembangan daerah-daerah produksi peternakan serta pembinaan daerah-daerah produksi yang sudah ada. Sehubungan dengan itu perlu lebih ditingkatkan upaya pengembangan dan penggunaan teknologi tepat guna, baik untuk meningkatkan jumlah dan mutu ternak, pemeliharaan kesehatan ternak, penyuluhan, pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana. Perhatian perlu lebih ditujukan pada pengembangan dan perlindungan peternakan rakyat dengan meningkatkan peranan koperasi.
10. Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuan melestarikan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu dalam

mengelola hutan sebagai sumber produksi untuk memenuhi bahan baku industri dan bahan baku untuk kepentingan masyarakat, dilakukan berbagai kegiatan melalui peningkatan pengusahaan hutan produksi, penyempurnaan tata guna hutan dengan pemantapan tata batas hutan, untuk menghindari kerancuan penggunaan hutan. Dan tetap memperhatikan peranan hutan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja bagi penduduk disekitarnya.

11. Pembangunan pertanian dilakukan seiring dengan upaya rehabilitasi tanah kritis untuk memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pertanian perlu didukung dengan tata guna tanah sehingga penggunaannya, pengusahaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kelancaran dan kemudahan usaha-usaha pertanian. Sehubungan dengan itu perlu dicegah pemilikan tanah oleh perseorangan secara berlebihan, serta pembagian tanah menjadi sangat kecil sehingga tidak dapat menjadi sumber penghidupan yang layak. Dalam kaitan ini perlu diusahakan pencadangan areal memperhatikan cadangan lahan untuk pengembangan yang akan datang.
12. Untuk menunjang pembangunan pertanian perlu dilanjutkan usaha penelitian dan pengembangan serta penyuluhan dan pendidikan tenaga kerja pertanian dengan mengikutsertakan pihak swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi, sehingga usaha-usaha penyuluhan semakin terarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat petani dalam mengelola dan mengembangkan usaha pertaniannya.
13. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian keikutsertaan para petani akan ditingkatkan melalui kelompok-kelompok tani yang tergabung didalam wadah koperasi, sedangkan usaha pertanian yang lebih besar didorong agar dapat lebih memberdayakan dan mengembangkan usaha pertanian rakyat.
14. Pembangunan pertambangan dan penggalian ditujukan kepada pemanfaatan bagi pembangunan daerah serta ditujukan untuk penyediaan bahan baku bagi industri, meningkatkan ekspor non migas dalam rangka menambah devisa negara, serta memperluas kesempatan kerja. Pembangunan pertambangan dan penggalian terutama dilakukan dengan penganekaragaman hasil

tambang dan penggalian, untuk itu perlu ditingkatkan upaya inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan tambang dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

15. Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil tambang dan penggalian, baik untuk ekspor maupun bahan baku industri dalam negeri, perlu ditingkatkan produksi dan usaha pemasarannya terutama di luar negeri, serta usaha pengolahan agar dapat meningkatkan nilai tambah.
16. Pembangunan pertambangan dan penggalian akan dilakukan secara terpadu dan serasi dengan pembangunan daerah dan sektor-sektor lainnya, dan harus memperhatikan hak rakyat dan kebutuhan masa depan, kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan terhadap bencana alam.
17. Pertambangan rakyat akan diarahkan pada peningkatan pengelolaannya melalui pembinaan usaha, penyuluhan, pembinaan usaha termasuk pengembangan dan pembinaan koperasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pertambangan.
18. Penanaman modal swasta baik modal dalam negeri maupun modal asing perlu terus didorong untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah melalui penciptaan usaha yang sehat dan menarik bagi penanam modal.

2.2.4. Sosial Budaya

1. Perhatian yang menyeluruh terhadap sektor pendidikan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pada sektor pendidikan formal, akan tetapi juga lembaga pendidikan non formal, sekolah dan luar sekolah harus pula memperoleh pemberdayaan yang maksimal, sehingga potensi dan sarana pendidikan mampu memberikan penyediaan pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan.

Tanpa kecuali, cakupan pendidikan ini mulai dari pra sekolah, sekolah dasar, SLTP, hingga ke pendidikan tinggi yang ada.

2. Kondisi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Indragiri Hilir masih dalam kaitan yang sama dengan kondisi pendidikan nasional. Kondisi spesifik yang paling menonjol adalah batasan geografis yang menjadi faktor paling utama, yaitu keterbatasan aksesibilitas transportasi maupun komunikasi. Jumlah peserta didik dari tahun ketahun untuk daerah terpencil terus bertambah seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Sementara jumlah sekolah dan guru yang tersedia relatif lebih rendah. Masalah kekurangan guru tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, melainkan juga di daerah perkotaan.
3. Secara keseluruhan Indragiri Hilir memiliki sistem sekolah yang cukup memadai, namun sistem tersebut cenderung berkonsentrasi di beberapa tempat, khususnya SMP dan SMU/K. Telah cukup terbukti, bahwa pelayanan pendidikan cukup memadai, akan tetapi sarana ini tidak mencapai keseluruhan daerah pedesaan. Menyadari bahwa pendidikan merupakan basis pembangunan sumberdaya manusia pada masa datang, maka pemerintah harus melakukan perencanaan pembangunan pendidikan secara mendasar, menyeluruh dan terintegrasi, antara jenis dan jenjang pendidikan maupun dalam kaitannya dengan berbagai kepentingan serta harus dirancang secara berkesinambungan.
4. Jumlah siswa yang banyak bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajarnya. Pendidikan akan berhasil dan berdaya guna apabila dikelola dengan sistem manajemen yang baik dan tenaga pengajarnya yang berkualitas. Untuk kedepan diharapkan bagi tenaga pengajar pada pendidikan dasar tech tingkat pendidikan strata 1 dan seterusnya untuk setiap jenjang pendidikan. Perkembangan jumlah tenaga pengajar baik pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan tinggi belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.
Walaupun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada beberapa disiplin ilmu dan penumpukan disiplin ilmu pada satu sekolah. Rasio guru

terhadap siswa di peringkat sekolah dasar diharapkan sebesar 21, SLTP sebesar 2 dan SLTA sebesar 20 untuk mencapai kondisi yang ideal.

5. Untuk tetap terus meningkatkan kualitas pendidikan beberapa permasalahan yang tetap harus dijaga antara lain bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, jumlah guru yang tersebar dan masih banyak lagi yang perlu penanganan lebih serius. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa program wajib belajar 9 tahun harus menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan menurunnya jumlah angka buta huruf, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Bahkan jika keuangan daerah memungkinkan program wajib belajar 9 tahun dapat ditingkatkan dengan program wajib belajar 12 tahun berupa SPP, seragam maupun biaya sekolah lainnya secara gratis. Selain itu untuk mewujudkan generasi yang intelek, program wajib belajar 12 tahun dikembangkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi berupa program bea siswa untuk anak berprestasi yang diutamakan berasal dari latar belakang keluarga miskin.
6. Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, upaya jangka waktu angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Suatu permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, jamban keluarga pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat dalam mencapai kualitas sumberdaya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai macam program dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu

hamil dan ibu menyusui. Kesehatan dan gizi ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita usia 2 – 4 tahun cukup menggembirakan, dimana persentase yang disusui selama lebih dari 24 bulan meningkat disamping pemberian ASI tingkat kelahiran bayi dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Selain itu untuk mengurangi angka kelahiran cacat pada bayi perlu kiranya dilaksanakan program pemeliharaan dan pemberian gizi secara gratis untuk ibu hamil. Dalam rangka meningkatkan upaya pentingnya hidup sehat beberapa program telah diupayakan, salah satunya adalah penggunaan air bersih untuk minum (air kemasan, ledeng, pompa sumur dalam, sumur terlindungi dan mata air terlindungi), dan yang lebih penting adalah perubahan pada tingkat usia harapan hidup yang mencapai 70,46 tahun.

8. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperluas pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, terlantar, cacat, tuna sosial serta korban bencana alam maupun bencana sosial dan meningkatkan peran masyarakat dalam menanganinya.
9. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial termasuk perlindungan anak, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat serta penguatan kelembagaan. Peningkatan ini diharapkan juga mampu mengangkat taraf hidup bagi penduduk miskin, sehingga nantinya memperoleh penghasilan tambahan agar dapat memenuhi standar kebutuhan pokoknya.
10. Penanganan bagi penduduk miskin dilakukan melalui kegiatan keluarga muda mandiri, bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin, rehabilitasi sosial daerah kumuh dan bantuan korban bencana. Untuk penanganan kesejahteraan anak dilakukan melalui kegiatan pembinaan anak terlantar, anak putus sekolah, anak nakal dan anak jalanan.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan para penyandang cacat dalam mengurus dirinya dan mengurangi ketergantungan terhadap orang lain/keluarga serta lingkungan, upaya yang dilakukan adalah melalui pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi ekonomi. Dan kelompok masyarakat penyandang masalah tuna sosial yaitu eks narapidana dan wanita tuna sosial, dapat dikembalikan ke masyarakat dan diterima dengan baik.

11. Pembangunan agama masih dihadapkan pada gejala negatif di tengah-tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian juga kecenderungan makin lemahnya pengamalan etika dan nilai-nilai agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi dan porno aksi. Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa akhlak mulia tampak menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.
12. Pembinaan terhadap generasi muda dalam meningkatkan semangat dan rasa kebangsaan harus dilakukan. Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pendayagunaan potensi, kemampuan dan kompetensi serta sumber-sumber sosial masyarakat seperti : Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, Lembaga Perlindungan Sosial Masyarakat dan Pekerja Sosial Masyarakat serta sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam memperbaiki kualitas dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
13. Agar meningkatnya upaya penyebaran informasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat perlu dibentuk pos-pos pengendalian dan informasi atau klinik informasi kesejahteraan sosial masyarakat pada daerah yang sulit dijangkau.

14. Sisi lain adalah belum mantapnya koordinasi serta belum berkembangnya sistem pembinaan keolahragaan yang membatasi berkembangnya prestasi olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu juga tetap terus memperhatikan permasalahan yang dimiliki oleh atlet olahraga, baik itu sarana dan prasarana serta juga yang tidak kalah pentingnya masalah gizi para atlet sehingga mereka bisa berkompetisi dengan baik. Hal yang paling diharapkan adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemberian kehidupan yang layak bagi para olahragawan yang berprestasi untuk mempertahankan nama baik daerah.
15. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah gender dan pemberdayaan perempuan. Kurangnya peran serta perempuan dalam pembangunan daerah harus disikapi dengan lebih memberdayakan perempuan di semua lini dan sektor pembangunan secara aktif dan adil sehingga kaum perempuan Indragiri Hilir pada tahun 2025 nanti akan mandiri secara sosial ekonomi dan mampu berperan aktif dalam kancah politik di tingkat daerah maupun nasional.

2.2.5. Sarana dan Prasarana

1. Peran sektor transportasi dalam pembangunan memiliki arti penting dan strategis yakni untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan pemerataan pembangunan. Selain itu juga peran sektor transportasi dapat memutuskan isolasi dan keterbelakangan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang perhubungan antara lain adalah : 1) anggaran pembangunan relatif kecil; 2) terdiri dari pulau-pulau; 3) penyebaran penduduk tidak merata; 4) kesenjangan pembangunan antar wilayah, sosial ekonomi; 5) masih ada wilayah terisolir; 6) dominasi dataran rendah dan berawa gambut pasang surut (92,54%); 7) pelabuhan masih tradisional; dan 8) prasarana dan sarana pendukung pelabuhan masih kurang. Disamping itu pembangunan pelabuhan udara belum terselesaikan sebagai akibat terbatasnya sumber pembiayaan yang

tersedia, termasuk pembangunan berbagai dermaga dalam skala besar dan kecil yang belum merata di setiap wilayah.

2. Faktor pendukung peningkatan pembangunan bidang perhubungan adalah :
1) wilayah yang luas; 2) banyak anak sungai atau parit-parit; 3) sudah ada jembatan Indragiri – Mumpa – Sei. Guntung; 4) terbukanya jalan Sungai Akar – Bagan Jaya – Enok – Kuala Enok; 5) dibangunnya; 6) pos dan telekomunikasi lancar; 7) adanya kerjasama kedekatan dengan negara tetangga; dan 8) sebagai salah satu objek wisata.
3. Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari pulau-pulau, pesisir pantai, sungai-sungai, anak sungai dan parit-parit menjadikan sektor transportasi sangat dominan terutama untuk menembus isolasi daerah. Oleh karena itu investasi di sektor perhubungan ini sangat terbuka lebar, baik angkutan sungai, fery dan penyeberangan, laut, darat dan udara menjadi sangat strategis. Ancaman yang muncul dari sektor ini semakin banyaknya isolasi daerah yang tidak bisa ditembus karena terbatasnya sumber pembiayaan yang berpengaruh terhadap percepatan pembangunan kawasan pedesaan. Permasalahan tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif dan pembiayaan multi sumber untuk dana permasalahan isolasi daerah. Tingkat pencapaian keberhasilan dalam sektor perhubungan sungai dan sebagian angkutan darat belum maksimal, jenis angkutan laut dan udara masih dalam tahap pengerjaan, sedangkan jalan tol dan jaringan kereta api masih dalam tahap perencanaan.
4. Kondisi di atas perlu diantisipasi melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan pelabuhan samudera, dermaga penumpang dan barang, pelabuhan udara, terminal, jembatan penghubung antar kecamatan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pengembangan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi guna kepentingan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat.
Demikian pula dengan sumber energi dan pembangkit tenaga listrik yang semakin meningkat baik untuk keperluan industri dan rumah tangga, memerlukan sumber-sumber energi baru yang dapat memenuhi kebutuhan

pembangunan. Kebutuhan air bersih yang menjadi persoalan penting di daerah ini karena kebutuhan masyarakat lebih mengandalkan air hujan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

5. Pembangunan bidang perumahan dan pemukiman merupakan salah satu usaha yang dapat mendukung berbagai aspek pembangunan seperti sosial politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi pertahanan dan keamanan yang berkaitan antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Sejumlah kawasan pemukiman telah berkembang baik secara legal maupun ilegal (rui), namun melihat dari dinamikanya permintaan terhadap perumahan terutama untuk kelas menengah ke bawah masih memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan karena penduduk mayoritas merupakan pekerja menengah kebawah sehingga rumah-rumah tipe sederhana rating penjualannya cukup tinggi terlebih lagi yang letaknya cukup strategis dalam arti lokasinya dekat dengan kawasan tempat bekerja atau tempat pelayanan umum lainnya.
6. Terkait dengan hal di atas, permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan bidang penataan ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah :
 - Pemerintah kewalahan mengikuti tuntutan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang cenderung mengikuti pertumbuhan penduduk.
 - Belum terpenuhinya kriteria rumah sehat di kawasan pemukiman.
 - Sulitnya menata kawasan perumahan yang sudah terbentuk sejak lama terutama pada posisi ditepi sungai dan parit-parit.
 - Topografi wilayah gambut yang sulit untuk dijadikan kawasan perumahan sehingga memerlukan investasi besar dan berdampak pada harga jual rumah.
7. Faktor pendukung dalam pembangunan pemukiman diantaranya masih tersedianya lahan yang cukup luas bagi pengembangan kawasan perumahan, disamping tingginya minat masyarakat untuk memiliki perumahan dengan harga yang terjangkau. Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan ini harus diimbangi juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih dengan praktek-praktek usaha yang ramah lingkungan termasuk kompleks pasar dan pertokoan, pembuatan TPS,

dan TPA sebagai sarana pembuangan sampah, sosialisasi keluarga sadar lingkungan, lomba desa ramah lingkungan dan lain-lain.

8. Pengembangan pemukiman ini juga harus diselaraskan dengan upaya memberikan ruang yang lebih luas kepada publik berupa pembuatan taman pintar dan hutan kota.

2.2.6. Politik dan Pemerintahan

1. Politik dan Demokrasi

- a. Mengembangkan konsep kehidupan dan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi dalam masyarakat.
- b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan politik dan demokrasi dalam masyarakat.
- c. Peningkatan pemberdayaan politik masyarakat.
- d. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan terlaksananya PEMILU secara JURDIL.
- e. Penyebarluasan informasi tentang produk politik nasional dan daerah.
- f. Menciptakan kestabilan politik melalui demokrasi dan etika berpolitik.
- g. Mewujudkan hubungan yang baik antar lembaga legislatif dan eksekutif, akan semakin efektif, cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat.
- h. Perwujudan kemandirian ormas dan dapat melakukan aktifitas sebagai kontrol sosial yang profesional.
- i. Mewujudkan sistim pemantau melalui koordinasi pihak terkait cepat dan tepat serta menangkal isu negatif yang berkembang dimasyarakat.
- j. Menyediakan SDM profesional dan saran prasarana penanggulangan bencana sampai pada tingkat kecamatan.
- k. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sampai pada tingkat kecamatan dan desa.
- l. Peningkatan sarana dan prasarana organisasi BKBPPM.

2. Informasi, Komunikasi dan Media Massa

- a. Mengembangkan sistem penerangan dan media massa.
- b. Meningkatkan perangkat sistem informasi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi /NHL On Line melalui Webset.
- d. Meningkatkan profesionalisme kewartawanan, yang bebas dan bertanggung jawab.
- e. Meningkatkan profesionalisme kehumasan.
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan informasi dan komunikasi lembaga pemerintah dan swasta, media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio dan TV).
- g. Mendorong dan mengembangkan pembangunan daerah melalui pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.
- h. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi agar terwujud interoperabilitas dan interkoneksi elemen sistem informasi di berbagai sektor dan antar tingkatan pemerintah. Meningkatkan pengetahuan aparatur dan tenaga fungsional.
- i. Pengembangan dan peningkatan pembangunan daerah melalui pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.
- j. Pengembangan sistem informasi agar terwujud interoperabilitas dan interkoneksi elemen-elemen sistem informasi di berbagai sektor dan antar tingkatan pemerintah.
- k. Pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia yang berwawasan.
- l. Pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengolahan data elektronik yang akurat, aktual dan berkesinambungan.
- m. Peningkatan penguasaan terhadap sistem informasi agar terwujudnya interoperabilitas dan interkoneksi elemen-elemen sistem informasi di berbagai sektor dan antar tingkatan pemerintah.

3. Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah

- a. Merestrukturisasi kelembagaan dan deskripsi jabatan pemerintah daerah melalui SOT dan TUPOKSI sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Penataan sistim penyeleksian sesuai prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* serta penempatan aparatur berdasarkan spesifikasi dan beban jabatan berupa sistim Remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan PNS.
- c. Pengembangan aparatur melalui pelaksanaan pendidikan formal, fungsional dan penjenjangan, kursus dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai kebutuhan tugas, fungsi dan peran.
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja, sistim karier yang jelas, motivasi, harmonisasi hubungan dan suasana kerja, dan kesejahteraan aparatur.
- e. Meningkatkan disiplin dan pengawasan terhadap aparatur untuk menciptakan pemerintahan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (*Clean Governance*) yang dapat diperkuat dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat dan PNS.
- f. Pengembangan dan peningkatan manajemen kepegawaian yang profesional.
- g. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- h. Pengembangan dan peningkatan penataan kuantitas sumberdaya aparatur daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara efektif dan efisien.

4. Ketertiban, Keamanan dan Supremasi Hukum

- a. Terbinanya partisipasi masyarakat dalam hal ketahanan dan bela negara.
- b. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman.

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan melalui pengamanan swakarsa dan keamanan lingkungan.
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penanganan setiap masalah keamanan.
- e. Pengamanan berbagai aset daerah dari ancaman pencurian, penyerobotan, dan pemanfaatan secara semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
- f. Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dalam seluruh aspek yang merupakan salah satu agenda yang fundamental di alam reformasi, sehingga akan tercapai adanya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
- g. Pengembangan budaya hukum bagi masyarakat supaya terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- h. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

2.2.7. Kewilayahan

Bergulirnya isu reformasi di Indonesia, maka akan berdampak positif pada posisi pengembangan wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yakni dengan dilakukannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, bersih dan hukum ditegakkan. Sehingga jika ada penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan tata ruang kabupaten maka pemerintah dapat menegakkan aturan sesuai dengan yang berlaku di Indonesia umumnya dan Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya.

Kebijakan nasional untuk mengembangkan sumberdaya alam kelautan, kebijakan ini sangat berdampak positif bagi kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki wilayah perairan yang luas. Dalam rangka penegakan hukum yang serius, maka harus diikuti oleh peraturan yang cukup jelas dalam perencanaan

tata ruang wilayah, dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir harus menseseriusi pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata ruang ini, turunan-turunan peraturan tata ruang perlu digesa ke sifat penggunaan yang detail dan implementatif di lapangan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan penafsiran makna.

Maka dari itu kedepan untuk menjawab permasalahan di atas dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Indragiri Hilir yang telah ada saat ini, seperti misalnya terjadinya kesenjangan keruangan di Kabupaten Indragiri Hilir maka perlu dilakukan *percepatan pembangunan kawasan-kawasan tertinggal*. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah masih menyisakan sejumlah kawasan tertinggal terutama di kawasan pedesaan dan kawasan yang terisolir dengan isu pokoknya bagaimana membuka akses darat, laut, dan sungai untuk mempercepat pemerataan dan pembangunan ke kawasan-kawasan yang tertinggal dan terisolir. Meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ruang antara kawasan pedesaan kawasan tertinggal dengan pusat-pusat pemukiman perkotaan.

Mengintroduksikan fenomena pasar bebas ke kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal.

Perlu pendayagunaan ruang pesisir dan lautan, sebagian besar dari ruang wilayah Indragiri Hilir merupakan ruang pesisir dan lautan. Potensi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan lautan tersebut hingga saat ini belum dimanfaatkan dan dikembalikan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah. Dengan cara meningkatkan optimalitas pengembangan potensi sumberdaya alam pesisir dan lautan menjadi sektor/sub sektor unggulan baru bagi wilayah. Mengembangkan pola pembangunan yang juga berorientasi ke laut, melalui pendekatan pembangunan wilayah maritim (*marine development oriented*).

Kedudukan strategis Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kawasan perbatasan, disamping merupakan asset dalam pengembangan wilayah sesungguhnya juga menyimpan kerawanan serta potensi ancaman, tantangan, hambatan dan

gangguan terhadap pertahanan dan keamanan negara jika tidak dikelola dengan serius.

Maka dari itu perlu memperkuat aspek pertahanan dan keamanan sebagai kawasan perbatasan negara tersebut dalam pengembangan wilayah Indragiri Hilir, karena itu perlu diantisipasi bahaya penyalahgunaan pulau-pulau kecil (khususnya yang tak berpenghuni) untuk maksud infiltrasi dan kriminal. Perlu dilakukan sinkronisasi penataan ruang antar wilayah kabupaten sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, wilayah kabupaten selain kapasitas keuangan dan kewenangan yang lebih besar, juga akan memiliki kebebasan yang lebih luas di dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk itu perlu aspek koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota-kota sekitarnya. Fungsi RTRW kabupaten sebagai wahana penjabaran dari RTRW Provinsi menjadi sangat penting.

Sejalan dengan spirit peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang, maka keberadaan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir harus mampu menjamin adanya demokratisasi ruang bagi segenap lapisan masyarakat, mampu menciptakan peluang dan akses yang sama terhadap setiap pemanfaatan ruang, oleh sebab itu harus bersifat terbuka untuk umum. Penggunaan ruang skala besar oleh satu atau sekelompok orang perlu dihindari agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ketentuan mengenai luasan atau besaran ruang yang dikuasai dan dikelola oleh investor swasta harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah. Hampir bersamaan dengan kondisi daerah-daerah lainnya di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beberapa isu strategis yang berkembang diantaranya adalah isu tentang kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur, masalah sosial budaya dan politik, peningkatan kualitas SDM, penataan manajemen pemerintahan daerah, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan dan pembangunan kewilayahan. Uraian dari isu-isu strategis tersebut sebagaimana berikut ini.

3.1 Kemiskinan

Salah satu indikator pembangunan daerah yang cukup penting adalah kemiskinan. Dengan mengetahui seberapa besar kemiskinan telah berkurang misalnya, dapat dilihat juga seberapa besar pembangunan yang telah dilaksanakan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat ke arah yang lebih baik (tujuan pembangunan).

Konsekwensi logis yang sering dihadapi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir akibat kemiskinan adalah *basic need* masyarakat, baik yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan maupun pendidikan. Artinya bahwa implikasi lebih jauh dari kemiskinan yang dialami masyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya jaminan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi serta aspek kriminalita yang cenderung meningkat.

Selanjutnya, dengan mengetahui konsep – konsep dan pengukuran kemiskinan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat merancang strategi untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Studi kasus mengenai kegiatan pengentasan kemiskinan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan untuk program pengentasan kemiskinan tersebut.

Kriteria penduduk miskin menurut Todaro (1989), orang miskin pada umumnya adalah mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu. Paul Gleewe (1990) mengemukakan bahwa sebagian besar penduduk miskin terdapat di daerah pedesaan dan pekerjaan utama kepala keluarga adalah di sektor pertanian atau pekerja sendiri (*self employed*).

Selanjutnya Yudhoyono (2004) berpendapat bahwa rakyat miskin tersebut sebagian besar terdapat di pedesaan yang sumber kehidupan utamanya sebagian besar di sekitar pertanian, untuk mengatasi kemiskinan tersebut diperlukan pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Hasil studi yang dilakukan BAPPEDA bekerjasama dengan BPPM Fakultas Ekonomi UNRI (2004) memaparkan bahwa 44 persen masyarakat (KK) di Indragiri Hilir tergolong miskin, beberapa faktor penyebabnya adalah tingkat pendapatan yang diterima masyarakat, pendidikan, kesehatan, agama dan sosial serta aspek prasarana.

Jika kita menyimak kondisi atas permasalahan mendasar sebagai penyebab kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir, maka untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan SDM, penambahan modal investasi dan mengembangkan teknologi serta memberikan intensif dalam rangka mewujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah besar dan kompleks yang ditimbulkan oleh kondisi dan interaksi budaya, sosial, politik dan ekonomi. Karenanya strategi dan

program penanggulangannya memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, Bupati, Anggota DPRD, ORNOP, swasta dan berbagai unsur masyarakat lainnya.

Kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di desa-desa pesisir menjadikan wilayah pesisir termasuk wilayah yang rawan di bidang sosial ekonomi. Kerawanan di bidang sosial ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan yang lain.

Selanjutnya, perlu dicermati adanya fenomena kecendrungan arus migrasi yang tinggi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya akan menambah angka kemiskinan jika mereka tidak memiliki skill tinggi.

3.2 Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Otonomi daerah sebagai kereta baru dalam mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kabupaten Indragiri Hilir dan dijadikan sebagai *starting point* pembangunan yang integratif di wilayah Indragiri Hilir. Hal ini penting disadari untuk mengingat kondisi objek masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih jauh tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pelaksanaan era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, diperlukan paradigma sesuai dengan perkembangannya, yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan.

Ada beberapa kelemahan pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dengan hanya menggunakan pertumbuhan PDRB, oleh karena itu diperlukan pula beberapa indikator tambahan yakni, Human Development Index (HDI). Jadi daerah yang memiliki PDRB tinggi, belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, karena adanya beberapa kelemahan PDRB.

Untuk kompetisi yang lebih ketat diantara pelaku usaha, dunia usaha memerlukan dukungan IPTEK yang memadai dan handal. Masalah mendasar yang dihadapi para pelaku UKM adalah ekspor tidak langsung. Ini terkait dengan jarak lokasi antara sentra UKM dan pasar/ *buyer* yang sangat jauh. Ekspor dilakukan oleh para *trader* sehingga keuntungan yang diperoleh pelaku UKM relatif/ sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan para *trader*. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem/ pola perdagangan modern yang berbasis jaringan elektronik (internet). Hal ini memungkinkan perusahaan dapat melakukan aktifitas usahanya secara lebih efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun implementasi sistem perdagangan tersebut masih banyak menghadapi kendala karena belum didukung oleh sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik termasuk perangkat hukum.

Masalah yang dihadapi UKM di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:

1. Lemahnya pengawasan
2. Sumberdaya terbatas, terutama modal dan kualitas SDM
3. Kualitas pelayanan masih rendah
4. Kinerja dan etos kerja rendah, dan masih bergantung pada program pemerintah
5. Profitabilitas rendah

Permasalahan yang dihadapi pada perkembangan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah antara lain:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya pengelola koperasi dan pengusaha kecil menengah
2. Lemahnya organisasi dan manajemen pada kelembagaan koperasi
3. Terbatasnya jaringan kemitraan dan usaha koperasi
4. Terbatasnya akses pasar
5. Terbatasnya permodalan koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Sumberdaya alam merupakan potensi penting untuk mengembangkan suatu daerah. UU No.25/1999 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dari sumberdaya alam melalui mekanisme bagi hasil dan alokasi perimbangan keuangan pusat daerah lainnya. Karenanya, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus cermat dan pro aktif mengetahui sumberdaya alam yang ada di wilayahnya, serta memahami dengan baik sejauh mana sumberdaya alam tersebut berpotensi untuk menjadi motor pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, variabel seperti kondisi geografis dapat menggambarkan bagaimana topografi suatu daerah, kandungan mineral dan sebagainya.

Komposisi pemakaian lahan memberikan gambaran apakah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi perkebunan, kehutanan atau perumahan.

Walaupun berperan sebagai sektor basis dalam pembentukan struktur perekonomian daerah, kinerja sektor pertanian pada umumnya masih dilakukan secara tradisional untuk kepentingan konsumsi dan bukan untuk kepentingan produksi dalam rangka pembentukan modal. Hal ini dikarenakan sektor pertanian di daerah ini belum memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah sektro-sektor lain;

Kegiatan perikanan(pembinaan/ pemberdayaan ekonomi masyarakat/ nelayan) yang seharusnya menjadi andalan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir ternyata belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan oleh kualitas SDM dan peralatan pendukung usaha perikanan belum memadai, ketidakmampuan mengakses pasar ekspor dan berbagai faktor lain yang menyebabkan nelayan berada pada posisi lemah;

Peran dan fungsi pelayanan lembaga-lembaga keuangan (perbankan) belum sepenuhnya menjabarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pelaku ekonomi karakyatan (UKM dan Koperasi) disebabkan beragam permasalahan yang menjadi kendala dalam teknis operasional dilapangan yang serba kompleks dan dimensional dihubungkan dengan kondisi alam serta fasilitas pendukung yang berada di luar kapasitas dan kompetensi institusi yang bersangkutan;

Industri dan perdagangan, dua sektor penyedia lapangan kerja diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi belum menampakkan keadaan yang menggembirakan. Masalah yang dihadapi dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah lemahnya permodalan (mesin/ peralatan industri), keterampilan tenaga kerja belum berkembang, kurangnya kemampuan penyerapan teknologi (tidak didukung latar belakang pendidikan yang sesuai) dan spesialisasi bidang industri belum dikuasai secara baik. Di sektor perdagangan, permasalahannya meliputi kurangnya infrastruktur perdagangan (pasar/ desa).

Belum berkembangnya sektor pariwisata yang ditandai dengan rendahnya arus kunjungan wisatawan antara lain karena seluruh objek wisata belum dapat dikelola dengan baik dan profesional, terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang objek-objek wisata, menciptakan intensif-intensif bagi investor pariwisata, serta regulasi-regulasi pendukung untuk pengembangan sektor pariwisata;

Sumberdaya alam di wilayah yang terbatas dan keadaannya semakin kritis sementara sumberdaya alam laut belum dapat dikelola secara optimal karena faktor modal, peralatan, SDM serta keterbatasan dalam mengakses pasar;

Penerimaan daerah belum dapat diandalkan. Struktur penerimaan daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang diharapkan dapat menunjang pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah masih belum dapat diandalkan.

Kecilnya jumlah PMA dan PMDN yang merealisasikan investasi secara langsung ke Kabupaten Indragiri Hilir diduga karena belum terciptanya lingkungan usaha yang kondusif, belum dilakukan penyederhanaan berbagai perangkat peraturan dan formulasi sistem insentif, rendahnya kepastian hukum, terbatasnya kualitas tenaga kerja dan ketersediaan infrastruktur dasar serta prosedur perijinan investasi terlalu berbelit-belit yang tidak saja mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha.

Belum berkembangnya industri berbasis sumberdaya lokal. Industri berbasis sumberdaya lokal seperti agroindustri dan pariwisata serta produk-produknya amat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir, tetapi hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dari industri karena : (i) tidak kondusifnya kondisi-kondisi utama ekonomi makro, (ii) buruknya kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan, (iii) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi, (iv) fasilitas pengembangan industri dan (v) terbatasnya intensif-intensif yang mampu menarik investor.

Ketersediaan pangan semakin terbatas akibat meningkatnya konversi lahan pertanian produktif dan rendahnya produktifitas pertanian yang menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sangat besar. Adapun permasalahan umum tanaman pangan dan hortikultura adalah

- 1) Penyaluran sarana produksi yang sepenuhnya belum memenuhi 5 tepat (waktu, jenis, jumlah, tempat, dan kerja) dikarenakan lemahnya swadaya petani dan harga yang mahal di tingkat lapangan sehingga ketergantungan petani terhadap bantuan cukup tinggi.
- 2) Penerapan teknologi sapta usaha tani belum dapat diterapkan secara penuh antara lain disebabkan :
 - Masih luasnya lahan sawah yang belum direhabilitasi/ belum memiliki trio tata air
 - Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani.
- 3) Lemahnya posisi tawar menawar hasil komoditi pertanian disamping belum adanya jaminan harga komoditi sehingga petani selalu berada pada posisi yang lemah tetapi akibat kebutuhan ekonomi, maka petani terpaksa menjual hasil pertanian walaupun dengan harga yang kurang menguntungkan disamping komoditi pertanian tidak tahan disimpan lama.
- 4) Kebutuhan benih unggul bermutu baik padi maupun palawija belum dapat dipenuhi oleh institusi pembenihan dan penangkaran yang ada, benih yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat disalurkan yang penyebabnya antara lain tidak tercapainya ketepatan kerja, sehingga benih yang dihasilkan banyak dijadikan konsumsi oleh petani penangkar.
- 5) Terjadinya alih fungsi lahan dan tanaman pangan ke tanaman perkebunan, hal ini disebabkan tanaman perkebunan lebih mudah dalam perawatan dan tenaga kerja yang ada sudah mulai kurang produktif.

Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan ekosistem hutan serta nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan dan potensi ekonomi belum berkembang seperti yang diharapkan. Padahal, dewasa ini permintaan terhadap jasa lingkungan mulai meningkat khususnya untuk air minum kemasan, objek penelitian, wisata alam dan lain sebagainya.

Kondisi sektor riil belum menunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan serta berkelanjutan. Hingga sekarang, sektor riil belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan lemahnya investasi, rendahnya daya saing dan tingkat inflasi tinggi terutama karena faktor aksesibilitas rendah yang mengakibatkan daerah ini selalu terjebak pada masalah ekonomi biaya tinggi. Tanpa pembenahan, kondisi ini diduga akan menjadi permasalahan serius bagi Kabupaten Indragiri Hilir karena akan berdampak pada terbatasnya penciptaan peluang kerja, tingginya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta migrasi keluar penduduk.

3.3 Pembangunan Infrastruktur

Faktor infrastruktur dalam aktifitas perekonomian sangatlah penting, tanpa dukungan yang kuat dari infrastruktur, perekonomian akan sulit berkembang, mobilitas faktor produksi akan mengalami distorsi, sehingga pada gilirannya dapat menghambat kelancaran arus barang dan jasa, begitupula dengan mobilitas tenaga kerja. Selanjutnya, jika jangkauan infrastruktur yang sangat terbatas, maka potensi ekonomi yang berada di wilayah tidak bisa dimanfaatkan dan dikelola, karena aksesibilitas sangat rendah dan terbatas.

Pengembangan dan peningkatan pelayanan infrastruktur, selain bertujuan untuk pemerataan pelayanan dasar kepada masyarakat juga dimaksudkan untuk dapat menunjang serta menumbuhkan berkembang kegiatan produksi serta perputaran roda ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur jelas akan dapat membuka keterisolasian daerah, namun bila tidak disertai dengan penyadaran akan peran serta masyarakat, jelas untuk tercapai dengan optimal.

Adanya kerjasama regional dan interregional diberbagai aspek menuntut ketersediaan akan infrastruktur yang lengkap dan modern seperti jaringan jalan yang menjangkau keseluruhan wilayah, dermaga peti kemas, fasilitas bandara

dan jaringan telekomunikasi yang modern serta ketersediaan akan sumberdaya energi kelistrikan.

Adanya ancaman akibat minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktifitas sosial ekonominya kenegara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat yang tinggal diperbatasan.

Dalam hal pemenuhan akan ketersediaan air, ancaman yang dihadapi adalah menurunnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penggunaan sumber alam yang ada seperti kegiatan pertambangan galian bahan bangunan yang tidak terkontrol, pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku yang berlebihan, dll. Dalam bidang kelistrikan ancaman yang dihadapi yaitu ketergantungan akan sumberdaya energi diesel, yang diperkirakan untuk beberapa tahun kedepan tidak lagi ekonomis akibat adanya kecendrungan kenaikan harga BBM yang secara langsung mempengaruhi biaya operasionalnya.

Masalah pokok yang akan menghambat peningkatan infrastruktur di daerah ini adalah ketersediaan dukungan dana. Khusus untuk pengembangan infrastruktur sumberdaya air, masalah yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan (hutan) yang semakin luas dan berdampak pada keberlangsungan daya dukung sumberdaya air. Masalah lain yang mungkin akan muncul adalah permintaan kebutuhan pelayanan (barang, jasa, manusia) yang tidak diimbangi dengan pengembangan/ peningkatan infrastruktur perhubungan, perumahan, kelistrikan dan telekomunikasi.

Infrastruktur strategis dimaksud menghadapi permasalahan tersendiri, seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Permasalahan Pengembangan Trio Tata Air. Ketidaksinambungan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu, belum

dimanfaatkannya potensi pengembangan irigasi dan drainase, kebutuhan akan sarana irigasi skala besar mendesak, sehubungan dengan program peningkatan ketahanan pangan, meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah, kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri Hilir.

2. Permasalahan Pembangunan Pusat Pemerintahan. Belum tersedianya prasarana dan sarana perkotaan sebagai pusat pemerintahan, pemukiman penduduk belum tertata, dan belum adanya prasarana dan sarana yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah produksi (kecamatan agropolitan) dengan daerah perdagangan (pusat agropolitan).
3. Permasalahan Pembangunan Jalan Negara Lintas Provinsi. Masih terisolirnya beberapa diperbatasan dengan Provinsi Jambi potensi produk daerah belum terjadi secara optimal.

Beberapa permasalahan pembangunan ketenagalistrikan yang dihadapi untuk keperluan pemukiman masyarakat adalah biaya terlalu tinggi untuk pengembangan listrik pedesaan karena letak desa yang berjauhan dengan sumber listrik PLTD yang disediakan oleh PLN, sehingga Pemda harus mengadakan unit-unit pembangkit yang kecil di setiap desa yang dikembangkan, keterbatasan dana pada PLN, sehingga lembaga penyedia listrik secara nasional kurang mampu untuk menambah kuantitas tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu perlu juga dikembangkan unit pembangkit listrik alternatif di desa-desa, khususnya desa terpencil.

Permasalahan dalam pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi adalah, belum meratanya prasarana dan sarana sebagai akibat kondisi geografis yang luas sulit dijangkau; masih terbatasnya mekanisme kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan telekomunikasi dan masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia.

3.4 Sosial Budaya dan Politik

Adapun berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan sosial budaya dan politik di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pendidikan dan tingkat pendidikan masih relatif rendah;
2. Terbatasnya jumlah tenaga guru/ pengajar terutama di wilayah pulau-pulau;
3. Tenaga dokter, tenaga paramedis belum tersebar secara merata di daerah terpencil, karena wilayah perkotaan masih menjadi pilihan dalam bekerja;
4. Terbatasnya sarana dan peralatan puskesmas;
5. Tuntutan demokratisasi dalam kehidupan politik yang belum menjamin tatanan kehidupan demokrasi;
6. Potensi budaya yang cukup besar belum sepenuhnya mampu dikelola dengan baik;
7. Perilaku pemabukan, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, perceraian, pengrusakan lingkungan masih akan berlangsung;
8. Pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari;
9. Dari aspek budaya, potensi budaya yang cukup besar belum mampu dikelola dengan baik sehingga belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah; dan
10. Masih kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, bahasa dan solidaritas, rendahnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya taat hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang bersifat negatif dan tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
11. permasalahan umum yang nampaknya tetap menjadi prioritas di bidang kesehatan antara lain adalah rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kurangnya jumlah dan masih rendahnya mutu lembaga pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan standar medis dengan harga terjangkau, kurangnya ketersediaan sarana air bersih, belum adanya pola sistem sanitasi terpadu yang memenuhi standar kesehatan bagi lingkungan

pemukiman, lingkungan industri, dan tempat-tempat umum (*public utilities*), termasuk sistem pengolahan sampah dan limbahnya;

12. Permasalahan strategis kepemudaan dan olahraga masih dirasakan menggantal lajunya pembangunan di bidang ini; kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda dan olahraga, kurangnya pembinaan terhadap pemuda dan olahraga untuk berprestasi, kurangnya partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam pembinaan pemuda dan olahraga. Oleh karena itu, menjadi tantangan untuk membangkitkan swadana dan keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat pengusaha, untuk turut serta dalam pembangunan olahraga dalam olahraga prestasi.

3.5 Peningkatan Kualitas SDM

Pengembangan SDM tidak lain adalah memperluas horizon pilihan masyarakat. Maknanya adalah, manusia itu diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Peningkatan kualitas SDM merupakan agenda utama dalam pemberdayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahannya antara lain :

1. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian;
2. Jumlah persebaran penduduk yang belum seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan wilayah;
3. Lebih dari 70 % penduduk yang bekerja pada sektor informasi berada pada sektor pertanian;
4. Masih tingginya angka kemiskinan;
5. Rendahnya tingkat elastisitas kesempatan kerja (pertumbuhan angka kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja). Situasi ini menuntut terjadinya mobilisasi penduduk/ migrasi keluar penduduk ke wilayah perkotaan karena kota merupakan daya tarik tersendiri bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan, tingkat urbanisasi penduduk ke wilayah perkotaan karena kegiatan ekonomi dan pendidikan;

6. Kecendrungan yang terjadi di wilayah pedesaan, umumnya lapangan kerja informal yang tersedia pada sektor pertanian karena berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja itu sendiri sehingga daya serap dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi rendah; dan
7. Kebijakan dan strategis pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah belum mendukung pembangunan berkelanjutan.
8. Secara alamiah, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir akan terus bertambah, sementara luas wilayah relatif tetap. Meskipun pengendalian jumlah penduduk secara mutlak akan menjadi besar dari tahun ke tahun dan tidak lagi dapat didukung oleh lingkungan.
9. Jumlah penduduk yang meningkat dihadapkan pada keterbatasan penyediaan fasilitas sosial, menjadi sumber konflik dan dapat menghambat capaian pembangunan.
10. Kecenderungan naiknya jumlah penduduk dan tidak meningkatnya intervensi terhadap variabel-variabel penyumbang pertumbuhan yang cenderung naik.
11. Perubahan pada struktur penduduk membawa kesulitan tersendiri bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pelayanan sosial lainnya. Jika hal ini tidak cukup memadai maka akan menghadirkan kerawanan-kerawanan sosial yang dapat digiring ke kerawanan politik.
12. Dalam era globalisasi ini, tidak ada satu daerah pun yang dapat mengembangkan kebijaksanaan daerah tertutup. Nilai-nilai sosial akan mengalami perubahan ke arah yang terbuka dan mengancam pembangunan.
13. Permasalahan timbul karena besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja menuntut tersedianya kesempatan kerja yang besar. Dipihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri untuk mampu menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih tinggi. Lapangan kerja datang dari

pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan lapangan kerja yang besar.

14. Sempitnya lapangan kerja lokal menyebabkan banyak penduduk melakukan migrasi ke tempat lain meskipun lapangan kerja bagi mereka relatif terbatas karena rendahnya kualitas yang dimiliki. Dalam aspek kuantitas penduduk, berhasil dikendalikan sedangkan dari aspek kualitas penduduk, menunjukkan kecenderungan rendah.
15. Persebaran dan mobilisasi penduduk berkaitan secara timbal balik dengan proses pembangunan yang terjadi di daerah apabila konsentrasi penduduk menurut sebaran tidak terkendali. Akan timbul berbagai persoalan lingkungan sosial seperti lingkungan kumuh, masalah kriminalitas, kemiskinan dan lain sebagainya yang dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan dapat diatasi melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan dengan strategi pembangunan yang bertumpuh pada pertumbuhan ekonomi.

3.6 Masalah Penataan Manajemen Pemerintahan Daerah

Sejak diterapkannya kebijakan ini dalam pembangunan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir, berbagai penataan kelembagaan secara intensif telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tanggapan terhadap pembentukan daerah otonomi baru dan tuntutan perkembangan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun demikian, birokrasi belum mengalami perubahan mendasar dan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Permasalahan-permasalahan yang sedemikian kompleks makin menuntut kesiapan aparatur untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat dan pelayanan yang berkualitas. Beberapa dari sejumlah permasalahan-permasalahan itu antara lain ; (i) reformasi birokrasi belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat, (ii) masih ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum jelas, (iii) kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan negara

tetangga masih rendah, (iv) penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah belum efektif dan efisien, (v) kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terbatas dan tergolong rendah, (vi) kapasitas keuangan pemerintah daerah masih terbatas, (vii) konsep pembangunan wilayah kepulauan masih bersifat kontinental dan cenderung *inward looking*.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Permasalahan-permasalahan ini belum sepenuhnya dapat diatasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dampak ini terkait dengan meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik, ketaatan hukum dan pelimpahan tanggung jawab, serta tingginya tuntutan pelimpahan kewenangan dan pengambilan keputusan. Secara internal, berbagai permasalahan yang sedang dihadapi adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, praktek KKN, rendahnya kinerja SDM dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan belum memadai, efisiensi dan efektifitas kerja yang masih rendah, kualitas pelayanan umum belum optimal dan banyak peraturan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Cakupan wilayah pemerintahan yang luas apalagi di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari daerah yang dipisahkan oleh parit-parit menyebabkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan tidak efektif yang berakibat pada ketertinggalan wilayah ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Riau. Masih banyak kewenangan daerah yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang belum disesuaikan dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memicu berbagai permasalahan seperti dalam hal kewenangan antara pusat, provinsi dan Kabupaten/ kota yang mengakibatkan berbagai konflik antara berbagai pihak dalam penerapan berbagai aturan.

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama pemerintah daerah dengan negara tetangga masih tergolong rendah terutama dalam penyediaan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan daerah, pemanfaatan sumberdaya secara bersama, kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, perkebunan dan perikanan termasuk dalam pengelolaan pasca panen dan lainnya.

Umumnya struktur organisasi pemerintah daerah masih besar dan tumpang tindih. Disamping itu, prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan belum ada standar pelayanan minimum. Hubungan kerja antar lembaga seperti pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan organisasi non pemerintah belum optimal.

Sumberdaya dan kapasitas aparatur pemerintah daerah masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan aparatur pemerintah daerah dari segi jumlah maupun profesionalisme, terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah serta tidak proporsionalnya distribusi yang menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak ada kepastian waktu, tidak transparan dan kurang responsif terhadap permasalahan pembangunan di daerah. Disamping itu sistem dan regulasi yang memadai dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah.

Kapasitas keuangan daerah masih terbatas yang ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan

daerah, belum efisiensinya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional serta terbatasnya kemampuan pengelolaan termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalisme.

3.7 Masalah Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

Terus menurunnya kondisi hutan. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian nasional tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia.

Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Praktik penebangan liar dan konversi lahan menimbulkan dampak yang luas, yaitu kerusakan ekosistem dalam tatanan DAS. Kerusakan DAS tersebut juga dipicu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaan yang masih lemah. Hal ini

akan mengancam keseimbangan ekosistem secara luas, khususnya cadangan dan pasokan air yang sangat dibutuhkan untuk irigasi, pertanian, industri, dan konsumsi rumah tangga.

Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai timur Kabupaten Indragiri Hilir. Rusaknya habitat ekosistem seperti deforestasi hutan mangrove telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi yang disebabkan oleh kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi tanah. Disamping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian yang airnya dialirkan melalui Sungai Indragiri. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (*illegal fishing*) serta penambangan masih terjadi yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.

Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. Sejak tahun 1970-an hutan telah dimanfaatkan sebagai mesin ekonomi melalui ekspor log maupun industri berbasis kehutanan. Sistem pengelolaan hutan didominasi oleh pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) kepada pihak-pihak tertentu secara tidak transparan tanpa mengikutsertakan masyarakat setempat, masyarakat adat, maupun pemerintah daerah. Kontrol sosial tidak berjalan, kasus KKN marak, dan pelaku cenderung mengejar keuntungan jangka pendek sebesar-besarnya. Pada masa yang akan datang,

sistem pengelolaan hutan harus bersifat lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang memperhatikan aspek ekonomi-sosial-lingkungan secara bersamaan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyeludupan kayu. Tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan. Kasus tebang berlebih (*over cutting*), pembalakan liar (*illegal logging*), penyeludupan kayu ke luar negeri, dan tindakan ilegal lainnya yang banyak terjadi. Selain penegakan hukum yang lemah, juga disebabkan oleh aspek penguasaan lahan (*land tenure*) yang sarat masalah, praktik pengelolaan hutan yang tidak lestari, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

Kepentingan pencapaian target sektoral sehingga sering muncul overlapping pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan antarsektor di daerah ini, seperti kehutanan, perkebunan dan pertanahan. Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain.

Sumber dana yang kurang memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun diakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup. Selain dana, kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan SDA dan lingkungan masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat daerah) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.

Eksplorasi sumberdaya alam, terutama hutan, masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Logging, termasuk illegal logging hanya menguntungkan sebagian pihak, aspek lingkungan hidup diabaikan.

Lemahnya implementasi peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan.

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

3.8 Pembangunan Kewilayahan

Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Berbagai keluhan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan tingkat kesulitan manajemen pemerintahan mengingat Kabupaten Indragiri Hilir memiliki empat karakteristik utama yang secara signifikan mempengaruhi perumusan dan implementasi berbagai kebijakan percepatan pembangunan yaitu sebagai Daerah Tertinggal dan Miskin.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain:

1. Masih terdapat kesenjangan (*disparitas*) pembangunan antar kecamatan yang ditandai dengan adanya kecamatan-kecamatan tertinggal.
2. Perhatian pembangunan kawasan perbatasan yang belum menitik beratkan pendekatan kesejahteraan.
3. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
4. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi, dan energi, serta keterisolasian daerah.
5. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dll) serta rawan konflik sosial.
6. Adanya konflik kepentingan antar-sektor, seperti kehutanan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya.
7. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang Kabupaten dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor.
8. Adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan, inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan karena belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRK masing-masing kecamatan.
9. Kurangnya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang.
10. Belum sepenuhnya rencana tata ruang dijadikan acuan bagi pembangunan nasional dan pengembangan wilayah dan belum sepenuhnya rencana tata ruang dijadikan usaha preventif dalam proses pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju.

12. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh.

Hal ini disebabkan antara lain:

- a) Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
- b) Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
- c) Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
- d) Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
- e) Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- f) Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
- g) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumberdaya dan masih terbelakang.

13. Keterkaitan antar kecamatan dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak diantaranya yang berdiri sendiri, atau bahkan saling merugikan. Akibat nyata dari kesemua hal tersebut adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan.
14. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, dengan kota-kota menengah dan kecil. Pertumbuhan yang terjadi masih bertumpu di kecamatan Tembilahan, sedangkan pertumbuhan kecamatan-kecamatan lain berjalan lambat. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali.

BAB 4

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Berdasar kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka visi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka, adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjanjikan bagi masa depan daerah dan masyarakatnya yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayah jauh lebih berpotensi.

BERJAYA adalah suatu keberhasilan dalam mencapai keadaan yang lebih baik, makmur, adil dan sejahtera sebagai sebuah prestasi disegala bidang, baik secara fisik dan mental spiritual, maupun jasmaniah dan rohaniah melalui ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan secara bersama-sama dan seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Indragiri Hilir dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, nilai kebudayaan Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, nilai dan norma hukum yang berlaku.

GEMILANG sebagai sebuah kemajuan yang hebat akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis, dan konseptual antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders*, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin daripada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang. Disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

4.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainable*).

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruhan wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya; adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan teals dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional; adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang berjaya dan gemilang sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

5.1.1 Mewujudkan daya saing daerah , ditunjukkan oleh:

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mantap sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp. 47.935.827,93 atau sekitar US\$ 5.000,- (dengan asumsi kurs Rp. 9.600/US\$) dengan tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin paling tinggi 15%.

1. Meningkatnya mutu sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Index Pembangunan Manusia (IPM), dan seimbanginya laju pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, prasarana dan sarana infrastruktur yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh dengan berbasis pada ekonomi masyarakat dan potensi sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas dan agroindustri, menjadi basis kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan efektif serta mampu menghasilkan produk yang merupakan turunan

dari produk-produk pertanian berkualitas dengan harga kompetitif sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan jasa.

3. Tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi disamping meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, juga mampu membuka dan mengembangkan seluruh wilayah serta potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Tersedianya pasokan dengan jaringan yang dapat diandalkan untuk menjadi penggerak kegiatan ekonomi terutama yang berskala besar. Serta terkelolanya sumberdaya air dan lahan secara efisien dan efektif yang berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan produktifitas pertanian.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab, serta profesional yang mampu melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkualitas.

5.1.2 Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, yang ditunjukkan oleh:

1. Terwujudnya suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
2. Terwujudnya upaya penegakan hukum yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, konsisten, berkelanjutan dan adil sehingga memberikan jaminan dan kepastian terhadap suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban yang pada akhirnya memberikan daya tarik tersendiri terhadap daerah.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, demokratis, profesional, taat azas dan taat hukum, yang dapat diukur dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan keberhasilan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
4. Terwujudnya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis, aspiratif, dan akomodatif dengan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai budaya.

5.1.3 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;

Adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruhan wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

5.1.4 Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya;

Adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

5.1.5 Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional;

Merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

5.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah

5.2.1 Arah Kebijakan RPJM I (2005-2010)

Pembangunan menengah pertama diarahkan untuk memberikan dasar bagi kebijakan perbaikan kondisi perekonomian dan infrastruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan jangka panjang. Tahapan yang dijalankan adalah memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan, perbaikan infrastruktur pertanian, kembali, mengaktifkan keluarga berencana dan penglibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan daerah.

Struktur ekonomi mulai lebih merata dengan semakin besarnya peranan sektor non-pertanian di dalam pembentukan output daerah, munculnya industri-industri pengolah hasil pertanian, dan terbukanya kesempatan masyarakat di dalam mengakses lembaga keuangan. Indeks pembangunan manusia diarahkan semakin baik melalui peningkatan partisipasi anak sekolah, pengurangan angka buta huruf, penyediaan prasarana pembelajaran dan pendirian sekolah menengah kejuruan yang membantu menciptakan peluang berusaha di masyarakat. Angka

pesakitan untuk endemi harus diturunkan melalui program-program pembangunan kesehatan seperti penanganan demam berdarah, malaria dan penyakit kulit serta ISPA.

Prediksi Umum

1. Kemiskinan menurun menjadi	27,11%
2. PDRB per kapita nominal	Rp. 10.749.326,92
3. PDRB nominal	Rp. 7.339,65 milyar
4. Pertumbuhan investasi	10%
5. Penduduk	682.801 orang
6. Angkatan kerja	300.442 orang
7. Bekerja di sektor pertanian	76,97%
8. Rasio murid : guru SD	22
9. Rasio siswa : guru SLTP	29
10. Rasio siswa : guru SLTA	21

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Menerapkan sistim pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
2. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti iptek, SDM, Kelembagaan dan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak
4. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten
5. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan

6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli lingkungan hidup
7. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten
8. Menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut disertai dengan penegakan hukum

Demografi

1. Peningkatan pendidikan penduduk kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dengan menciptakan satuan-satuan pendidikan non-formal terutama berkaitan dengan pendidikan penduduk yang berkualitas rendah
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan pelayanan Keluarga Berencana
3. Penyempurnaan berbagai program yang berkaitan dengan migrasi internal penduduk karena kurangnya kesempatan kerja dalam daerah

Ekonomi dan Sumberdaya Alam

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita sebesar Rp.10.749.327
2. Meningkatnya pengelolaan sumber keuangan daerah
3. Mengarahkan kebijakan dan strategi pengembangan UKM dan Koperasi
4. Pengembangan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemauan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif serta non diskriminatif
5. Pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor

6. Mengarahkan kebijakan dan strategi pengembangan industri daerah yang lebih terfokus dan rinci dengan memperhatikan strategi pengembangan sub-sektor industri terkait dan sub-sektor industri penunjang pada industri-industri unggulan daerah yang berdimensi jangka menengah dan panjang dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi dalam perumusannya
7. Mengarahkan pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah seperti industri produk turunan hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat
8. Penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak tepat
9. Pengembangan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan
10. Peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya
11. Menyusun dan menetapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang
12. Menyusun dan menetapkan strategi bisnis di daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang proinvestasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistim dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah
13. Penguatan sistim pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian melalui penyuluhan untuk mendukung pengembangan agro industri

14. Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dengan menggunakan teknik yang lebih baik dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan
15. Pengembangan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan khususnya di wilayah pesisir hingga wilayah perairan sejauh 12 mil
16. Mendorong pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memfasilitasi dan membantu bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, pemasaran, dan ketenagakerjaan
17. Mendorong intervensi pemerintah secara langsung dalam bentuk pelayanan publik khususnya pada mekanisme pasar yang tidak dapat berfungsi seperti penelitian dan pengembangan untuk pembaharuan dan inovasi teknologi produksi, pengembangan manajemen produksi yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, layanan Informasi pasar produk dan faktor produksi, pengembangan fasilitas untuk memanfaatkan aliran masuk sumber alih teknologi dan perluasan pasar ekspor
18. Pengembangan sektor pariwisata yang meliputi pengembangan dan pengelolaan objek-objek wisata secara lebih profesional dengan menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, bersinergi, dan terintegrasi sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah

Sosial Budaya

1. Pengembangan pendidikan dasar dan menengah berbasis budaya, sumber daya lokal dan kebutuhan lokal
2. Pembangunan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis potensi daerah, pengembangan fasilitas persekolahan, pengadaan tenaga guru/pengajar dan revitalisasi institusi pendidikan

3. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Indragiri Hilir dengan prioritas pada Kecamatan tertinggal
4. Meningkatkan pemerataan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (dokter, tenaga paramedis) di Kecamatan tertinggal, pengembangan dan pengadaan fasilitas puskesmas serta peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
6. Meningkatkan perluasan, pemerataan, dan mutu pendidikan melalui jalur formal dan non formal untuk umum maupun kejuruan
7. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak
8. Upaya pembinaan pemuda dan olahraga untuk pencapaian prestasi dan melibatkan pihak swasta di dalam pembinaan
9. Upaya penguatan Kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusan keutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender
10. Upaya pengembangan perangkat hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga
11. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
12. Mengembangkan sistem informasi dan database bidang kebudayaan
13. Meningkatkan kualitas SDM pendidik agama serta jumlah pendidik agama di segala jenjang lembaga pendidikan
14. Meningkatkan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya
15. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya

16. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya

Sarana dan Prasarana

1. Upaya penanganan wilayah pantai dan wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan yang saat ini merupakan jalan tanah, kerikil menjadi jalan aspal
3. Terbangunnya jaringan telekomunikasi via satelit di desa-desa terpencil dan pulau-pulau dan adanya rintisan pengembangan jaringan pembangkit listrik desa mandiri
4. Meningkatnya pelayanan pelabuhan rakyat
5. Bertambahnya jumlah armada angkutan sungai dan penyeberangan perintis dari pihak pemerintah maupun pihak swasta untuk merangkai kawasan-kawasan pulau dan parit dan merintis jalur penerbangan dengan Kota Pekanbaru
6. Upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan transportasi jalan angkutan umum dalam kota serta bertambahnya rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan kabupaten dan kota
7. Merintis penelitian dan pengembangan sumberdaya energi alternatif berbasis nabati
8. Upaya percepatan peningkatan sarana prasarana air bersih di daerah-daerah krisis air bersih
9. Peningkatan kualitas pemukiman dan lingkungan komunitas perumahan yang sehat dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah
10. Penyiapan sarana dan prasarana sanitasi / MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan

Politik dan Pemerintahan

1. Mengembangkan organisasi partai politik untuk pembentukan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik.
2. Mengembangkan organisasi masyarakat sipil (civil society organization) sebagai pembawa aspirasi politik masyarakat.
3. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/ aspirasi masyarakat.
4. Menerapkan proses demokratisasi dalam proses PILKADA Bupati / Wakil Bupati pertama secara langsung di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Melakukan reformasi perilaku dan organisasi birokrasi dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan daerah yang baik (good local governance) di tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
6. Memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dan antara pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan daerah provinsi tetangga dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
8. Menerapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan, efektif, efisien dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pemerintahan.

10. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
11. Mengembangkan konsep pembangunan yang menyesuaikan dengan wilayah kepulauan.

Kewilayahan

1. Penataan persebaran penduduk yang seimbang di tiap wilayah berdasarkan kecamatan.
2. Mengarahkan kebijakan dan strategi pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan).
3. Pengembangan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS.
4. Mendorong percepatan pembangunan melalui pengembangan kawasan - kawasan cepat tumbuh dan sentra-sentra industri.
5. Rampungnya jalan penghubung dengan Provinsi Jambi yang diikuti dengan bertambahnya ruas jalan provinsi dan jalan negara.
6. Mempersiapkan pemekaran wilayah.
7. Menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) kabupaten.

5.2.2 Arah Kebijakan RPJM II (2010-2015)

Arah pembangunan menengah kedua adalah melanjutkan berbagai kebijakan pembangunan menengah pertama dan juga diarahkan untuk memenuhi target yang dijabarkan di dalam RPJP. Tahap ini ekonomi masyarakat masih berasaskan

sektor pertanian, baik di dalam pembentukan output daerah maupun di dalam penyerapan tenaga kerja. Sumberdaya alam yang melimpah akan semakin menyusut seiring pemanfaatannya pada periode sebelumnya, maka pada tahap ini sudah harus diwujudkan intensifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan. Pertanian diarahkan untuk memenuhi ketahanan pangan dan juga agribisnis yang dapat menaikkan derajat ekonomi masyarakat. Perikanan tangkap semakin jauh jangkauannya, tidak terbatas di sekitar laut dangkal tetapi kearah tengah, maka pada tahap ini pembangunan perikanan dijalankan melalui pemberian intensif kepada usaha perikanan modern dan juga perikanan budidaya.

Di sektor kesehatan, diwujudkan jaminan kesehatan masyarakat melalui penglibatan di dalam asuransi kesehatan dan sosial. Angka pesakitan penyakit menular dan endemi ditekan ke tingkat terendah melalui penyuluhan dan penyediaan pelayanan kesehatan yang murah dan merata. Aspek-aspek sosial kemasyarakatan semakin diperhatikan dengan melibatkan kelompok kemasyarakatan diberdayakan, untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan alami dan buatan serta pelestarian adat istiadat yang bernilai tinggi.

Partisipasi masyarakat di dalam berpolitik semakin besar melalui keikutsertaan di dalam pemilihan anggota legislatif dan pimpinan nasional serta daerah. Penyelenggaraan pemerintah semakin transparan dan akuntabilitas pelaksana pemerintahan semakin tinggi melalui pendidikan dan pelatihan birokrat daerah, dan semakin jelasnya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Prediksi Umum

1. Kemiskinan menurun menjadi	23,07%
2. PDRB per kapita nominal	Rp. 17.693.258,54
3. PDRB nominal	Rp. 13.014,63 milyar
4. Pertumbuhan investasi	12%
5. Penduduk	735.570 orang

6. Angkatan kerja	323.820 orang
7. Bekerja di sektor pertanian	73,26%
8. Rasio murid : guru SD	21
9. Rasio siswa : guru SLTP	27
10. Rasio siswa : guru SLTA	20

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Melanjutkan upaya pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Menetapkan upaya penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti meliputi iptek, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitas ekosistem yang rusak.
3. Melanjutkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitas ekosistem yang rusak.
4. Memantapkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten.
5. Melanjutkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
6. Membina kesadaran masyarakat agar peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
7. Membina koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
8. Melanjutkan penerapan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut disertai dengan penegakan hukum.

Demografi

1. Meningkatnya status sosial masyarakat/kesejahteraan masyarakat.
2. Terwujudnya penduduk yang sehat 2015 sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan.
3. Tercapainya pengendalian mobilitas penduduk yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Ekonomi dan SDA

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita sebesar Rp. 17.693.259.
2. Perbaikan pengelolaan sumber keuangan daerah.
3. Pengembangan kuantitas UKM dan Koperasi.
4. Melanjutkan upaya pengembangan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif serta non diskriminatif.
5. Melanjutkan upaya pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor.
6. Pengembangan sistim perekonomian dengan sektor industri berbasis sumber daya lokal sebagai motor penggerak utama.
7. Pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah seperti industri produk turunan hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat.
8. Penerapan langkah-langkah peningkatan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat.

9. Memantapkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.
10. Melanjutkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
11. Menerapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang.
12. Menerapkan strategi di daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang proinvestasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan institusi, sistim dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah.
13. Memantapkan sistim pemasaran dan manajemen usaha pertanian melalui penyuluhan untuk mendukung pengembangan agroindustri.
14. Mengembangkan budidaya pertanian modern dengan teknologi tepat guna dan usaha non pertanian di perdesaan yang ramah lingkungan.
15. Percepatan pengembangan usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan iptek, prasarana dan sarana yang memadai.
16. Meningkatkan keterlibatan pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memfasilitasi dan membantu bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, modal kerja, informasi, pemasaran, dan ketenagakerjaan.
17. Meningkatkan intervensi pemerintah secara langsung dalam bentuk investasi melalui penelitian dan pengembangan.
18. Pembenahan dan penguatan institusi-institusi pemerintah yang terkait dengan pariwisata, penguatan sektor swasta yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pariwisata serta penyusunan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata.

Sosial Budaya

1. Penyediaan Sarana pendidikan, Sekolah Menengah Tingkat Menengah, terutama di kecamatan-kecamatan tertinggal.
2. Meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pengembangan pendidikan dasar dan menengah berbasis budaya, sumber daya lokal dan kebutuhan lokal dan pengembangan fasilitas persekolahan.
3. Penerapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun.
4. Melanjutkan upaya pemerataan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Meningkatkan status kesehatan masyarakat antar kecamatan.
6. Melanjutkan upaya perluasan, pemeratan, dan mutu pendidikan melalui jalur formal dan non formal untuk umum maupun kejuruan.
7. Melanjutkan upaya peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak.
8. Melanjutkan pembinaan pemuda dan olah raga untuk pencapaian prestasi dan menguatkan keterlibatan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di dalam pembinaan.
9. Melanjutkan upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengurus utamaan gender dan anak.
10. Menerapkan perangkat hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
11. Melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
12. Melanjutkan upaya pengembangan sistim informasi dan database bidang kebudayaan.
13. Memantapkan pembinaan agama pada tingkat keluarga dan sekolah.
14. Melanjutkan upaya pengembangan sistim informasi dan database bidang kebudayaan.

15. Memantapkan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya.
16. Melanjutkan upaya pelibatan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Sarana dan Prasarana

1. Bertambahnya tanggul pengaman pantai untuk melindungi wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang
2. Terbukanya jalan ke pelosok desa-desa terpencil
3. Terbukanya jaringan internet di setiap ibukota kecamatan dan terbangunnya beberapa jaringan pembangkit listrik mandiri
4. Pelabuhan perikanan yang ada sudah dapat berperan sebagai pusat pemasaran dan pengolahan hasil tangkapan ikan di seluruh kecamatan
5. Terbuka jalur penerbangan dengan kota Pekanbaru
6. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan, kenyamanan, keselamatan transportasi jalan angkutan umum dalam kota serta bertambahnya rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan kabupaten dan kota
7. Melaksanakan penelitian sumberdaya energi alternatif berbasis nabati
8. Bertambahnya sarana prasarana air bersih di daerah-daerah krisis air bersih
9. Rintisan pembangunan pemukiman melalui pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat
10. Pembangunan sarana dan prasarana sanitas / MCK yang memadai dan memenuhi standar kesehatan.

Politik dan Pemerintah

1. Meningkatkan pengembangan organisasi partai politik untuk peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan politik
2. Meningkatkan pengembangan organisasi masyarakat sipil (civil society organization) sebagai pembawa aspirasi politik masyarakat
3. Melanjutkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat
4. Melanjutkan upaya penerapan demokratisasi proses PILKADA
5. Melanjutkan penataan dan peletakan dasar-dasar Tata Pemerintahan yang baik
6. Melanjutkan upaya penetapan kewenangan antar tingkat pemerintah baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai panggalian sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Memperluas cakupan kerjasama dan kualitas kerjasama antar pemerintah daerah dan antara pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan provinsi tetangga
8. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan, efektif, efisien dan meningkatkan pelayanan publik yang bermutu
9. Mengupayakan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua kecamatan
10. Meneruskan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana

dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah

11. Merencanakan dan merealisasikan pembangunan yang berwawasan kepulauan

Kewilayahan

1. Tersedianya infrastruktur untuk pelayanan pendidikan dan kesempatan kerja tiap kecamatan
2. Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan)
3. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS
4. Meningkatkan kapasitas kawasan cepat tumbuh dan sentra-sentra industri melalui peningkatan infrastruktur
5. Peningkatan ruas jalan Kabupaten dan jalan lingkar Tembilahan diikuti penambahan ruas jalan provinsi dan jalan Negara
6. Memekarkan wilayah yang memenuhi persyaratan
7. Menyempurnakan RUTW kabupaten dan persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang Kecamatan (RTRK) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

5.2.3 Arah Kebijakan RPJM III (2015-2020)

Kebijakan pembangunan pada jangka menengah kedua dilanjutkan dengan semakin memperluas pemerataan hasil-hasil pembangunan dan penyediaan prasarana yang merangsang pemodal masuk serta aksesibilitas yang semakin baik. Walaupun sektor pertanian pada tahap ini masih dominan, tetapi lebih di arahkan kepada komoditi ketahanan pangan dan agribisnis untuk meningkatkan daya masyarakat di pedesaan. Industri kecil dan menengah yang telah ada di

dorong untuk lebih berdaya saing dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang semakin baik dan harga yang kompetitif.

Sumberdaya pesisir dan payau semakin ditingkatkan pemanfaatannya dengan tetap menjaga ekosistem. Sistem transportasi perairan masih menjadi sarana utama masyarakat pesisir dan didukung dengan penyediaan infrastruktur yang lebih baik sehingga penyaluran hasil bumi masyarakat menjadi lebih efisien serta penyaluran produk industri dari luar lebih mudah guna mendukung penyediaan alat modal bagi masyarakat.

Suasana harmonis di dalam masyarakat dipertahankan dengan tidak mengurangi kesempatan masyarakat luar untuk menjalankan aktivitasnya di daerah ini. Keberagaman masyarakat dijadikan satu modal dasar di dalam pembangunan masyarakat dengan menjunjung tinggi adat budaya melayu serta norma agama yang dapat menyaring nilai-nilai budaya luar yang tak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian perubahan yang terjadi di masyarakat mampu membawa kesejahteraan yang lebih baik, dengan gesekan budaya yang minim.

Prediksi Umum

1. Kemiskinan menurun menjadi	19,04 %
2. PDRB per kapita nominal	Rp.29.122.852,59
3. PDRB nominal	Rp.23.077,47 milyar
4. Pertumbuhan invstasi	15%
5. Penduduk	792.418 orang
6. Angkatan kerja	349.018 orang
7. Bekerja di sector pertanian	67,88%
8. Rasio murid: guru SD	21
9. Rasio siswa: guru SLTP	26
10. Rasio siswa: guru SLTA	20

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Memantapkan upaya pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta pengawasan dan penegakan hukum
2. Menyempurnakan upaya penguatan kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan seperti meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan
3. Memantapkan upaya konservasi laut dan pesisir serta merehabilitasi ekosistem
4. Menyempurnakan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten
5. Memantapkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan
6. Memantapkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
7. Memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten
8. Memantapkan penerapan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut

Demografi

1. Terwujudnya penduduk dan keluarga kecil berkualitas
2. Meningkatkan kualitas masyarakat (kualitas kesehatan, gizi, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan)
3. Terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dengan pertumbuhan penduduk

Ekonomi dan SDA

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 29.122.853
2. Pemantapan pengelolaan sumber keuangan daerah
3. Pemantapan upaya pengembangan UKM dan koperasi yang berkualitas
4. Pemantapan kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif dan non diskriminatif
5. Memantapkan pengembangan perdagangan dan industri dengan mengutamakan pengembangan industri daerah berbasis sumber daya lokal yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi pengembangan ekspor
6. Memantapkan pengembangan sistim perekonomian dengan sektor industri berbasis sumber daya lokal sebagai motor penggerak utama
7. Memantapkan upaya pengembangan industri daerah berorientasi nilai tambah
8. Pemantapan daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat
9. Menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan
10. Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan baik melalui pengembangan industri pengolahan skala industri rumah tangga dalam bentuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dalam rangka memperkuat industri perikanan dan kelautan
11. memantapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang

12. Memantapkan kondisi daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang pro-investasi dan bisnis, pro-lingkungan melalui penataan instusi, system dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah
13. Penyempurnaan system pemasaran dan manajemen usaha pertanian melalui penyuluhan untuk mendukung pengembangan agroindustri
14. Pengembangan nilai tambah industri berbasis sumber daya alam. Sehubungan dengan peningkatan basis produksi, pengembangan berbagai kegiatan produksi perikanan, dan perkebunan dan tanaman pangan, serta mengembangkan basis produksi kegiatan non-pertanian modern di wilayah-wilayah pedesaan
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya perikanan dan kalautan serta pengembangan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan melalui pengembangan usaha, investasi dan pemasaran hasil laut dan ikan
16. Memaksimalkan bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menangani bisnis yang masih diperhadapkan dengan kendala-kendala internal dan eksternal seperti manajemen, teknologi, model kerja, informasi, pemasaran dan keternagakerjaan
17. Menerapkan strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi
18. Memantapkan kapasitas institusi-institusi pemerintah yang terkait langsung dengan pariwisata, penguatan sektor swasta yang berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pariwisata serta penyusunan regulasi-regulasi yang mendukung pembangunan pariwisata

Sosial Budaya

1. Penyediaan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas terutama di kecamatan tertinggal

2. Melanjutkan peningkatan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memantapkan pengembangan fasilitas persekolahan
3. Memantapkan Penerapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
4. Memantapkan upaya pemerataan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Pembangunan Puskesmas di wilayah pulau kecil dan desa terpencil serta melanjutkan peningkatan status kesehatan masyarakat antar kecamatan
6. Memantapkan upaya perluasan, pemerataan, dan mutu pendidikan melalui jalur formal dan non formal untuk umum maupun kejuruan
7. Pemantapan upaya peningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak
8. Memantapkan pembinaan pemuda dan olahraga untuk pencapaian prestasi dan menguatkan keterlibatan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di dalam pembinaan
9. Memantapkan upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
10. Melanjutkan upaya penguatan hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga
11. Memantapkan kesejahteraan dan perlindungan anak
12. Menyempurnakan upaya pengembangan sistim informasi dan bidang kebudayaan
13. Semakin mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan budaya
14. Memantapkan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya
15. Penyebaran SDM pengelola kekayaan budaya
16. Mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya

Sarana dan Prasarana

1. Peningkatan pengaman pantai untuk melindungi wilayah-wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang (trio tata air)
2. Terjadi peningkatan mutu jalan ke pelosok desa-desa terpencil
3. Meningkatnya kapasitas daya listrik di semua wilayah
4. Mantapnya sistim pelayanan di semua pelabuhan yang didukung dengan lengkapnya fasilitas pendukung kepelabuhan (di semua kecamatan)
5. Merintis jalur angkutan penyeberangan dan udara dengan luar negeri
6. Memantapkan kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan, keselamatan transportasi jalan angkutan umum dalam kota serta bertambahnya rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan kabupaten dan kota
7. Pengembangan hasil penelitian sumberdaya energi alternatif berbasis nabati
8. Pemantapan tata sistim pengelolaan sumberdaya air
9. Terbangunnya kawasan pemukiman yang sehat rumah susun di wilayah padat penduduk
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi dan memenuhi standar kesehatan

Politik dan Pemerintahan

1. Memantapkan organisasi partai politik sebagai pembentuk kesadaran politik melalui sosialisasi dan pendidikan politik
2. Mengembangkan kemampuan manajemen organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) sebagai pendorong demokratisasi
3. Menyempurnakan partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintah / pembangunan karena tanpa partisipasi

masyarakat tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan / aspirasi masyarakat

4. Memantapkan upaya penerapan demokratisasi dalam proses PILKADA
5. Memantapkan implementasi Tata Pemerintahan yang baik
6. Menuntaskan upaya pembagian kewenangan antar tingkat pemerintah baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang di dukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Memantapkan upaya dan cakupan serta kualitas kerjasama antar pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi tetangga
8. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan, efektif, efisien dan meningkatkan pelayanan publik yang bermutu
9. Memantapkan kualitas aparatur pemerintah daerah di semua kecamatan
10. Menyempurnakan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah
11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perealisasi pembangunan berwawasan kepulauan

Kewilayahan

1. Terciptanya keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan kerja
2. Memantapkan upaya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan)
3. Memantapkan sistim pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan,

meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS

4. Mengembangkan lokasi-lokasi yang layak secara ekonomi, lingkungan, dukungan infrastruktur, untuk dikembangkan menjadi industrial estate
5. Rampungnya jalan lingkaran Tembilahan diikuti bertambahnya ruas jalan provinsi dan jalan negara
6. Memantapkan upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di seluruh wilayah
7. Merealisasikan RUTW kabupaten dan persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang Kecamatan (RTRK) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)

5.2.4 Arah Kebijakan RPJM IV (2020-2025)

Sebagai pintu gerbang bagian selatan dari Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahapan pembangunan ini telah mampu bersaing dan memiliki peranan yang penting dengan daerah sekitar, baik di tingkat regional maupun nasional bahkan internasional. Keinginan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat diwujudkan melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha, pemerataan pembangunan serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Sumberdaya manusia yang maju diwujudkan melalui kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan yang lebih merata, pendirian dan penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidikan di dalam menjalankan profesinya. Pelayanan kesehatan yang luas baik penanggulangan penyakit menular dan endemik, pencegahan malnutrisi masyarakat, peningkatan pelayanan kepada ibu dan anak serta penyediaan pelayanan kesehatan bagi orang lanjut usia.

Profesionalisme dan kewibawaan aparatur pemerintah ditingkatkan dan juga pendewasaan masyarakat berpolitik melalui saluran yang tersedia akan

terwujudnya pelayanan publik yang semakin merata dan baik serta pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkualitas. Persamaan hak dan kewajiban masyarakat di dalam mengisi dan menjaga pembangunan diwujudkan melalui sosialisasi berbagai produk hukum dan perundangan, agar aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat lebih terjamin.

Prediksi Umum

1. Kemiskinan menurun menjadi	15,00 %
2. PDRB per kapita nominal	Rp.47.935.827,93
3. PDRB nominal	Rp.40.920,85 milyar
4. Pertumbuhan investasi	20%
5. Penduduk	853.659 orang
6. Angkatan kerja	367.177 orang
7. Bekerja di sector pertanian	60,28%
8. Rasio murid: guru SD	21
9. Rasio siswa: guru SLTP	25
10. Rasio siswa: guru SLTA	19

Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

1. Menyempurnakan upaya pengelolaan hutan, koordinasi dan penguatan kelembagaan serta pengawasan dan penegakan hukum.
2. Menuntaskan upaya penguatan kapasitas instrument pendukung pembangunan kelautan seperti meliputi iptek, SDM, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyempurnakan upaya konservasi laut dan pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.
4. Menuntaskan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten.

5. Menyempurnakan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
6. Menyempurnakan upaya penyadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
7. Menyempurnakan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat kabupaten.
8. Menyempurnakan penerapan sistem pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya laut.

Demografi

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dan penduduk usia lanjut.
3. Terbukanya lapangan kerja bagi penduduk usia kerja.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita sebesar Rp. 47.935.828.
2. Mantapnya pengelolaan sumber keuangan daerah.
3. Terwujudnya UKM dan koperasi yang kuat, handal dan berkualitas.
4. Mantapnya kelembagaan ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif dan non diskriminatif.
5. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis perikanan, pertanian, perdagangan dan industri serta pariwisata.
6. Terwujudnya perekonomian dengan sektor industri sebagai motor penggerak utama.
7. Terwujudnya industri daerah yang berorientasi nilai tambah.
8. Mantapnya daya saing produk pertanian dalam bentuk dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

- peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat.
9. Terwujudnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
 10. Kuatnya industri perikanan dan kelautan serta terwujudnya ketertiban aktif masyarakat pesisir di dalam usaha perikanan dan kelautan.
 11. Terwujudnya strategi pengembangan investasi daerah dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan investasi.
 12. Terwujudnya kinerja daya saing daerah industri daerah berkelanjutan dengan memperkuat landasan dan struktur ekonomi daerah yang kuat dengan menjaga stabilitas daerah, mewujudkan kondisi wilayah yang aman, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya serta pengelolaan persaingan usaha yang sehat.
 13. Terwujudnya sistem pemasaran dan manajemen usaha pertanian yang mantap di dalam mengelola resiko melalui penyuluhan untuk mendukung pengembangan agroindustri.
 14. Terwujudnya agroindustri berbasis sumber daya alam, pengembangan berbagai kegiatan produksi perikanan, dan perkebunan, dan tanaman pangan, mengembangkan basis produksi kegiatan non-pertanian modern di wilayah-wilayah pedesaan.
 15. Terwujudnya kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya perikanan dan kelautan yang mantap serta berkembangnya ekonomi berbasis perikanan dan kelautan melalui kegiatan usaha, investasi dan pemasaran hasil laut dan ikan.
 16. Memantapkan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk secara langsung membantu dalam bentuk asset dan/atau modal serta mendukung pihak swasta dalam mengelola kegiatan-kegiatan investasi strategis bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
 17. Terciptanya kondisi daerah yang berdaya saing, memiliki nuansa yang pro-investasi dan bisnis, pro-lingkungan dan tertatanya institusi, sistem dan prosedur yang transparan serta regulasi-regulasi investasi di daerah.

18. Terwujudnya sektor pariwisata yang mantap dan institusi yang lebih profesional di dalam mengelola pariwisata yang bersinergi, dan terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya.

Sosial Budaya

1. Tersedianya semua jenjang pendidikan di semua Kecamatan.
2. Meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tersedianya fasilitas persekolahan yang memadai di semua kecamatan.
3. Tercapainya tujuan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun di semua kecamatan.
4. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan tersebar merata.
5. Membaiknya derajat kesehatan masyarakat di semua kecamatan dan terbangunnya Puskesmas di seluruh desa.
6. Semakin luas, merata dan bermutu pendidikan formal dan non formal, baik umum maupun kejuruan
7. Tingginya taraf pendidikan kesehatan serta kualitas hidup perempuan dan anak.
8. Tercapainya pemuda mandiri dan prestasi olah raga dengan peranan pihak swasta, masyarakat dan pemerintah yang lebih mantap di dalam pembinaan.
9. Menyempurnakan upaya penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender
10. Menyempurnakan perangkat hukum pidana untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga

11. Kesejahteraan dan perlindungan anak semakin mantap
12. Mantapnya sistim informasi dan database bidang kebudayaan
13. Mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya
14. Menyempurnakan upaya pelestarian berbagai kekayaan budaya
15. Penyempurnaan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya.
16. Semakin mantapnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya

Sarana dan Prasarana

1. Peningkatan tanggul pengaman pantai di semua wilayah rawan abrasi dan gelombang pasang (tata air yang mantap)
2. Semua desa di daratan dapat diakses kendaraan bermotor dan peningkatan kegiatan ekonomi
3. Tersedianya sistem jaringan telekomunikasi dan kelistrikan secara mandiri menjangkau keseluruhan wilayah di kabupaten Indragiri Hilir
4. Pelabuhan utama menjadi pelabuhan ekspor
5. Adanya dermaga fery di semua kecamatan pulau sekaligus dengan jangkauan pelayaran kapal fery dan terbangunnya tambatan perahu di pulau-pulau kecil yang berpenghuni
6. Merintis jalur angkutan penyeberan
7. Terbukanya akses transportasi laut dan udara ke luar negeri
8. Memantapkan penggunaan sumberdaya energi berbasis energi
9. Ketersediaan air bersih di wilayah pesisir dan pulau sudah terpenuhi
10. Mantapnya kawasan pemukiman penduduk di seluruh wilayah kecamatan dan desa.
11. Terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, layak, aman dengan dukungan fasilitas

Politik dan Pemerintahan

1. Semakin memantapkan organisasi partai politik sebagai pembentuk kesadaran politik melalui sosialisasi dan pendidikan politik
2. memantapkan kemampuan manajemen organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) sebagai pendorong demokratisasi
3. Tercapainya partisipasi masyarakat dalam rangka reformasi dan desentralisasi dengan memberikan ruang yang cukup dalam praktek penyelenggaraan pemerintah / pembangunan karena tanpa partisipasi masyarakat akan berakibat aparatur pemerintah tidak akan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat/sesuai dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat
4. Menyempurnakan proses demokratisasi pada proses PILKADA
5. Menyempurnakan dasar-dasar Tata Pemerintahan yang baik menjadi Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
6. Mengkaji dan menyempurnakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintah baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang di dukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Melanjutkan upaya pemantapan dan cakupan serta kualitas kerjasama antar pemerintah daerah dan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi tetangga
8. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan, efektif, efisien dan tercapainya pelayanan publik yang bermutu
9. Melanjutkan upaya pemantapan kualitas aparatur pemerintah di semua kecamatan
10. Menuntaskan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme sehingga tersedia dana

dan pembiayaan yang memadai bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah

11. Meningkatkan perencanaan dan perealisasi pembangunan berwawasan kepulauan

Pembangunan Kewilayahan

1. Terwujudnya persebaran penduduk yang merata di setiap wilayah kecamatan
2. Penyempurnaan upaya pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis (agropolitan)
3. Menyempurnakan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS
4. Mengembangkan industrial estate menjadi kawasan berikat
5. Semua ruas jalan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sudah teraspal
6. Menuntaskan upaya peningkatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di seluruh wilayah
7. Memantapkan realisasi RUTW dan implementasi RTRK serta RDTR

BAB 6

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan arah sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Seluruh lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Indragiri Hilir beserta segenap masyarakat termasuk dunia usaha bersepakat atas visi, misi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2025
2. Seluruh jajaran lembaga eksekutif maupun legislatif Kabupaten Indragiri Hilir beserta segenap masyarakat termasuk dunia usaha wajib mempedomani arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2025 melalui penjabaran program pembangunan jangka menengah lima tahunan pertama sampai keempat untuk mewujudkan visi dan misi Daerah.
3. Kepala Daerah / Bupati Indragiri Hilir yang terpilih dalam Periode 2005-2025 wajib mempedomani visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2025

4. Pemerintah Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPLITBANG) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pemangku tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Propinsi Riau, merumuskan arah kebijakan dan strategi per sektor menjadi dokumen RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2025.
5. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan visi, misi arah kebijakan dan strategi yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam program yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam program-program pembangunan.
6. Pada akhirnya Periode 2005-2025, setiap lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian-pencapaian yang dihasilkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah melalui penerapan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah disepakati bersama.

BAB 7

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2025 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan strategi, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.

RPJP Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu kepada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi "INHIL BERJAYA DAN GEMILANG" perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari kepemimpinan di daerah, dan lokal formal maupun non formal yang kuat dan demokratis.
2. Konsistensi kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan yang mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Keberpihakan pemerintah dan dunia usaha kepada rakyat tempatan agar lebih berdaya dan memiliki kesetaraan dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia secara sinergis, dan proaktif di berbagai bidang pembangunan.